



Laporan Tahunan 2020
PT Pertamina Pedeve Indonesia

Tentang Laporan Tahunan PT Pertamina Pedeve Indonesia

Penyusunan Laporan Tahunan PT Pertamina Pedeve Indonesia 2020 merupakan upaya Perseroan menjalankan praktek atas pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

SANGKALAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Tahunan PT Pertamina Pedeve Indonesia atau disebut "Pedeve" atau "Perusahaan" atau "Perseroan" disusun berdasarkan dokumen dan narasumber yang terpercaya dan disajikan dalam bentuk informasi dan data yang bersifat material terhadap pihak yang berkepentingan. Laporan Tahunan ini memuat pernyataan-pernyataan atas kondisi Perusahaan yang bersumber dari kinerja yang dicapai oleh Perusahaan. Selain informasi-informasi historis, Laporan ini juga menyajikan pandangan Perusahaan terhadap apa yang dianggap sebagai pandangan masa depan (forward looking statement) yang merupakan proyeksi atau prospek, dalam halmana proyeksi atau prospek yang disampaikan pada akhirnya dapat berbeda dengan kenyataan karena setiap informasi yang disampaikan dapat mengandung unsur risiko ketidakpastian.

Pernyataan-pernyataan dalam Laporan ini merupakan hasil evaluasi atas akondisi sosial, ekonomi maupun politik baik bersifat nasional maupun regional. Dengan adanya risiko ketidakpastian tersebut, Perusahaan tidak menjamin bahwa pandangan masa depan dalam Laporan ini akan tepat dan akurat secara keseluruhannya.

REFERENSI DAN PERIODE PELAPORAN

Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 Perusahaan disusun dengan merujuk kepada Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kriteria Annual Report Award dan Kriteria Annual Report Pertamina Subsidiary Award. Periode Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 ini meliputi periode 1 Januari 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penyebutan satuan mata uang "Rupiah" atau Rp atau IDR" merujuk pada mata uang resmi Indonesia, sedangkan "Dollar AS atau US\$" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Kecuali jika disebutkan lain, semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan Indonesia.

PENETAPAN TOPIK MATERIAL

Laporan Tahunan ini memuat informasi mengenai kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan. Informasi lain yang merupakan bagian dari kinerja keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan, sesuai indikator maupun topik dalam pelaporan ini.

Proses penyusunan Laporan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dan melalui tahapan berjenjang. Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan ini terdiri dari keterlibatan pemangku kepentingan, materialitas, kelengkapan dan kejelasan, sedangkan untuk tahapan Penyusunan Laporan ini meliputi: Identifikasi topik-topik terpilih, Prioritas atas topik-topik terpilih, validasi atas topik prioritas dan kajian ulang atas laporan tahun sebelumnya. Adapun topik material dalam laporan ini yaitu: "Bertahan dalam tantangan pandemi menjaga Kinerja Perusahaan".

Laporan Tahunan ini memuat kata "Pedeve" dan "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Pertamina Pedeve Indonesia yang menjalankan bisnis di bidang Perdagangan Pada Umumnya.

Daftar Isi

~ 'n					
	Tentang Laporan Tahunan 2020			Uraian atas kinerja Keuangan Perusahaan	50
				Kemampuan Membayar Hutang	56
	Sangkalan dan Batasan Tanggung Jawab			Tingkat kolektibilitas Piutang	57
	Referensi dan Periode Pelaporan			Struktur Modal	58
	Penetapan Topik Material	1		Perbandingan antara Target/	
				Proyeksi dengan Realisasi	59
	Daftar Isi			Informasi Transaksi Material yang	
	Daftar Isi	2		Mengandung Benturan Kepentingan	63
4	Durtai 131	_		Perubahan Peraturan Perundang-undangan	
(20)	Kilas Kinerja Tahun 2020			yang Berpengaruh signifikan	
				terhadap Perusahaan	66
	Ikhtisar Utama	3		Perubahan Peraturan Akuntansi yang	
	Ikhtisar data keuangan penting	4		diterapkan Perusahaan pada	
	Ikhtisar data Kinerja Operasional	7		Tahun Buku Terakhir	67
	Informasi Harga Saham	10		Teknologi Informasi	68
	Informasi obligasi, sukuk atau				
	obligasi konvertibel	10	(i ⁻ i)	Tata Kelola Perusahaan	
	Ikhtisar Dividen	11			
M				Kebijakan dan Pedoman GCG	69
= //1	Laporan Manajemen			Asessmen GCG	71
				Struktur tata Kelola Perusahaan	73
	Laporan Dewan Komisaris	12		Rapat Umum Pemegang Saham	74
	Laporan Direksi	16		Dewan Komisaris	76
	Telaahan Dewan Komisaris	18		Direksi	85
	Pernyataan Pertanggungjawaban Anggota			Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	94
	Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi	19		Sekretaris Dewan Komisaris	93
A				Komite Audit	94
	Profil Perusahaan			Sekretaris Perseroan	95
				Unit Audit Internal	96
	Identitas Perusahaan	20		Akuntan Publik	100
	Sekilas Pedeve	21		Sistem Manajemen Risiko	101
	Kegiatan Usaha	23		Sistem Pengendalian Internal	104
	Visi, Misi & Tata Nilai	25		Kode Etik dan Pakta Integritas	105
	Struktur Organisasi Perusahaan	26		Whistleblowing System	110
	Peristiwa Penting	27		Akses Informasi dan Data Perusahaan	112
	Profil Dewan Komisaris Profil Komite Dibawah Dewan Komisaris	28 29		Pengadaan Barang dan Jasa	112
	Profil Direksi	31		Permasalahan Hukum dan Lainnya	113
	Pejabat Eksekutif Perusahaan	32	500		
	Komposisi Pemegang Saham	34		Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corpora	ite
	Struktur Grup Perusahaan	35		Social Responsibility/ "CSR")	
	Sumber Daya Manusia	36			
	Wilayah Operasi Perusahaan	41		Komitmen dan Kebijakan Umum	119
	Lembaga dan Profesi Penunjang	42		Perencanaan CSR tahun 2020	121
	Nama dan Alamat Entitas Afiliasi	43		Anggaran dan Sumber Pendanaan CSR	121
	Website Perusahaan	47		Realisasi CSR	121
	Analisis Dan Pembahasan Manajemen			Laporan Keuangan Audited	
~	Tinjauan Umum	48	,	Laporan Keuangan Audited	123
	Prospek Perekonomian	49			

Ikhtisar Utama



GOING CONCERN PERUSAHAAN

- Fokus memperkuat posisi Perseroan sebagai Special Purpose Vehicle
- Penyesuaian Organisasi Manajamen

FINANCIAL



Pendapatan • Rp.197,67 Milyar

Laba Setelah Pajak ● **Rp.111,60 Milyar**

Laba per Saham • Rp.637,72

EBITDA ● Rp.182,43 Milyar



HSSE

- Jam Kerja Selamat20.368 jam
- Number of Accident
- Total Recordable Incident Rate (TRIR)0

Ikhtisar Data Keuangan Penting

SKALA ORGANISASI

No	Uraian	Satuan	2016*	2017*	2018	2019	2020
1	Jumlah Pegawai Tetap Perseroan	Orang	28	27	4	4	5
2	Pendapatan **	Rp. Juta	312.163	198.110	115.940	160.741	197.669
3	Laba Bersih	Rp. Juta	52.904	43.013	78.091	121.243	111.600
4	Total Aset	Rp. Juta	2.120.457	966.343	899.248	871.801	3.784.993
5	Total Kewajiban	Rp. Juta	1.355.826	160.037	57.840	26.293	605.945
6	Total Ekuitas	Rp. Juta	764.631	806.306	841.408	845.508	3.179.048

TABEL IKHTISAR LABA RUGI KOMPREHENSIF (RP. JUTA)

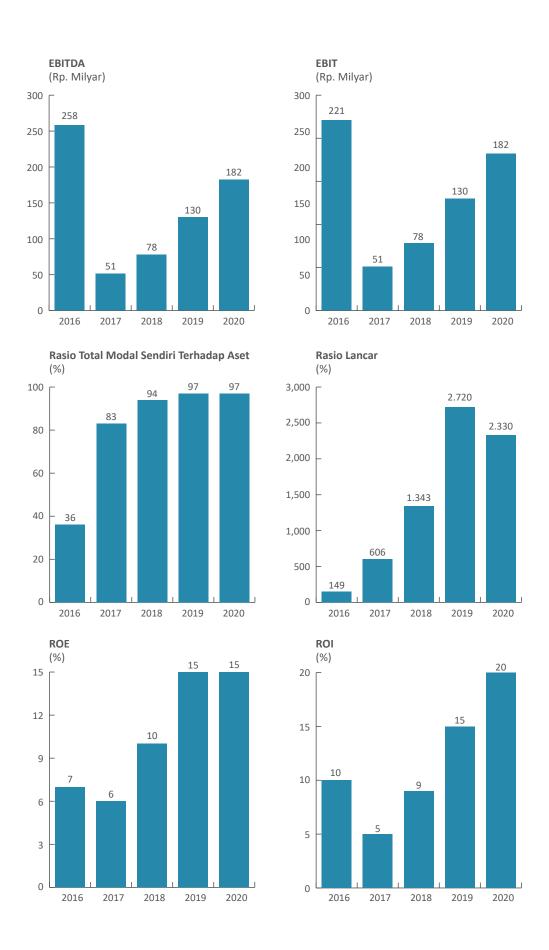
Uraian	2016*	2017*	2018	2019	2020
Pendapatan **	312.163	198.110	115.940	160.741	197.669
Beban Pokok Pendapatan	(53.493)	(87.615)	-	-	-
Laba Kotor	258.670	110.496	115.940	160.741	197.669
Beban Operasional	(39.492)	(51.176)	(20.390)	(10.631)	(8.936)
Laba Usaha	219.178	59.320	95.550	150.110	188.733
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(8.352)	989	3.948	(1.641)	4.623
Beban Penurunan Nilai Piutang	(62.033)	(4.918)	(3.344)	(5.435)	(665)
Alokasi Cadangan Liabilitas Jangka Panjang Kondisional	(92.693)	-	-	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	56.100	55.391	96.154	143.034	192.691
Beban Pajak Final	(1.096)	(7.546)	(9.010)	(10.287)	(6.471)
Beban Pajak Penghasilan	(2.100)	(4.833)	(9.052)	(11.504)	(74.620)
Laba Setelah Pajak	52.904	43.012	78.091	121.243	111.600
Laba (Rugi) Komprehensif Lain	(1.572)	(2.403)	-	(6,5)	354.534
Laba komprehensif	51.332	40.609	78.091	121.236	466.134

TABEL INFORMASI POSISI KEUANGAN DALAM BENTUK PERBANDINGAN (RP. JUTA)

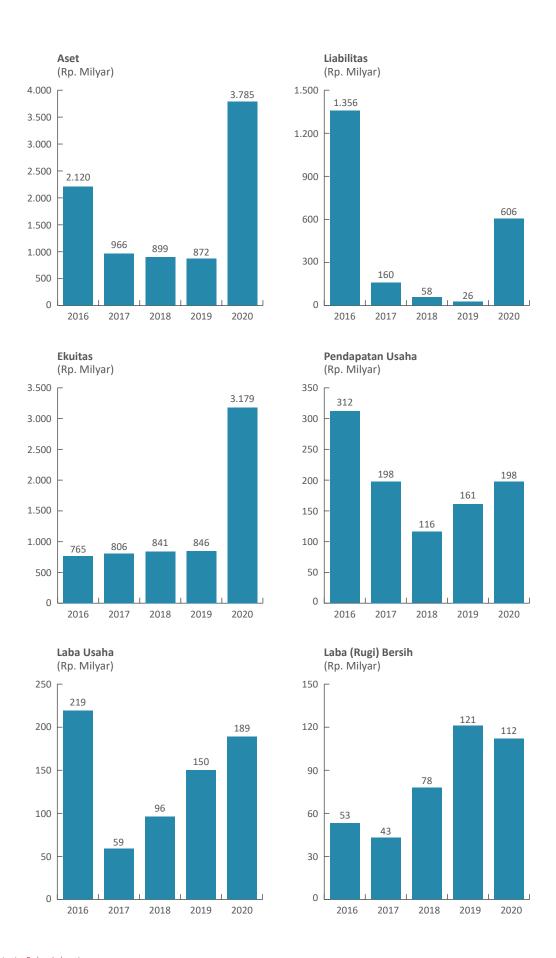
Uraian	2016*	2017*	2018	2019	2020
ASET					
Aset Lancar Lainnya	2.009.934	855.271	734.111	691.983	623.273
Penyertaan Saham	102.498	105.318	121.845	124.816	3.144.604
Aset Tidak Lancar Lainnya	8.025	5.574	43.292	55.002	17.116
Jumlah Aset	2.120.457	966.343	899.248	871.801	3.784.993
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek	1.323.465	142.630	57.458	25.437	26.868
Liabilitas Jangka Panjang	32.361	17.406	382	856	579.077
Jumlah Liabilitas	1.355.826	160.037	57.840	26.293	605.945
EKUITAS					
Jumlah Ekuitas	764.631	806.306	841.408	845.508	3.179.048

Tahun 2016 s.d 2017 merupakan laporan keuangan konsolidasi dengan PT Mitra Tours & Travel yang di-divestasi pada Januari 2018.

^{**} Untuk keperluan perbandingan pendapatan deposito tahun 2016 s.d 2017 disajikan secara gross sebelum pajak final.







Ikhtisar Data Kinerja Operasional

PENYERTAAN SAHAM

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan penyertaan saham pada Anak Perusahaan Pertamina, baik penyertaan saham baru maupun penambahan penyertaan saham. Realisasi penyertaan saham pada tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Anak Perusahaan		Jumlah (Rp. Juta)
1	Penambahan Penyertaan Saham di PT Kilang Pertamina International (PT KPI)		812
2	Pengambilalihan saham di PT Tuban Petro Industries		133.696
3	Penambahan Penyertaan Saham di PT KPI untuk PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (GRR Tuban)		1.039
		Total	135.547

Pada tahun 2020 Perseroan mulai mengimplementasikan PSAK 71. Berdasarkan ketentuan dalam PSAK 71 maka nilai penyertaan saham Perseroan disajikan dengan nilai wajar dimana hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang disajikan berdasarkan nilai perolehan. Penyajian nilai penyertaan saham berdasarkan nilai wajar mengharuskan Perseroan melakukan valuasi atas nilai saham. Proses valuasi atas nilai saham-saham yang dimiliki menunjukkan peningkatan nilai wajar saham yang sangat signifikan, yaitu meningkat sebesar **Rp 2.884.366.673.493.** Dengan bertambahnya penyertaan saham pada tahun 2020 dan valuasi nilai saham, maka total nilai wajar penyertaan saham sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 3.144.604.332.763,-.**

			Kepemilikan	
No	Perusahaan	%	2020 (Rp. Ribu)	2019 (Rp. Ribu)
1	PT Pertamina Geothermal Energy	8,91%	1.318.703.413	69.052.000
2	PT Pertamina Hulu Energi	1,28%	1.025.095.050	6.400.000
3	PT Pertamina EP Cepu	1,00%	431.860.981	9.696.482
4	PT Tuban Petro Industries	2,01%	133.185.947	0
5	PT Pertamina Training and Consulting	9,00%	46.575.443	1.150.200
6	PT Trans Javagas Pipeline	10,00%	35.499.177	9.197.809
7	PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga	1,00%	21.331.086	15.000
8	PT Pertamina Hulu Rokan	0,13%	17.967.900	14.776.840
9	PT Pertamina Lubricants	0,05%	14.420.135	1.706.000
10	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	1,00%	14.094.387	15.000
11	PT Pertamina Hulu Indonesia	0,00%	13.463.767	0
12	PT Pertamina EP Cepu ADK	1,00%	13.189.394	2.500
13	PT Kilang Pertamina International	0,10%	12.604.655	1.214.285
14	PT Patra Badak Arun Solusi	3,99%	11.182.997	1.406.311
15	PT Pertamina Drilling Services Indonesia	0,11%	6.573.603	900.820
16	PT Pertamina International Shipping	0,05%	6.215.195	667.817
17	PT Pertamina EP	0,01%	5.449.132	3.733.026
18	PT Mitra Tours & Travel	10,00%	4.627.949	1.718.257
19	PT Pertamina Gas	0,01%	3.354.500	1.045.597
20	PT Badak Natural Gas Liquefaction	15,00%	2.445.411	583.848
21	PT Pelita Air Service	0,00%	1.375.279	14.329
22	PT Kilang Pertamina Balikpapan	0,10%	1.084.168	1.183.991
23	PT Pertamina Bina Medika	0,02%	1.021.448	148.400
24	PT Pertamina Algeria EP	0,00%	890.239	1.000
25	PT Pertamina Malaysia EP	0,00%	753.189	1.000
26	PT Patra Jasa	0,02%	515.842	107.750



			Kepemilikan			
No	Perusahaan	%	2020 (Rp. Ribu)	2019 (Rp. Ribu)		
27	PT Pertamina Hulu Attaka	1,00%	404.103	15.000		
28	PT Pertamina Retail	0,00%	259.058	13.274		
29	PT Pertamina Trans Kontinental	0,00%	257.960	22.430		
30	PT Pertamina Hulu West Ganal	1,00%	91.408	15.000		
31	PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	0,07%	89.541	1.000		
32	PT Pertamina Power Indonesia	0,00%	19.637	8.476		
33	PT Pertamina East Natuna	0,10%	1.250	1.250		
34	PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi	0,00%	1.087	1.000		
35	PT Pertamina Hulu Energi Arun	0,00%	2	2		
	Total		3.144.604.333	124.815.694		

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN 2020

			RKAP REVISI	2020 Audi		020
	Kinerja Penilaian	Satuan	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot
	Indikator Kinerja Keuangan					
	1. ROE	%	13,58	20,0	14,58	20,00
	2. ROI	%	13,76	15,0	20,26	15,00
	3. Operating Profit Margin (OPM)	%	93,25	3,0	95,14	3,00
	4. Net Profit Margin (NPM)	%	71,91	3,0	56,46	3,00
	5. Rasio Kas (dengan Deposito)	%	928,29	5,0	2.327,39	5,00
KEUANGAN	6. Rasio Lancar	%	935,38	5,0	2.330,05	5,00
REUANGAN	7. Perputaran piutang	Hari	0,87	3,0	0,00	3,00
	8. Perputaran Persediaan	Hari	n/a	-	n/a	-
	9. Perputaran Total Asset	%	15,51	3,0	21,98	3,00
	10. Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset	%	98,14	2,0	96,85	2,00
	11. Time Interest Earned Ratio (TIER)	%	-	-	-	
	Jumlah NKK yang diproporsionalkan		65,00		65,00	
	Klasifikasi Kinerja Keuangan		Sehat		Sehat	
	Indikator Kinerja Pertumbuhan					
	Asset Productivity Growth (ASPG)	%	(1,76)	-	35,22	2,00
	2. Sales Growth (SALG)	%	(14,88)	-	22,97	2,00
PERTUMBUHAN	3. Net Profit Margin Growth (NPMG)	%	(4,67)	-	(25,15)	0,00
PERTONIBOHAN	4. Sales to Total Asset Growth (STAG)	%	(11,46)	-	19,04	2,00
	5. Net Profit Growth (NPG)	%	(24,93)	-	(14,35)	0,00
	Jumlah NKP		0,00		6,00	
	Klasifikasi Kinerja Pertumbuhan		Kurang Tumbuh	Ku	rang Tumbuh	
	Indikator Kinerja Operasional					
	Service Level Agreement RUPS Sirkuler	Hari	2,00	1,9	2,00	1,88
	2. Pengalihan saham di Pertamina Grup	Hari	2,00	1,9	2,00	1,88
OPERASIONAL	Ketepatan waktu dan akurasi data operasi keuangan	%	100,00	2,5	98,92	1,88
	4. HSSE Excelence (Health & safety participation)	Jumlah	12,00	2,5	12,00	2,50
	Jumlah NKO		8,76		8,14	
	Klasifikasi Kinerja Operasional		Sangat Baik		Sangat Baik	



	Vinavia Davilaian	Satuan	RKAP REVISI 2020		Audited 2020	
	Kinerja Penilaian		Nilai	Bobot	Nilai	Bobot
	Indikator Kinerja Administrasi					
	Laporan Keuangan Bulanan *)	Hari	≤7 hari	2,00	≤7 hari	2,00
	2. Laporan Keuangan Manajemen	Hari	12 hari kalender	2,00	12 hari kalender	2,00
ADMINISTRASI	3. Laporan Keuangan Audited	Bulan	≤Bulan Februari	3,00	≤Bulan Februari	3,00
	4. Rancangan RKAP	Bulan	Bulan Juli	3,00	Bulan Juli	3,00
	Jumlah NKA		10.00		10.00	
	Klasifikasi Kinerja Administrasi		Tertib		Tertib	
	Total NKK + NKP + NKO + NKA		83.76		89.14	
	Tingkat Kesehatan Perusahaan		Sehat AA		Sehat AA	

KEY PERFORMANCE INDICATOR

Nama KPI	Prequency Monitoring	Satuan	Bobot	Target 2020	Realisasi Desember 2020	Pencapaian	Bobot
Group KPIs			10				10,98
EBITDA Margin	Bulanan	%	30	84,31	92,29	109,47	32,84
ROI	Bulanan	%	30	13,76	20,26	110,00	33,00
Current Ratio	Bulanan	%	40	935,38	2.330,05	110,00	44,00
Division KPIs			90				93,68
Financial			15				15,79
OPEX	Bulanan	Rp. Milyar	40	9,24	8,94	105,00	42,00
Imbal Hasil Deposito	Bulanan	%	30	5,50	5,55	100,91	30,27
Sinergi Anak/Cucu Perusahaan Pertamina	Triwulan	%	30	9,00	14,62	110,00	33,00
Operational Excellence			50				52,43
Service Level Agreement (SLA) RUPS (RUPS Sirkuler)	Triwulan	Hari	40	2	2	105,00	42,00
Pengalihan Saham di Pertamina Group	Triwulan	Hari	30	2	2	105,00	31,50
Aksi Korporasi sebagai Pemegang Saham	Triwulan	Hari	15	2	2	105,00	15,75
Ketepatan Waktu & Akurasi Data Operasi Keuangan	Triwulan	%	15	100	98,92	104,00	15,60
Growth & Governance			35				35,88
Pencapaian Realisasi Fisik ABI	Triwulan	%	10	100	100	110,00	11,00
HSE Excellence (Health & Safety Participation)	Bulanan	Jml. Meeting	10	12	12	100,00	10,00
Penyusunan SOP	Triwulan	Jumlah SOP	50	5	5	100,00	50,00
Laporan Perkembangan Masalah Hukum	Bulanan	Tanggal	30	7	6	105,00	31,50
			100				104,67

Informasi Harga Saham

PT Pertamina Pedeve Indonesia merupakan Perseroan Terbatas tertutup, dan sampai dengan akhir tahun 2020 tidak melakukan perdagangan saham, dengan demikian Laporan ini tidak menyajikan informasi mengenai jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERTIBEL

Hingga akhir tahun 2020, PT Pertamina Pedeve Indonesia tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi, dengan demikian Laporan ini tidak menyajikan informasi terkait jumlah obligasi, sukuk dan obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi atau sukuk.



Ikhtisar Dividen

Besaran dividen ditentukan dalam RUPS. Berdasarkan Akta No.76 tanggal 22 Juli 2020 tentang Berita Acara RUPS Tahunan untuk tahun buku 2019, Pemegang Saham memutuskan menetapkan dividen sebesar Rp 84.870.051.535,- (70% dari laba bersih tahun buku 2019).

Berikut adalah perkembangan pembagian dividen kepada Pemegang Saham dalam 5 tahun terakhir :

KETERANGAN	2016	2017	2018	2019	2020
Dasar Hukum	Akta No. 3 tanggal 16 Maret 2016, Notaris Yulkhaizar Panuh	Akta No. 5 tanggal 08 Mei 2017, Notaris Yulkhaizar Panuh	Akta No. 3 tanggal 06 Juni 2018, Notaris Marianne V. Hamdani	Akta No. 53 tanggal 24 Mei 2019, Notaris Marianne V. Hamdani	Akta No. 76 tanggal 22 Juli 2020, Notaris Marianne V. Hamdani
Laba Bersih	Rp.104.619.566.196	Rp.52.904.744.000	Rp.42.824.837.000	Rp.78.091.372.000	Rp.121.242.930.691
Dividen Declare	Rp. 0	Rp. 0	Rp.42.824.837.000	Rp.117.137.057.000	Rp.84.870.051.535
Dividen Payout Ratio (dalam %)	0%	0%	100%	150%	70%



Laporan Manajemen Laporan Dewan Komisaris





Cornelius Simanjuntak Komisaris

PARA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga PT Pertamina Pedeve Indonesia dapat melalui Tahun 2020 dengan baik. Secara umum Tahun 2020 merupakan tahun yang berat sejak terjadinya pandemi Covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pada kuartal pertama 2020, namun demikian dengan semangat untuk mempertahankan kinerja yang baik, Perseroan telah berhasil melewati tahun 2020 dengan capaian yang menggembirakan yang dapat melebihi target yang dicanangkan dalam RKAP.

KONDISI PEREKONOMIAN MAKRO

Dampak terjadinya Pandemi Covid 19, menyebabkan perekonomian dunia mengalami keterpurukan dan sebagian negara dalam keadaan resesi. Mengacu pada Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 5 Februari 2021, dimana ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,07 Persen, sementara dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 masih sebesar 5,2 persen. Menurut Direktur Pelaksana Bank Dunia dalam rilisnya pda Januari 2021, kemungkinan masa recovery pertumbuhan yang normal seperti masa sebelum pandemi Covid 19, maka Indonesia memerlukan tiga sampai lima tahun untuk membalikkan keadaan.

Perseroan yang merupakan anggota grup PT Pertamina (Persero) yang bergerak dibidang Migas, yang sebagian besar investasi Perseroan ditempatkan pada sektor hulu migas melalui anak perusahaan-anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Dari laporan Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui bahwa realisasi investasi migas tahun 2020 hanya mencapai USD 12,09 milyar dari target sebesar USD 13,63 milyar (tercapai hanya 88,7%). Dampak Pandemi Covid 19 menyebabkan penurunan aktivitas kegiatan sektor hulu migas dan berdasarkan pendapat mantan Direktur Utama Pertamina Bapak Ari Sumarno (2006-2009) sebagaimana dikutip CNBC Indonesia keterpurukan investasi di bidang migas bersumber dari faktor internal antara lain disebabkan Indonesia dianggap sudah tidak atraktif bagi investor salah satunya disebabkan insentif fiskal yang tidak kompetitif birokrasi, perizinan dan kebijakan pemerintah, sedangkan faktor ekternal diakibatkan dari konsolidasi dampak Covid 19 sehingga terjadi penurunan konsumsi migas yang menyebabkan perusahaan migas menurunkan produksinya.

Penurunan produksi migas dan tidak tercapainya kegiatan investasi di bidang migas, maka mengakibatkan menurunnya pendapatan perusahaan tersebut yang berdampak pada Penurunan Laba Perusahaan yang pada akhirnya memperkecil kesempatan perolehan dividen yang dapat dibagi kepada para pemegang sahamnya. Hal tersebut secara langsung akan sangat berdampak



bagi Perseroan khususnya atas kondisi keuangan yang akan terjadi pada tahun 2021. Sedangkan yang dinikmati Perseroan sepanjang tahun 2020 adalah lebih mencerminkan kinerja yang terjadi tahun 2019 dikarena sumber utama pendapatan Perseroan berasal dari dividen anak perusahaan-anak perusahaan dimaksud yang ditahun 2019 masih menunjukkan kinerja yang cukup baik.

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dalam menjalankan amanah para Pemegang Saham Perseroan, tugas Dewan Komisaris Perusahaan sebagai pengawas pada prinsipnya yaitu memastikan seluruh aktifitas usaha yang dilaksanakan oleh Direksi agar tetap memenuhi segala aspek pengelolaan perusahaan yang baik dan sesuai dengan kaidahkaidah yang berlaku. Dewan Komisaris turut berperan aktif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan pengawasan yang antara lain dengan melakukan rapat rutin bulanan sepanjang tahun 2020 di kantor Perseroan maupun daring, yang turut melibatkan Direksi dalam pelaksanaanya. Dalam setiap rapat tersebut Dewan Komisaris dapat memonitor perkembangan pengelolaan Perseroan terkait laporan keuangan bulanan / kinerja operasional dan tidak lanjut hasil keputusan rapat sebelumnya dan membahas hal lain yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan pada akhir tahun buku Tahun 2020 telah dilakukan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik atas Laporan Keuangan tahun 2020. Audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Audit Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (afiliasi Price waterhouse Coopers) menghasilkan opini Laporan Keuangan "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material". Selain daripada itu, Perusahaan menunjukkan pencapaian KPI sebesar 104,67% dengan tingkat kesehatan mencapai 89,14 % termasuk dalam kategori "Sehat AA". Pencapaian-pencapaian tersebut merupakan wujud pengurusan Perseroan yang konservatif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik namun tetap dengan hasil kinerja yang baik.

Terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Dewan Komisaris menilai Direksi telah memastikan dipatuhinya aspekaspek keselamatan kerja dan kesehatan kerja sebagaimana dibuktikan dari pencapaian nihil kejadian Number of Accident (NoA) maupun Total Recordable Incident Rate (TRIR) oleh Perusahaan. Selain daripada itu, aktivitas bisnis Perusahaan juga memperkecil kemungkinan terjadinya fatality.

Dalam pelaksanaan tugasnya, mengingat ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan, Dewan Komisaris dibantu oleh satu Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit yang merupakan Komite mandatori yang perlu di bentuk oleh Perseroan sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku. Komite Audit berfungsi memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas laporan Direksi, khususnya laporan keuangan, menelaah independensi dan melakukan analisa efektifitas pengawasan internal perusahaan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN **PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS**

Implementasi atas pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) bagi Perseroan dilakukan melalui sosialisasi dan internalisasi di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi untuk dapat memaksimalkan nilai Perseroan dengan cara memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran sehingga Perseroan memiliki daya saing yang kuat. Meskipun dengan keterbatasan personil namun demikian, Dewan Komisaris memandang Pengurus Perseroan telah melakukan upayaupaya yang efektif dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

PANDANGAN TERHADAP PROSPEK USAHA KE **DEPAN PERSEROAN**

Terjadinya pandemi Covid 19 yang menyebabkan melemahnya tingkat Pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun secara global tentunya berdampak pada berkurangnya peluang meraih keuntungan dari aktifitas bisnis as usual yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di mana Perseroan menempatkan dananya dalam bentuk penyertaan saham terutama di sektor industri migas. Pembatasan mobilitas masyarakat akibat Covid 19 menyebabkan produksi hilir migas mengalami penurunan konsumsi produk, sementara di sektor hulu migas terjadi penurunan produksi yang antara lain disebabkan melemahnya daya serap bahan baku yang akan diproduksi namun tidak dikonsumsi karena semua aspek perekonomian terdampak oleh pandemi Covid 19.

Dampak langsung dari terjadinya Pandemi Covid 19 bagi Perseroan pada tahun buku 2020, belum begitu terasa karena dilatar belakangi aktifitas usaha yang banyak melakukan investasi melalui penyertaan modal pada perusahaan lain sehingga dengan demikian pencapaian target Perseroan dapat dipengaruhi oleh Kinerja perusahaan-perusahaan dimana Perseroan merupakan pemegang saham tersebut. Pandemi akan terasa dampaknya terhadap Perseroan setelah setidaknya melewati masa itu untuk satu tahun buku dimana di tahun tersebut terjadi kontraksi Pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik berada di level minus dua koma nol tujuh persen. Dengan demikian melawati tahun 2021 akan menjadi perjuangan yang berat terutama dalam usaha memulihkan perekonomian.

Dibandingkan dengan rencana kerja tahun sebelumnya, dari rencana kerja yang disusun oleh Direksi untuk tahun 2020, masih diproyeksinya dengan model revenue stream yang sama yang akan diperoleh Perseroan sepanjang tahun 2021 dimana Pendapatan Dividen masih menjadi salah satu pemberi kontribusi terbesar bagi Perseroan, dan hal tersebut sejalan



dengan posisi Perusahaan selaku Special Purpose Vehicle (SPV) dimana perusahaan adalah pemegang saham pendamping di lingkungan Pertamina Grup.

Berdasarkan pengalaman menghadapi situasi Pandemi sepanjang tahun 2020 yang lalu, kami masih optimis bahwa target pada tahun 2021 yang dikemukakan oleh Direksi Perseroan akan dapat dicapai dengan baik karena tentunya seluruh Rencana Kerja tahun 2021 telah memperhitungkan situasi yang terjadi di tahun sebelumnya terutama terkait dampak Pandemi Covid 19. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan berkeyakinan bahwa melalui kerja keras dan koordinasi yang baik di semua lini organisasi serta dukungan dari para Pemegang Saham, Perseroan akan dapat mewujudkan kinerja yang semakin kokoh pada tahun mendatang dan target pada tahun 2021 akan dapat dicapai dengan baik.

PANDANGAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Mengingat Perusahaan hanya memiliki satu orang Direktur dengan satu orang Komisaris, guna tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak tahun 2020 keberadaan Komite Komisaris telah disesuaikan. Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi dibantu oleh Komite Audit. Komite dimaksud membantu Dewan Komisaris dalam melakukan analisa, evaluasi dan kajian untuk menyiapkan memorandum/surat Dewan Komisaris terkait dengan permintaan persetujuan, dukungan, saran/nasehat serta tanggapan dari Direksi.

Sepanjang tahun 2020 terjadi perubahan susunan anggota Komite Audit, mengingat anggota sebelumnya yaitu Saudara Kurnia Pinayungan dan Saudari Seny Saraswati telah berakhir masa tugasnya per tanggal 28 Juli 2020 maka Dewan komisaris telah memberhentikan keanggotaan yang bersangkutan disertai ucapan terima kasih atas segala konstribusinya selama menjadi anggota Komite Audit. Mengingat proses pengangkatan anggota baru Komite Audit memerlukan mekanisme yang cukup panjang, maka pengisian jabatan Anggota Komite Audit Perseroan baru di tetapkan pada tanggal 1 Februari 2021, berdasarkan surat Keputusan Dekom No. SKPTS-001/K0000/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Komite Audit.

Komite Audit sendiri telah melakukan monitoring pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan, mengkaji independensi auditor independen, memonitor kinerja audit internal, mengevaluasi sistem pengendalian intern perusahaan dan aktif menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

APRESIASI

Akhir kata, Dewan Komisaris menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham, Mitra Kerja dan seluruh Pemangku Kepentingan atas dukungan dan kepercayaan kepada Perseroan selama tahun 2020.

Kami juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada Direksi beserta seluruh karyawan Perseroan atas kinerja, semangat, loyalitas dan dedikasinya kepada Perseroan. Semoga di tahun-tahun mendatang semangat, loyalitas dan dedikasi dapat kita jaga dan tingkatkan guna meningkatkan kinerja Perusahaan.

Dewan Komisaris,

Cornelius Simanjuntak

Komisaris

Laporan Manajemen

I Laporan Direksi



Khurinnihayah Direktur

PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT

Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, di tahun 2020 Perseroan tetap memiliki kinerja keuangan dan operasi yang baik meskipun tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat dimana kita semua harus menghadapi pandemi Covid 19 yang berdampak semakin beratnya pencapaian yang ditargetkan kepada Perseroan. Perseroan telah melakukan segala upaya mitigasi agar kinerja Perseroan tidak terdampak dengan kondisi Pandemi Covid 19 tersebut. Kami bersyukur tahun 2020 dapat dilalui dengan baik, target laba yang ditetapkan oleh pemegang saham dapat dilampaui. Direksi sangat menyadari bahwa pencapaian tersebut tidak lepas dari kerja keras serta dukungan dari semua pihak khususnya para Pekerja Perseroan.

KINERJA PERSEROAN

Sebagai Perusahaan Special Purpose Vehicle yang telah ditetapkan oleh Pertamina, maka saat ini aktifitas usaha yang dilakukan oleh Perseroan lebih kepada pendayagunaan aset likuid Perseroan dengan melakukan penempatan investasi yang memililki imbal hasil yang optimal dalam bentuk deposito maupun ditempatkan pada Perusahaan-perusahaan dimana Perseroan ditugaskan oleh PT Pertamina (Persero) untuk mendampingi atau melakukan penyertaan pada Perusahaan-perusahaan tersebut.

Sepanjang 2020, Perseroan berhasil membukukan Laba tahun berjalan sebesar Rp.111,60 milyar, naik di atas RKAP 2020 yang telah ditetapkan sebesar Rp.98,39 milyar (113,43% dari RKAP 2020) dan terdapat tambahan penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp.355,22 milyar yang merupakan perubahan nilai wajar investasi (revaluasi nilai saham milik Perseroan pada Perusahaan lainnya yang dilakukan sesuai ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 71), Penghasilan ini tidak berdampak secara cash bagi Perseroan. Laba Perseroan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.9,64 milyar dibanding laba Tahun tahun 2019 yang sebesar Rp.121,24 milyar. Hal ini terjadi karena terdapat penurunan pendapatan bunga deposito yang disebabkan pada bulan Maret 2020 Perseroan melakukan investasi pembelian Saham PT Tuban Petrochemical Industries (PT TUPI) senilai Rp.133,69 milyar sehingga terdapat potensi sumber pendapatan Deposito berkurang senilai investasi tersebut (Perseroan di tahun 2020 belum menerima Dividen dari PT TUPI).

KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN

Memasuki tahun kedua perubahan ruang lingkup usaha, sepanjang tahun 2020 Perseroan mengoptimalkan kegiatan usaha dengan melakukan penyertaan saham pada perseroan terbatas di lingkungan Pertamina grup



yang pelaksanaannya merupakan penugasan dari PT Pertamina (Persero). Internalisasi bisnis proses dan penyesuaian Standard Operation & Procedure masih terus dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan struktur organisasi yang ada. Sebagai Special Purpose Vehicle (SPV) Perseroan fokus pada bagaimana keberadaan Perseroan yang merupakan bagian dari Pertamina berkontribusi memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan Pertamina maupun grup melalui pemanfaatan aset likuid milik Perseroan oleh Pertamina grup sebagai alternatif sumber pendanaan investasi anak perusahaan Pertamina.

PROSPEK KE DEPAN PERUSAHAAN

Situasi Pandemi Covid 19 yang terjadi diproyeksikan akan berdampak tidak hanya pada tahun 2020 semata namun juga masih akan berdampak di tahun 2021, mengutip laporan Forum Ekonomi Dunia (Wold Economic Forum / WEF) bertajuk The Global Risk Report 2021, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa efek dari Pandemi Covid 19 pada jangka pendek menyebabkan masih belum stabilnya perekonomian Nasional maupun global dalam dua tahun kedepan dikhawatirkan lapangan pekerjaan masih sulit diperoleh dan dalam jangka menengah kemungkinan terjadinya penggelembungan aset dimana investasi tidak ditanamkan di sektor riil karena investor memilih investasi yang dianggap aman yaitu sektor keuangan (surat berharga), kemungkinan kegagalan menstabilkan harga, renggangnya hubungan antar negara akibat persaingan ekonomi yang dapat menciptakan konflik bilateral maupun multilateral serta terjadinya geopolitisasi sumber daya strategis dimana eksploitasi oleh negara dilakukan untuk keuntungan geopolitik. Dalam jangka panjang dikhawatirnya terjadinya perubahan iklim karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tindakan manusia dalam mengeksploitasi alam akan semakin mempersulit aktifitas usaha.

Mengantisipasi kondisi sebagaimana tersebut dalam Laporan WEF dimaksud, dalam menyusun rencana kerja tahunan Direksi melakukannya secara konservatif, terutama dalam pemilihan investasi pendayagunaan aset likuid Perseroan dengan mitigasi memilih institusi keuangan yang memiliki fundamental kinerja keuangan yang handal disamping itu tetap menjadi mitra bagi Pertamina untuk menjadi pendamping dalam berinvestasi di Pertamina grup.

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2020 Perseroan telah melakukan pembenahan yang diperlukan sehubungan dengan operasional perusahaan yang mengalami perubahan model bekerja dimana pengaturan kerja work from home dan work from office menjadi pilihan agar rencana kerja Perseroan tetap terpenuhi. Perubahan model kerja tersebut tentunya disertai dengan penyusunan prosedur agar dapat berjalan dengan baik. Area of Improvement dari penerapan GCG masih begitu terbuka untuk dilakukan agar dapat diperoleh pencapaian hasil assessment penerapan GCG yang optimal. Perseroan berkomitmen untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan sebagai landasan gerak langkah seluruh insan Perseroan guna mewujudkan Visi dan Misi Perseoran.

Perseroan akan secara terus menerus melakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap organ dan perangkat-perangkat GCG dan menerapkan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan implementasi GCG pada segenap organisasi.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan komposisi Direksi Perseroan, Direktur Perseroan saat ini dijabat oleh Ibu Khurinnihayah yang diangkat terhitung sejak tanggal 15 November 2020.

APRESIASI

Menutup laporan ini, atas nama Direksi, ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris atas dukungan dan arahan yang telah diberikan kepada kami.

Penghargaan yang tinggi dan rasa bangga yang mendalam tentunya juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan pekerja atas kerja keras dan dedikasi sepanjang tahun 2020. Karena tanpa tekad yang kuat, Perseroan tidak mungkin dapat menghadapi tantangan yang menghadang. Semoga ke depan, dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk meraih kesuksesan, Perseroan mampu meningkatkan pertumbuhan yang lebih baik.

Direktur,

Khurinnihayah

Laporan Manajemen

I Telaah Dewan Komisaris

Jakarta, 23 Maret 2021

Nomor : 006 /K0000/2021

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Telaahan atas Laporan Tahunan

PT Pertamina Pedeve Indonesia

Tahun Buku 2020

Kepada Yth.
DIREKTUR PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA
Gd. Wisma Tugu Raden Saleh, Lantai 4
JI. Raden Saleh No.44
Cikini, Menteng
Jakarta Pusat, 10330



(d/h PT Pertamina Dana Ventura)

Gedung Wisma TuguRaden Saleh, Lt4

Jl. Raden Saleh No. 44 Cikini - Menteng Jakarta Pusat 10330 T. 62 21 391 1857 F. 62 21 391 1859

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Dewan Komisaris telah melakukan telaah atas Laporan Tahunan PT Pertamina Pedeve Indonesia Tahun Buku 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 8 ayat 3 huruf a. Anggaran Dasar PT Pertamina Pedeve Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DEWAN KOMISARIS PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

Periode 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 CORNELIUS SIMANJUNTAK

COMISARIA

PERIAMINA

COMISARIA

PEDEVE INDONESIA

PT. PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

Laporan Manajemen

I Pernyataan Pertanggungjawaban Anggota Dewan Komisaris Dan Anggota Direksi



(d/h PT Pertamina Dana Ventura)

Gedung Wisma TuguRaden Saleh, Lt4 Jl. Raden Saleh No. 44 Cikini - Menteng Jakarta Pusat 10330

T. 62 21 391 1857 F. 62 21 391 1859

PERNYATAAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Terintegrasi PT Pertamina Pedeve Indonesia tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DEWAN KOMISARIS PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

	- 10
CORNELIUS SIMANJUNTAK	Harrymit
	CORNELIUS SIMANJUNTAK

DIREKSI PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

Direktur		1 -
Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020	KHURINNIHAYAH	Mms

PT. PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

I Identitas Perusahaan



Nama Perusahaan

PT. Pertamina Pedeve Indonesia



KEPEMILIKAN

- PT Pertamina (Persero) 99,93%
- PT Pertamina Patra Niaga 0,07%



TANGGAL PENDIRIAN

26 Januari 1993

DASAR HUKUM PENDIRIAN





- Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0003443.AH.01.02.
 TAHUN 2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Pertamina Pedeve Indonesia
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina Pedeve Indonesia Nomor 1 tanggal
 03 April 2020, dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta.
- Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120117152389 tertanggal 28 November 2018 dan Surat Izin Usaha Pedagangan tanggal 7 Desember 2018.



MODAL DASAR

Rp 350.000.000.000,- atau 350.000 lembar saham



MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH

Rp 175.000.000.000,- atau 175.000 lembar saham

- PT Pertamina (Persero) Rp 174.875.000.000,- atau 174.875 lembar saham
- PT Pertamina Patra Niaga Rp 125.000.000,- atau 125 lembar saham

KANTOR



Gedung Wisma Tugu Raden Saleh, Lantai 4 Jl. Raden Saleh Raya No.44 Cikini, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon: (021) 3911857 Fax: (021) 3911859

Website: http://www.pdv.co.id

Sekilas Pedeve

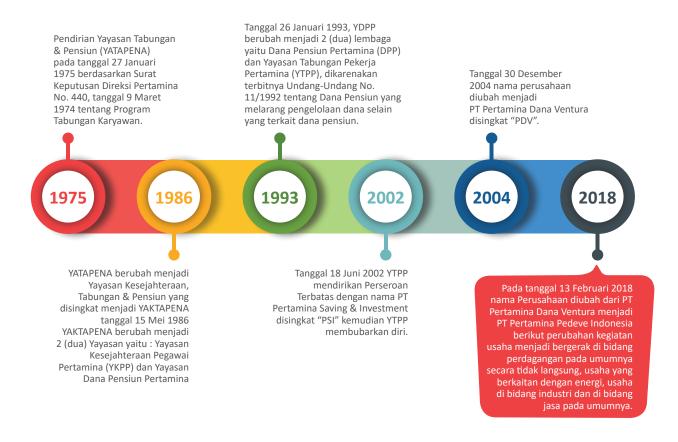
RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

PT Pertamina Pedeve Indonesia (d/h PT Pertamina Dana Ventura) merupakan salah satu Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak dibidang : perdagangan pada umumnya secara tidak langsung, usaha yang berkaitan dengan energi, usaha di bidang industri dan jasa pada umumnya.

Pada awalnya, aktivitas Perseroan ini menjadi satu dengan aktivitas Dana Pensiun Pertamina di bawah naungan YATAPENA (1975) yang kemudian berubah menjadi YAKTAPENA (1986) dan selanjutnya YDPP (1986). Namun pada tahun 1993 dibentuk Yayasan Tabungan Pegawai Pertamina (YTPP) yang bertugas melakukan pengelolaan program tabungan pegawai, terpisah

dari program pensiun pegawai yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina.

Sejak tanggal 18 Juni 2002, YTPP [mendirikan] Perseroan Terbatas yang diberi nama PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI). Pendirian PT PSI ini dilatarbelakangi kondisi dimana YTPP tidak dapat memenuhi persyaratan yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang berlaku efektif sejak tanggal 6 Agustus 2002.



Pada RUPS-LB tanggal 14 Oktober 2004 pemegang saham Perseroan menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan Perseroan sekaligus mengubah nama Perseroan menjadi PT. Pertamina Dana Ventura (PDV), yang dinotarilkan dengan akta No. 9 tanggal 30 Desember 2004 dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, Notaris di Jakarta, dan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan DEPKEHAM PT. PDV No. C-D 3142 HT. 01.04.TH.2005 tanggal 04 Februari 2005 dan atas perubahan maksud dan tujuan



Perseroan ini, Perseroan telah mendapatkan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 339/KMK.05/2005 tanggal 21 Juli 2005.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan secara sirkuler pada tanggal 28 Oktober 2016 tentang restrukturisasi Perseroan yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.06 tanggal 03 November 2016 dibuat di hadapan Dilla Daliana, SH., MKn., Notaris di Jakarta, dinyatakan di dalam salah satu butir keputusannya adalah mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan dari perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura menjadi perusahaan yang bergerak di bidang: (i) penyertaan modal di Anak Perusahaan (AP)/ afiliasi PT Pertamina (Persero) dan (ii) portofolio investasi. Pada tanggal 14 Maret 2018, Perusahaan menerima surat Keputusan dari Dewan Komisioner otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-20/D.05/2018 tentang pencabutan izin usaha Perusahaan modal ventura PT Pertamina Dana Ventura yang berlaku sejak tanggal 8 Februari 2018.

> Perusahaan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120117152389 tertanggal 28 November 2018 dan Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 7 Desember 2018.

Dengan pengubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut menjadi perusahaan yang bergerak di bidang penyertaan modal di Anak Perusahaan (AP)/ afiliasi PT Pertamina (Persero), nama Perseroan diubah menjadi PT Pertamina Pedeve Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 8 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Marianne V. Hamdani, SH., Notaris di Jakarta yang terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pertamina Pedeve Indonesia Nomor 1 tanggal 03 April 2020, dibuat dihadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar dimaksud lebih kepada penyesuaian dengan Klasifikasi Lapangan Usaha di Indonesia.

I Kegiatan Usaha

Untuk menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), maka Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 3 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Marianne V. Hamdani, SH., Pemegang Saham memutuskan menyetujui perubahan kegiatan usaha Perusahaan dan menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan menjadi sebagai berikut:

- 1. Maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar khusus lainnya (466) yang berkaitan dengan energi dan industri baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menjalankan usaha kerjasama dengan perseroan-perseroan lain.
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu), Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan bakar, grease (minyak semir), minyak pelumas dan minyak. Subgolongan ini mencakup Perdagangan besar arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta; Perdagangan besar minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin; Perdagangan besar LPG, gas butana dan propana; Perdagangan besar minyak semir dan pelumas, produk minyak bumi yang telah dimurnikan (4661);
 - b. Melaksanakan kegiatan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (Yang Berhubungan Dengan Itu), Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumasdan produk minyak bumi yang telah dimurnikan (46610).
 - c. Melaksanakan kegiatan Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa dan Potongan YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain), Subgolongan ini mencakup Perdagangan besar kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain; Perdagangan besar pupuk dan produk kimia pertanian; Perdagangan besar bahan plastik dalam bentuk dasar; Perdagangan besar karet; Perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain; Perdagangan besar kertas dalam jumlah besar (borongan); Perdagangan besar barang dari kertas dan karton; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain); Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Apalagi, pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai. Subgolongan ini juga mencakup: Pembongkarkan mobil, komputer, televisi dan peralatan lainnya untuk mendapatkan dan menjual kembali bagian yang masih dapat dipakai. Sub golongan ini tidak mencakup: Pengumpulan sampah rumah tangga dan sisa industri; Pengelolaan barang sisa, bukan untuk penggunaan lebih lanjut dalam proses industri pabrik, tapi dengan tujuan untuk pembuangan; Pengolahan barang sisa dan potongan serta barang lainnya menjadi barang baku sekunder, hasilnya siap untuk digunakan langsung dalam proses industri pabrik, tapi bukan sebagai barang akhir; Pembongkarkan mobil, komputer, televisi dan peralatan lainnya untuk daur ulang; Pembongkaran mobil melalui proses mekanik; Pembongkaran kapal; Perdagangan eceran dari barang-barang bekas (second hand) (4669).
 - d. Melaksanakan kegiatan Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain), Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar sebagaimana tercantum pada hutuf c. ayat (2) Pasal ini. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain) (46699).

Perseroan melakukan Penyertaan Saham Kepada Anak Perusahan/Afiliasi Pertamina Group, dimana penyertaan tersebut dilakukan sesuai penugasan dari PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham mayoritas Perusahaan. Pada 31 Desember 2020, Perseroan tercatat sebagai Pemegang Saham Pendamping pada 34 Anak Perusahan/Afiliasi Pertamina Group, dengan perincian sebagai berikut:



- 1. PT. Pertamina EP
- 2. PT. Pertamina EP Cepu
- 3. PT. PEPC Alas Dara & Kemuning
- 4. PT. Pertamina Hulu Energi
- 5. PT. Pertamina Hulu Energi Arun
- 6. PT. Pertamina Hulu Indonesia
- 7. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
- 8. PT. Pertamina Hulu Attaka
- 9. PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga
- 10. PT Pertamina Hulu Rokan
- 11. PT. Pertamina International Exploration & Production
- 12. PT. Pertamina Irak Eksplorasi Produksi
- 13. PT. Pertamina Algeria EP
- 14. PT. Pertamina Malaysia EP
- 15. PT. Pertamina East Natuna
- 16. PT. Kilang Pertamina Internasional
- 17. PT. Pertamina Geothermal Energi
- 18. PT. Pertamina Gas
- 19. PT. Pertamina Drilling Service Indonesia
- 20. PT. Pertamina Power Indonesia
- 21. PT. Pertamina Lubricants
- 22. PT. Pertamina Retail
- 23. PT. Patra Jasa
- 24. PT. Pertamina Internasional Shipping
- 25. PT. Pertamina Trans Kontinental
- 26. PT. Pelita Air Service
- 27. PT. Pertamina Bina Medika
- 28. PT. Pertamina Training & Consulting
- 29. PT. Trans Javagas Pipeline
- 30. PT. Patra Badak Arun Solusi
- 31. PT. Mitra Tours & Travel
- 32. PT Badak NGL
- 33. PT Kilang Pertamina Balikpapan
- 34. PT Pertamina Hulu West Ganal
- 35. PT Tuban Petrochemical Industries

Dalam rangka cash management dan terkait dengan dana yang belum dimanfaatkan untuk penyertaan saham pada Anak Perusahan/Afiliasi Pertamina Group, Perusahaan melakukan penempatan dan tersebut pada pasar uang berupa deposito berjangka maupun deposito on. Penempatan dana pada instrument deposito berjangka maupun deposito on call tersebut dilakukan sesuai dan berdasarkan Pedoman Investasi yang berlaku di Perusahaan.

I VISI, MISI, TATA NILAI DAN BUDAYA ORGANISASI



VISI

Menjadi perusahaan nasional terpercaya dengan portofolio investasi yang berdaya guna



MISI

Meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap para pemangku kepentingan serta:

- Memiliki kinerja unggul melalui pemilikan portofolio investasi yang optimal
- Melaksanakan kegiatan usaha secara transparan, prudent, dan berlandaskan GCG.



MOTTO

Pamungkas Mengemban Amanah

TATA NILAI

- 1 EXCELLENT
 - Menampilkan yang terbaik dari semua aspek pengelolaan usaha.
- 2 SMART

Selalu berpikir dan bertindak cerdas dalam melaksanakan setiap aktivitas;

- 3 PROFESSIONAL
 - Senantiasa memelihara kompetensi, kemampuan dan keahlian untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4 RESPONSIVE

Tanggap dan cepat dalam menyikapi perubahan lingkungan usaha

- 5 INTEGRITY CONCERN
 Senantiasa menjunjung tinggi integritas.
- 6 TRUSTWORTHY

Dapat dipercaya dan menumbuhkan kepercayaan kepada stakeholder.

BUDAYA ORGANISASI

- 1 CLEAN
 - Bebas KKN
- 2 HOSPITABLE
 - Ramah melayani pelanggan
- 3 AGILE Lincah

menghadapi perubahan

- **NETWORK**
- Oriented Jejaring bisnis
- 5 GOVERNANCE

Concern Mengutamakan tata kelola Perusahaan yang baik

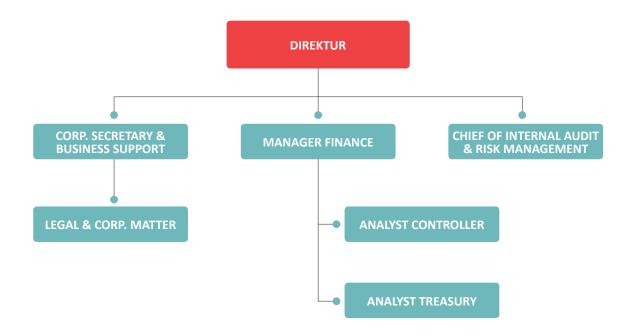
6 ESTEEMED

Percaya diri dan dapat dibanggakan

Struktur Organisasi Perusahaan

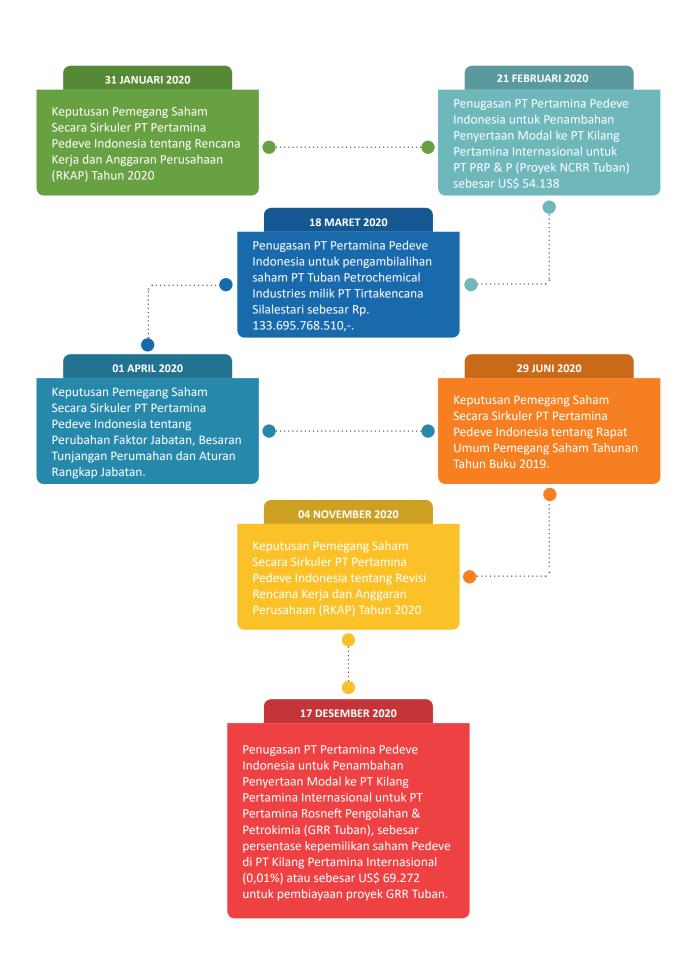
Melalui Surat Keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) No. 10/C00000/2018-S0 tanggal 23 Maret 2018 tentang Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina Pedeve Indonesia, Pemegang Saham telah menetapkan Struktur Organisasi Dasar PT Pertamina Pedeve Indonesia yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur yang membawahi Corporate Secretary & Business Support, Manajer Finance, Chief of Internal Audit & Risk Management serta Analyst Treasury & Controller.

Sesuai dengan kebutuhan Perseroan akan sumber daya manusia dan guna meningkatkan kinerja operasi Perseroan maka Struktur organisasi Perseroan pada tahun 2020 mengalami perubahan untuk 2 level dibawah Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur PT Pertamina Pedeve Indonesia No. Kpts-005/A0000/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi Perusahaan, yang mengesahkan Struktur Organisasi, Uraian Jabatan dan Kompetensi Jabatan.



Penyesuaian struktur organisasi tersebut diatas dilengkapi dengan Uraian & Kompetensi Jabatan dari masing-masing organisasi, dimana tugas untuk memastikan penyelenggaraan perusahaan sesuai dengan kaidah – kaidah GCG menjadi Kegiatan Utama dari Fungsi Jabatan Corporate Secretary & Business Supports dan Chief of Internal Audit & Risk Management.

I Peristiwa Penting



Profil Dewan Komisaris



Cornelius Simanjuntak Komisaris

Lahir	Rumbai, 13 Maret 1964	
Warga Negara	Indonesia	
Domisili	Kota Bekasi	
Jabatan	Komisaris Pedeve sejak 27 November 2018	
Riwayat Jabatan	Jabatan Komisaris yang saat ini dijabat adalah periode Pertama berdasarkan akta Pernyataan Keputusar Pemegang Saham PT Pertamina Pedeve Indoneisa Nomor 29 Tanggal 17 Desember Juli 2017	
Pendidikan	Memiliki gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung	
Pengalaman Kerja	 Manager Legal Aset Domestic PHE Head Office (2014); Manager Legal Corporate & Litigation PHE (01-03-2014 s/d 31-05-2016) Manager Legal Services Business Dev. PT Pertamina (Persero) (01-06-2016 s/d 31-10-2017); VP Legal Counsel Corp. Matters (01-11-2017 s/d 08-10-2018); VP Legal Counsel Upstream Functions (09-10-2018 s/d 31 Maret 2020). 	

■ Profil Anggota Komite Dibawah Dewan Komisaris



Kurnia Pinayungan Anggota Komite Audit

Lahir	Semarang, 13 Mei 1976 Indonesia		
Warga Negara			
Pendidikan	 S1 dari Fakultas Ekonomi Akuntansi dari Universitas Diponegoro tahun 2002 S2 Magister Manajemen (MM) konsentrasi Manajemen Keuangan dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 2015 Gelar Akuntan Negara dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2002 Gelar Certified Public Account (CPA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tahun 2016 		
Pengalaman Kerja	 PT. Pertamina (Persero) sejak tahun 2003 dengan jabatan Pengawas Utama Anggaran di Pertamina Unit Pemasaran VI Balikpapan Assistant Manager Financial Accounting Finance Pertamina Refinery Region VI Balongan (2011-2012) Assistant Manager General Ledger Account Pertamina Kantor Pusat Jakarta (2012-2016) Assistant Manager Consolidated Financial Statement Pertamina Kantor Pusat Jakarta (2016-2017) Finance & Business Support Director PT Indopelita Aircraft Services Jakarta (2017-sekarang) 8 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2020 diangkat sebagai anggota Komite Audit PT. Pertamina Pedeve Indonesia. 		



Seny Saraswati Anggota Komite Audit

Lahir	Jakarta, 04 Maret 1962	
Warga Negara	Indonesia	
Pendidikan	 Diploma Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 1983 Tahun 2003 meraih gelar S1 Akuntansi dari STIE Yayasan Swadaya Tahun 2015 Magister Manajemen (MM) dari Universitas Krisna Dwipayana Meraih gelar Master of Law pada tahun 2015 dari Universitas Krisna Dwipayana Jakarta 	
Pengalaman Kerja	 Junior Auditor sejak tahun 1994 PT. Pertamina (Persero) Assistant Manager Audit Relation PT Pertamina (Persero) (2011) 	
	 Assistant Manager Addit Relation PT Pertaining (Persero) (2011) Internal Audit Manager PT Pertamina Drilling Services (2013-2014) Internal Audit Manager PT Pertamina Bina Medika (2015) 	
	 Manager Support Function Internal Audit PT Pertamina (Persero) (2015-2018) Anggota Komite Audit PT. Pertamina Pedeve Indonesia Sejak 28 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2020 	

Profil Direksi



Khurinnihayah Direktur

Lahir	Ngawi, 06 Januari 1965		
Warga Negara	Indonesia		
Pendidikan	Lulus Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga - Surabaya tahun 199		
Pengalaman Kerja	 Manager Finance MOR VI (2011-2012) VP Finance PT Pertagas Niaga (2013-2017) Sejak 15 Nopember 2020 aktif menjabat sebagai Direktur PT Pertamina Pedeve Indonesia 		
Penghargaan	 Penulis Makalah Terbaik di MOR V Surabaya (2005) Penghargaan Perusahaan – PKM Terbaik di MOR V Surabaya (2005) 		

■ Pejabat Eksekutif Perusahaan



Ali Syamsul Rohman Corporate Secretary & Business Supports

Jakarta, 11 Oktober 1973	
Indonesia	
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung	
Bergabung di Pedeve sejak masih bernama PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) sebagai Tenaga Legal	
• 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 menjabat sebagai Manajer Legal & Compliance pada Fungsi Sekretaris Perseroan	
 01 September 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 menduduki jabatan sebagai Manajer Fungsi Legal, Compliance & Risk Management 	
 27 September 2018 sampai dengan saat ini menduduki jabatan sebagai Corporate Secretary & Business Supports PT Pedeve. 	
Terdapat beberapa sertifikasi dan keanggotaan Profesi yang diikuti oleh Corporate Secretary & Business Supports Perusahaan diantaranya adalah, sebagai berikut: Sertifikasi Kode Etik Advokat dari Forum Komunikasi Advokat Indonesia Sertifikasi Penasihat Hukum dari Panitia Ujian Calon Penasihat Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta Sertifikasi Profesi Auditor Hukum (Legal Auditor) dari BNSP - LSP Auditor Hukum Indonesia	





Anggraini Gitta Lestari Chief Internal Audit & Risk Management

Lahir	Bandung , 28 Oktober 1985
Warga Negara	Indonesia
Pendidikan	Lulus S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tahun 2008
Riwayat Jabatan	Bergabung dengan PT Pedeve sejak Maret 2010. Selama mengabdi di Perusahaan telah bekerja sebagai Staf sebagai Analis Kontrak pada Fungsi Sekretaris Perusahaan (15.03.2010 s/d 03.08.2014) Analis Kontrak & Litigasi (04.08.2014 s/d 20.05.2015) Analis Kontrak & Compliance (21.05.2015 - 31.08.2016) Ahli Legal pada Fungsi Legal Compliance & Risk Management (01.09.2016 s/d 31 Maret 2018).



Wasono Hastoatmodjo Manajer Finance

Lahir	Surabaya, 20 Mei 1969
Warga Negara	Indonesia
Pendidikan	Lulus S-1 dari Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya tahun 1996
Riwayat Jabatan	 Bergabung dengan sejak masih bernama PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) 1 Mei 2005. Selama mengabdi di Perusahaan telah bekerja sebagai Staf sebagai Penata Laporan Keuangan & manajemen pada Fungsi Kontroler (01.05.2005 s/d 30.04.2007; Pengawas Utama Akuntansi & Angaran (01.05.2007 s/d 31.05.2015); Manajer Kontroler (01.06.2015 s/d 31.03.2018) dan Manajer Finance (01.10.2018 s/d sekarang).

I Komposisi Pemegang Saham

Saham PT Pertamina Pedeve Indonesia dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga. Direktur dan Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki saham langsung dan saham tidak langsung PT Pertamina Pedeve Indonesia.

Modal dasar Perseroan sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar Rupiah) yang terbagi atas 350.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah saham senilai Rp. 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima milyar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham

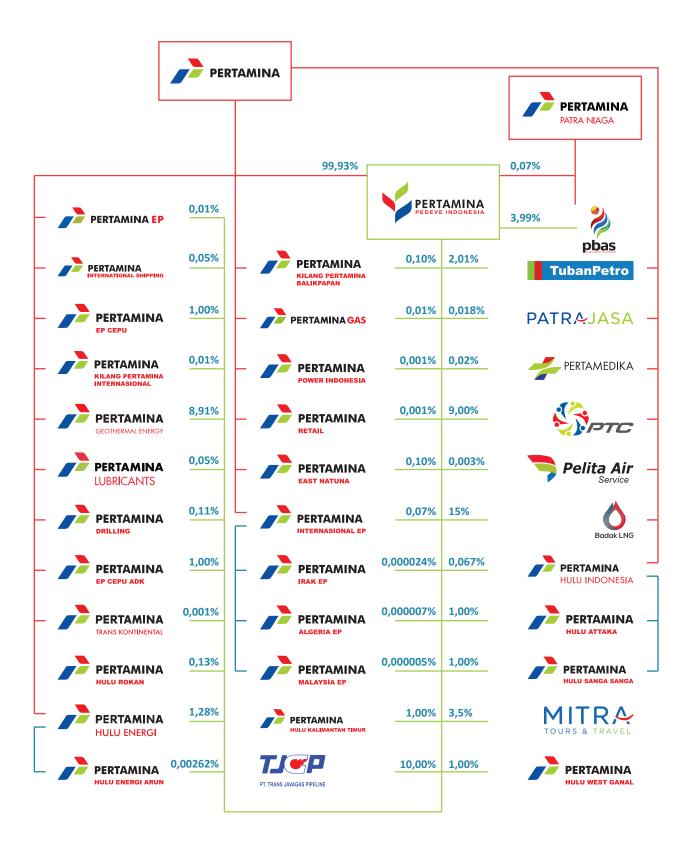
> Modal dasar Perseroan berjumlah Rp **350.000.000.000** (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) dan terbagi atas 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai **Rp 1.000.000** (satu juta rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yaitu:

> Seratus persen dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah **Rp. 175.000.000.000** (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat akta pendirian ditandatangani.

per 31 Desember 2020, struktur modal Perseroan berasal dari pemegang saham utama yakni PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga

PEMEGANG SAHAM	LEMBAR SAHAM	RUPIAH	%
MODAL DASAR	350.000	Rp.350.000.000.000	100%
MODAL DISETOR :	175.000	Rp.175.000.000.000	50%
PT Pertamina (Persero)	174.875	Rp.174.875.000.000	99,93%
PT Pertamina Patra Niaga	125	Rp.125.000.000	0,07%
JUMLAH	175.000	Rp.175.000.000.000	50%
SAHAM DALAM PORTEPEL	175.000	Rp.175.000.000.000	50%

■ Struktur Grup Perusahaan



Sumber Daya Manusia

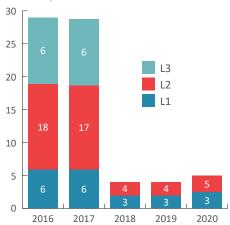
SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melakukan pengelolaan organisasi dan SDM yang dimiliki, Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di seluruh proses bisnis agar kinerja kinerja Perseroan dapat tercapai. Perseroan selalu berupaya untuk menyelaraskan antara kebutuhan SDM dengan rencana strategis Perseroan.

Profil SDM

Level Organisasi	2016	2017	2018	2019	2020
L1	6	6	3	3	3
L2	18	17	4	4	5
L3	6	6	0	0	0
L4	0	0	0	0	0
Total	30	29	7	7	8





Dari total jumlah Pekerja Perseroan sebanyak 8 orang Pekerja tersebut terbagi ke dalam 3 Fungsi, yaitu Fungsi Finance, Fungsi Corporate Secretary & Business Support (CS&BS) dan Fungsi Internal Audit & Risk Management (IA&RM).

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Fungsi Dalam 5 Tahun Terakhir

Fungsi	2016	2017	2018	2019	2020
Investasi	5	5	0	0	0
Kontroler	7	6	3	3	0
Treasury	4	4	0	0	0
Sekr. Perseroan	7	7	3	3	0
SPI	2	2	1	1	0
LC&RM	4	4	0	0	0
Diperbantukan	1	1	0	0	0
Non Fungsi	0	0	0	0	0
Corporate Secretary & Business Support	0	0	0	0	3
Finance	0	0	0	0	4
Internal Audit & Risk Management	0	0	0	0	1
Total	30	29	7	7	8



Grafik Jumlah Pekerja Berdasarkan Fungsi Dalam 5 Tahun Terakhir



Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Usia Dalam 5 Tahun Terakhir

Level Organisasi	2016	2017	2018	2019	2020
> 51 Tahun	6	6	1	1	1
> 46-50 Tahun	6	8	2	2	2
> 41-15 Tahun	4	3	1	1	1
> 36-40 Tahun	2	2	1	1	1
> 31-35 Tahun	7	9	2	2	3
> 21-30 Tahun	5	1	0	0	0
Total	30	29	7	7	8

Grafik Jumlah Pekerja Berdasarkan Usia Dalam 5 Tahun Terakhir



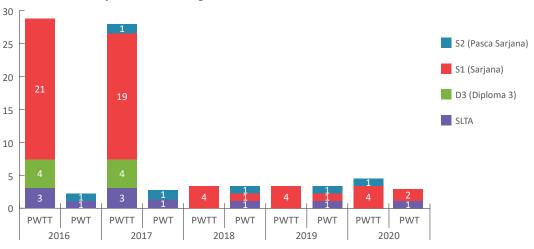


Sedangkan berdasarkan tngkat pendidikan, maka Pekerja Perseroan terdiri dari 1 orang lulusan S2 (14%), 6 orang lulusan S1 (72%), dan 1 orang lulusan SLTA (14%).

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dalam 5 Tahun Terakhir

Level Organisasi	2016	2017	2018	2019	2020
S2 (Pasca Sarjana)	1	2	1	1	1
S1 (Sarjana)	21	19	5	5	6
D3 (Diploma 3)	4	4	0	0	0
SLTA	4	4	1	1	1
Total	30	29	7	7	8

Grafik Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dalam 5 Tahun Terakhir



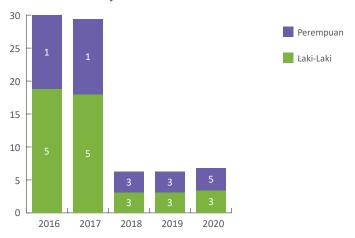
Komposisi jumlah Pekerja Perseroan saat ini terdiri dari Pekerja dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang (63%) dan Pekerja dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang (38%). Komposisi jumlah Pekerja berdasarkan jenis kelamin yang tidak terlalu jauh berbeda tersebut menunjukkan bahwa Perseroan memberikan kesetaraan dan kesempatan yang sama secara gender baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk dapat bekerja dan berkarya di Perseroan.

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin Dalam 5 Tahun Terakhir

Jenis Kelamin	20	016	2	017	2	018	2	019	2	020
Laki-Laki	18	60%	17	59%	4	57%	4	57%	5	63%
Perempuan	12	40%	12	41%	3	43%	3	43%	3	38%
Total	30	100%	19	100%	7	100%	7	100%	8	100%



Grafik Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin Dalam 5 Tahun Terakhir



Selain dari jumlah Pekerja tersebut, Perseroan juga didukung oleh 3 orang Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) yang disediakan oleh Perusahaan Jasa Penunjang (PJP) yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas operasional Perseroan, khususnya untuk penyediaan tenaga Pengemudi, *Cleaning Service* dan *General Service* yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Dalam rangka mendukung program kerja yang dikembangkan untuk peningkatan *internal confidence*, manajemen berkomitmen meningkatkan kapabilitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara terencana dengan dukungan sumber daya yang optimal termasuk biaya.

Secara teknis, pelaksanaan program pengembangan mengacu pada upaya pemenuhan kompetensi bagi para pekerja sesuai bidang kerja masing-masing dan berpedoman pada program pengelolaan SDM Perusahaan. Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah mengikutsertakan Pekerja kedalam beberapa kegiatan pelatihan sesuai bidangnya antara lain sebagai berikut:

- 1. Directorship Program
- 2. Brevet Pajak A & B
- 3. ERM & Audit Integration
- 4. Corporate Law for Executive

Guna mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, Perusahaan menyediakan anggaran yang nilainya mencapai sebesar Rp. 87.000.000,- dan sepanjang tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 58.000.000,-.

Perusahaan juga memberikan kesamaan hak kepada seluruh Pekerja tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, fisik dan sebagainya. Perusahaan juga memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan perlakuan yang fair bagi seluruh Pekerja sesuai dengan pencapaian kinerja dan kontribusinya bagi Perusahaan. Perusahaan juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh Pekerja untuk menunjukan potensi guna mengembangkan diri serta menunjukkan kinerja terbaik bagi Perusahaan.

Perusahaan memiliki standar pencapaian kinerja yang transparan, sehingga setiap individu dapat memahami apa yang harus dilakukan demi mencapai tujuan organisasi serta bisa mengukur penghargaan yang akan diterima oleh mereka jika kinerja tersebut terpenuhi. Dengan demikian, seluruh Pekerja dapat bekerja dalam lingkungan yang kondusif dan dapat memberikan kinerja terbaiknya demi mendukung tercapainya perusahaan berkinerja tinggi.



HUBUNGAN INDUSTRIAL

Perusahaan selalu berupaya untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dengan para Pekerjanya. Hubungan industrial di lingkungan Perusahaan dilandasi semangat untuk memberikan yang terbaik diantara Perusahaan dan Pekerja. Di satu sisi, Pekerja menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewajibannya, disamping terus berupaya mengembangkan kompetensi yang dimiliki serta berkontribusi untuk memajukan Perusahaan. Sedangkan di sisi lain, Perusahaan menciptakan hubungan kerja yang kondusif, menyediakan fasilitas dan lingkungan kerja yang nyaman serta memberikan hak-hak Pekerja secara terbuka, demokratis dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan dan amanat peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Perusahaan dan Pekerja melaksanakan perundingan Peraturan Perusahaan (PP) untuk menjamin terpenuhinya syarat kerja, hak, dan kewajiban Pekerja Perusahaan.

Pelaksanaan hubungan industrial yang baik di Perusahaan dinilai telah menghasilkan suasana kerja yang kondusif selama tahun 2020. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pemogokan kerja dan insiden yang disebabkan oleh diskriminasi selama periode pelaporan.

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN SERTA LAYANAN MEDIS

Perusahaan menjamin perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan alat-alat keselamatan kerja maupun mengikutkan pekerja dalam program perlindungan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan lain yang berlaku terkait keselamatan kerja.

Seluruh pekerja tetap Perusahaan juga mendapatkan pelayanan kesehatan (managed care) dan pemeriksaan kesehatan berkala (medical check-up/MCU) setiap tahun demi menjaga derajat kesehatan pekerja, namun mengingat adanya Pandemi Covid 19 pada tahun 2020, sesuai dengan Ketentuan Pelaksanaan Fit to Work Selama Masa Pandemi Covid 19 PT Pertamina (Persero) maka bagi Pekerja yang memiliki MCU yang telah berakhir validitasnya (expired) atau akan segera berakhir namun masih tetap bekerja di kantor pelaksanaan MCU berikutnya dapat ditunda sampai dengan 30 Juni 2021, atau sampai dengan kasus pandemic Covid 19 dianggap menurun dan mulai terkendali sesuai keputusan pemerintah.

Jaminan kesehatan managed care telah mencakup seluruh upaya pengelolaan kesehatan pekerja dan keluarga pekerja, yang meliputi peningkatan kesehatan (promotif), sosialisasi pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif) hingga perlindungan (protektif).

| Wilayah Operasi Perusahaan

KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN

PT Pertamina Pedeve Indonesia tidak memiliki Cabang atau Kantor Perwakilan dimanapun. Dengan demikian tidak ada informasi yang disampaikan terkait Cabang atau Kantor Perwakilan perusahaan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Pasar Modal dan Kegiatan Usaha PT Pertamina Pedeve Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang tidak mencatatkan saham maupun menerbitkan efek lainnya pada bursa efek. Dengan demikian Perusahaan tidak memiliki Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan dan nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. Namun demikian perusahaan memiliki kerjasama dengan lembaga profesi yang menunjang kegiatan usaha Perusahaan.

Notaris

Nama Kantor	Jasa Diberikan
Marianne Vincentia Hamdani, SH Jl. Boulevard Raya Blok K4 No.3, Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240	 a. Pembuatan akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk pengurusan dokumen Perubahan pada Kemenhum & HAM RI b. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham (PKR) termasuk pengurusan dokumen pada Kemenhum & HAM RI c. Pembuatan Akta Berita Acara RUPS Tahunan d. Akta Jual Beli Saham

Kantor Akuntan Publik

Nama Kantor			Jasa Diberikan
Tanudiredja, Wibisana & Rekan	•	Atestasi	
(Member of Price Waterhouse Coopers)	•	Advisor	
Plaza 89, Jl. HR Rasuna Said Kav X-7 No.6 Jakarta 12940			
T: +62 21 5212901, F: +62 21 52905555			
www.pwc.com/id			
Purwantono, Sungkono, dan Surja			
(Member of Ernst & Young)			
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor, Jl.			
Jend.			
Sudirman Kav. 52-53, DKI Jakarta 12190, Indonesia			
T: +62 21 52895000			
www.ey.com			

■ Lembaga Dan Profesi Penunjang

Notaris

No.	Nama Kantor	Jasa Diberikan
1	Drawy & Droit Law Office Menara Rajawali Level 7-1, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950	Legal OpinionPenanganan Perkara
2	Heru Suyanto & Associates Jl. Raya Cinere No. 44M, Kota Depok Telp 021 7549104	Legal OpinionPenanganan Perkara
3	Yulwansyah, Balfast & Partners Office 8 Level 18-A, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan 12190	Legal OpinionPenanganan Perkara
4	Vaudy Starworld & Partners ASERA Business District Blok 1S-20 No. 23, Kota Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat	Legal OpinionPenanganan Perkara Perpajakan

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

Jasa Diberikan
Assessment Penerapan Good Corporate
Governance (GCG) Tahun Buku 2017 & 2019

■ Nama Dan Alamat Entitas Afiliasi

NO.	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM	STATUS OPERASI
1	PT . Pertamina Geothermal Energy	Gedung Menara Cakrawala Lt. 15 Jl. MH Thamrin No. 9 Jakarta Pusat Telp: (021) - 39833222, Fax: (021) - 39833230	Panas bumi dari sisi hulu dan atau sisi hilir baik didalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang panas bumi tersebut	69.052 lembar saham (9,94%)	Beroperasi
2	PT. Pertamina Hulu Energi	PHE Tower JI. TB. Simatupang Kav . 99 Jakarta Selatan 12520 Telp: (021) - 29547000 Fax. (021) - 29547086	Minyak, Gas Bumi dan Energi baik didalam maupun diluar negeri,serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha dibidang Minyak, GasBumi dan energi lainnya.	2.560.000 lembar saham (1,28%)	Beroperasi
3	PT. Pertamina EP Cepu	Patra Jasa Tower, Lantai 6 - 8 Jl. Gatot Subroto, Kav . 32-34 Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) - 52900900 Fax. (021) - 52900597	Minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi di wilayah kerja Blok Cepu.	5 lembar saham (1%)	Beroperasi
4	PT Tuban Petro Industries	Mid Plaza Building II Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman No.10-11 Karet Tengsin Tanahabang Jakarta Pusat 10220	Petrochemical Industries serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi	7.500 lembar saham 2,01%	Beroperasi
5	PT. Pertamina Training & Consulting	JI. Abdul Muis No. 52- 56 A Gedung B, Petojo Selatan Jakarta Pusat 10160 Telp. 021-2514977, Fax. 021-21201557	Jasa konsultasi bidang manajemen SDM dan tenaga kerja, administrasi engineering dan kesisteman, pengelolaan manajemen perusahaan jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, bisnis serta kegiatan terkait.	2.700 lembar saham (9%)	Beroperasi
6	PT. Trans Javagas Pipeline	Menara Kebon Sirih., 24th Floor Suite 2401, Jl. Kebon Sirih 17-19 Jakarta 10340 Telp: 3927871 Fax. 3927864	Pengangkutan gas alam, Bidang pembangunan dan Bidang Jasa	9.220 lembar saham (10%)	Beroperasi
7	PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga	Gedung Kwarnas Lantai 4 Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta Pusat	Minyak, gas bumi dan energi untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi termasuk eksplorasi, eksploitasi, melakukan penyertaan saham dan participating interest di dalam negeri.	15 lembar saham (1%)	Beroperasi
8	PT Pertamina Hulu Rokan	-	Pertambangan Minyak dan gas bumi, dengan kegiatan usaha pencarian kandungan, penambangan dan pengeboran minyak bumi mentah, kondensat.	1.480 lembar saham (0,130033%)	Beroperasi



NO.	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM	STATUS OPERASI
9	PT. Pertamina Lubricants	Gedung Oil Center, Lantai 6 Jl. M.H Thamrin Kav . 55 Jakarta Pusat	Minyak dan gas bumi, dengan kegiatan usaha memproduksi, melaksanakan kegiatan perdagangan ekspor & impor, pengangkutan, penyimpanan, penyaluran, distribusi dan pemasaran, jasa produksi pengolahan pelumas, grease, specialties product dan baseoil serta bahan baku pelumas, grease, specialties product dan base oil.	1.706 lembar saham (0,05%)	Beroperasi
10	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur		Minyak dan Gas Bumi termasuk eksplorasi dan ekspolitasi serta melakukan penyertaan saham dan kepemilikan participating interest dalam Negeri	15 lembar saham (1%)	Beroperasi
11	PT. Pertamina Hulu Indonesia	Graha Elnusa JI.TB. Simatupang Kav . 1B Jakarta 12560	Hulu Minyak dan Gas Bumi	1 lembar saham (0,067%)	Beroperasi
12	PT. Pertamina EP Cepu ADK (Alas Dara & Kemuning)	Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat	Minyak dan Gas Bumi, serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja di lapangan Alas Dara dan Lapangan Kemuning.	25 lembar saham (1%)	Beroperasi
13	PT. Kilang Pertamina Internasional	Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) Gedung Utama Lantai 14 Jl. Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat	Minyak, gas bumi dan energi baru dan terbarukan di dalam negeri maupun diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan di bidang minyak, gas bumi serta energi baru dan terbarukan lainnya.	1.960 lembar saham (0,10%)	Beroperasi
14	PT. Pertamina Badak Arun Solusi (PBAS)	Graha PBAS JI. Prof . Dr . Soepomo, SH No. 55 Tebet Barat Jakarta Selatan 12810 Telp : (021) – 83798585, Fax : (021) - 83798591	Penyedia jasa EPC & M (Engineering, Procurement, Contruction dan Operation Maintenance), Pelatihan dan atau Pendidikan pada Industri minyak dan gas bumi termasuk namun tidak terbatas pada LNG, Coal Bed Methane (CBM), Industri Energi, industri Petro Kimia dan industri yg sejenis lainnya, termasuk fasilitas- fasilitas pendukungnya	1.860 lembar saham (3,99%)	Beroperasi
15	PT. Pertamina Drilling Service Indonesia	Graha PDSI Jl. Matraman Raya No. 87 Jakarta Timur 13140	Eksplorasi dan eksploitasi pengeboran minyak dan gas bumi serta panasbumi.	438 lembar saham (0,11%)	Beroperasi
16	PT. Pertamina Internasional Shipping	Patra Jasa Office Tower Lt. 20 Jl. Gatot Subroto, Kuningan Jakarta Selatan	Pelayaran Dalam Negeri, Kepemilikan Saham	685 lembar saham (0,05%)	Beroperasi

NO.	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM	STATUS OPERASI
17	PT. Pertamina EP	Standard Chartered Tower 21st - 29th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12950 - Indonesia Telp: (021) - 5797 4000	Minyak, Gas Bumi di wilayah kerja bekas wilayah kuasa pertambangan PERTAMINA, sebagaimana dimaksud dalam kontrak minyak dan gas bumi Pertamina.	25 lembar saham (0,01%)	Beroperasi
18	PT. Mitra Tours & Travel	Jl. Abdul Muis No. 68 Jakarta 10160 Telp.: (021) – 3852621/ 386 1001 Fax : (021) - 385 1588	Pariwisata dengan melakukan kegiatan usaha menyusun, menjual dan menyelenggarakan pelayanan wisata, paket wisata, pemanduan wisata dalam dan luar negeri, pengurusan dokumen perjalanan serta ticketing.	14.000 lembar saham (3,5%)	Beroperasi
19	PT. Pertamina Gas	Gedung Oil Centre Lantai 1-4 Jl. MH Thamrin Kav . 55 Jakarta 10350	Sektor Midstream dan Downstream industri gas Indonesia meliputi transportasi gas, niaga gas, pemrosesan gas, regasifikasi LNG dan transportasi minyak.	500 lembar saham (0,01%)	Beroperasi
20	PT Badak Natural Gas Liquefaction	Wisma Nusantara, Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 59 Jakarta 10350 Telp: (021) – 3193 0243, 3193 6317 Fax. (021) – 314 2974	Minyak, Gas Bumi dan Energi baik didalam maupun diluar negeri, serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha dibidang Minyak, Gas Bumi dan energi lainnya	6.000 lembar saham (15%)	Beroperasi
21	PT. Pelita Air Service	Jalan Abdul Muis No. 52-56 A Jakarta 10160	Penerbangan dan bidang- bidang lain yang berhubungan denganpenerbangan.	26 lembar saham (0,00314%)	Beroperasi
22	PT Kilang Pertamina Balikpapan	Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) Gedung Utama Lantai 14 Jl. Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat	Menjalankan Investasi Kilang Minyak di bidang energi baru dan terbarukan	11.800 lembar saham (0,10%)	Beroperasi
23	PT. Pertamina Bina Medika IHC	Jl. Kiai Maja No. 43, Jakarta Selatan Telp: (021) – 7200290/ 7219001, Fax: (021) - 7247006	Jasa layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat antara lain jasa mengusahakan, menjalankan,memelihara, mengelola atau menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik, rumah bersalin dan lainnya.	1.484 lembar saham (0,01%)	Beroperasi
24	PT. Pertamina Algeria Explorasi dan Produksi (PAEP)	Gedung Patra Jasa Lantai 3A Jl. Jend. Gatot Subroto Kav . 32-34 Jakarta Selatan	Minyak, gas bumi, dan energi untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT PAEP dapat melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi termasuk eksplorasi, eksploitasi, melakukan penyertaan saham dan participating interest di luar negeri, serta kegiatan lain yang terkait.	1 lembar saham (0,000007%)	Beroperasi



NO.	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM	STATUS OPERASI
25	PT. Pertamina Malaysia Exploration & Production (PMEP)	Gedung Patra Jasa Lantai 3A Jl. Jend. Gatot Subroto Kav . 32-34 Jakarta Selatan	Minyak, gas bumi, dan energi untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT PMEP dapat melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi termasuk eksplorasi, eksploitasi, melakukan penyertaan saham dan participating interest di luar negeri.	1 lembar saham (0,000005%)	Beroperasi
26	PT . Patra Jasa	Patra Jasa Office Tower 3A Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav . 32-34 Jakarta 12520	Industri perhotelan, pengembangan properti dan kawasan.	10 lembar saham (0,001%)	Beroperasi
27	PT. Pertamina Hulu Attaka	Gedung Kwarnas Lantai 14 Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta Pusat	Minyak, gas bumi dan energi untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi termasuk eksplorasi, eksploitasi, melakukan penyertaan saham dan participating interest di dalam negeri.	15 lembar saham (1%)	Beroperasi
28	PT. Pertamina Retail	Wisma Tugu Wahid Hasyim Jl. Wahid Hasyim No. 100-102 Jakarta Pusat 10340	Retail produk Pertamina.	2 lembar saham (0,0004%)	Beroperasi
29	PT. Pertamina Trans Kontinental	Gedung Pertamina Trans Kontinental Jl. Kramat Raya No.29 Jakarta 10450	Jasa pelayanan, jasa maritim dan jasa logistik baik di dalammaupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha dibidang jasa pelayanan, jasa maritim dan jasa logistik tersebut	10 lembar saham (0,001%)	Beroperasi
30	PT. Pertamina Hulu West Ganal	-	Minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha lain yang terkait dan/atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi	15 lembar saham (1%)	Beroperasi
31	PT. Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP)	Gedung Patra Jasa Lantai 3A Jl. Jend. Gatot Subroto Kav . 32-34 Jakarta Selatan	Minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha lain yang terkait dan/atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi.	1 lembar saham (0,000002%)	Beroperasi

NO.	NAMA	ALAMAT	BIDANG USAHA	KEPEMILIKAN SAHAM	STATUS OPERASI
32	PT. Pertamina Power Indonesia	Gedung Kwarnas Lantai 6 Jl. Medan Merdeka Timur No. 6 Jakarta Pusat	Ketenagalistrikan dan energi lainnya berdasarkan prinsip industry dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip Perusahaan Terbatas serta melaksanakan pengelolaan dan pengembangan fasilitas floating storage dan regasification terminal termasuk pembelian LNG dan pemasaran atas hasil pengelolaan fasilitas FSRT serta kegiatan bisnis lainnya yangbertujuan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham.	15 lembar saham (0,000969%)	Beroperasi
33	PT. Pertamina East Natuna	Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) Lantai 20 Jl. Merdeka Timur No. 1A Jakarta Pusat	Minyak dan gas bumi, untuk mencapai tujuan Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha hulu (minyak & gas bumi).	1 lembar saham (0,1%)	Beroperasi
34	PT. Pertamina Irak Eksplorasi Produksi (PIREP)	Gedung Patra Jasa Lantai 3A Jl. Jend. Gatot Subroto Kav . 32-34 Jakarta Selatan	Minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha lain yang terkait danatau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi.	1 lembar saham (0,000024%)	Beroperasi
35	PT. Pertamina Hulu Energi Arun	PHE Tower Jl. TB. Simatupang Kav . 99 Jakarta Selatan 12520 Telp: (021) - 29547000 Fax. (021) - 29547086	Minyak, Gas Bumi dan Energi baik didalam maupun diluar negeri,serta kegiatan usaha lain yang terkait dan atau menunjang kegiatan usaha dibidang Minyak, Gas Bumi dan energi lainnya.	500 lembar saham (0,003%)	Beroperasi

WEBSITE PERUSAHAAN

Informasi pada Website Perusahaan

PT Pertamina Pedeve Indonesia telah memiliki situs (website) yang dikelola Perusahaan, yaitu www.pdv.co.id , yang dapat diakses oleh Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai hal terkait Perusahaan.



I Tinjauan Umum

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat dimana sejak awal tahun 2020 pemerintah telah mengumumkan keadaan Pandemi Covid 19 yang menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan di banyak Negara, penurunan harga komoditas ekspor, demikian pula yang terjadi dengan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar minus 2,07%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yang mencapai 5,02%. Sebelum terjadi pandemi Covid 19, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi ditahun 2020 sebesar 2,3% yang kemudian pada kuartal II direvisi menjadi kisaran minus 0,4% hingga 1,0%. Dalam Berita Resmi Statistik yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi sebesar minus 2,07% dengan kontraksi terbesar berasal dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar minus 15,04%, diikuti lapangan usaha perdagangan : reparasi mobil & motor sebesar minus 3,72% dan kontraksi dari Lapangan usaha konstruksi sebesar minus 3,2%. Sektor yang masih memiliki tingkat pertumbuhan positif yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi serta lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Meskipun secara umum tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi namun terjadi peningkatan pendapatan Dividen Perusahaan antara lain didukung oleh ditetapkannya *dividen payout ratio* yang lebih besar kepada Anak Perusahaan dan pendapatan dividen di tahun 2020 sesungguhnya merupakan kinerja Anak Perusahaan yang terjadi di tahun buku 2019 sehingga belum terdampak oleh Pandemi Covid 19. Realisasi pendapatan dividen tahun 2020 sebesar Rp. 165.951.340.000,- atau lebih tinggi dari target RKAP sebesar Rp.106.990.000.000,- dan lebih tinggi dibanding penerimaan deviden tahun 2019 sebesar Rp.109.498.195.000,-. Penerimaan dividen tahun 2020 sebagai berikut:

NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH DIVIDEN (Rp. Ribu)
PT PERTAMINA EP CEPU	97.604.805
PT TRANS JAVAGAS PIPELINE	12.192.126
PT PERTAMINA HULU ENERGI	53.842.635
PT PERTAMINA LUBRICANTS	853.297
PT PERTAMINA EP	939.202
PT PERTAMINA TRAINING & CONSULTING	481.538
PT PERTAMINA DRILLING SERVICE INDONESIA	1.770
PT PERTAMINA GAS	35.922

■ Prospek Perekonomian

PEREKONOMIAN GLOBAL

Menurut prediksi International Monetery Fund (IMF) dalam world economic outlook report yang dirilis pada Januari 2021 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan berada dikisaran 5,5% di tahun 2021 dan sebesar 4,2% di tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut World Bank juga merilis Global Economic Prospects pada Januari 2021 bahwa pertumbuhan ekonomi Dunia akan berada di kisaran 4%. Optimisme yang disampaikan kedua institusi dimaksud didasarkan pada mulai menurunnya penyebaran virus corona dalam enam bulan terakhir dan mulai dilakukannya vaksinasi secara Global di awal tahun 2021

PEREKONOMIAN KAWASAN

Masih menurut World Bank, bahwa pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi dikawasan Asia Pasifik sebagaimana tercantum pada Global Economic Prospects diproyeksikan akan meningkat menjadi 7,4% hal tersebut dipengaruhi oleh rebound China yang diproyeksikan akan tumbuh menjadi 7,9% karena aktifitas produk dan ekspor yang meningkat. Namun demikian negara di kawasan ASEAN tidak akan mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan, sebagai contoh Indonesia diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 4,4%, Thailand sebesar 4% dan Filipina sebesar 5,9% dan Vietnam diproyeksikan akan mengalami ekspansi ekonomi tertinggi di kawasan dengan Pertumbuhan sebesar 6,7%. Dari perspektif analisa risiko, terkait dengan kecenderungan penanganan Pandemi Covid 19 mungkin saja terjadi suatu keadaan yang dapat menyebabkan kerusakan perekonomian dalam jangka panjang bahkan terjadinya resesi jika tidak ditanggulangi dengan perencanaan yang baik. Sisi baik dari kondisi penanganan Pandemi Covid 19 saat ini yaitu penyebaran vaksin yang efektif diharapkan akan memicu peningkatan perekonomian kawasan.

Masyarakat Ekonomi ASEAN sendiri merupakan suatu kawasan perdagangan bebas yang bisa dilakukan khususnya antar anggota ASEAN. Kesepakatan ini telah dilakukan bersama yang bertujuan agar kawasan dari negara-negara yang termasuk di ASEAN tersebut akan lebih makmur, stabil dan juga menciptakan perdagangan yang kompetitif. Banyak dampak yang telah di bawa dengan adanya sistem Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut, khususnya dalam segi perekonomian yang tak lain arus dari barang maupun jasa, hingga tenaga kerja dan juga investasi modal yang terjadi. Dengan adanya sistem ekonomi yang luas tersebut, maka masyarakat Indonesia tentunya juga memiliki tantangan tersendiri untuk menciptakan usahanya. Selain itu juga, beragam jenis peluang harus bisa dimasuki oleh masyarakat Indonesia sehingga bisa mengikuti tantangan sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN.

PEREKONOMIAN INDONESIA

Dalam laporan kebijakan moneter yang dirilis Bank Indonesia pada bulan Januari 2021 pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2021 akan membaik dibandingkan dengan tahun 2020 seiring dengan peningkatan aktifitas ekspor impor, penanganan Pandemi Covid 19 melalui vaksinasi yang terstruktur, selain dari pada itu untuk menunjang arah perbaikan perekonomian maka Bank Indonesia menyusun lima langkah kebijakan yang akan menopang prospek tersebut, yakni (i) pembukaan sektorsektor produktif dan aman secara nasional maupun di masingmasing daerah, (ii) akselerasi stimulus fiskal, (iii) penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, (iv) berlanjutnya stimulus moneter dan makroprudensial, serta (v) percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya terkait pengembangan UMKM.

Bank Indonesia memperkirakan inflasi tahun 2021 akan berada di kisaran 3% hingga 4%. Selanjutnya, Bank Indonesia akan menambah likuiditas yang diharapkan akan menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja. Sementara dari Perspektif Pemerintah perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 berkisar 4,5% hingga 5,3% pemulihan tersebut akan disumbang dari sisi penerimaan dan sisi produksi. Pertumbuhan ekonomi 2021 akan bergantung dari bagaimana pemerintah melakukan penanganan Covid 19 antara lain melalui pelaksanaan vaksinasi. Selain itu pemerintah juga akan melakukan reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi yang diharapkan akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendatangkan investasi.

Guna mempercepat penanganan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Pemerintah akan menambah alokasi dana sebesar Rp.688,33trilyun yang diperuntukan bagi lima sektor yaitu kesehatan, Dana Program Perlindungan Sosial, Program prioritas kementrian/Lembaga, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi dan terakhir insentif usaha.

Target yang telah disusun Pemerintah atas pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% dilakukan dengan menyusun strategi utama antara lain mempertahankan daya beli masyarakat menengah kebawah dengan melanjutkan program perlindungan sosial yaitu Program Keluarga Harapan dan Kartu Pekerja. Perintah juga memprioritaskan keberlanjutan dukungan kepada UMKM dan koperasi. Selain itu mendorong customer confidence dari kalangan menengah atas untuk berbelanja sehingga mempercepat roda perekonomian dan mendorong pertumbuhan investasi yang tahun lalu terkontraksi sebesar minus 4,1%.

Analisa Pembahasan Manajemen I Uraian Atas Kinerja Keuangan Perusahaan

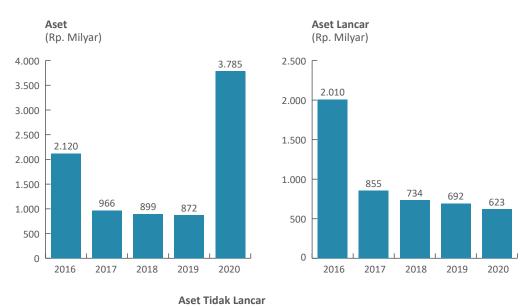
URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Usaha	Rp. Juta	312.163	198.110	115.940	160.741	197.669
Beban Usaha	Rp. Juta	(53.493)	(87.615)	-	-	-
Laba Kotor	Rp. Juta	258.670	110.496	115.940	160.741	197.669
Beban Operasional	Rp. Juta	(39.492)	(51.176)	(20.390)	(10.631)	(8.936)
Laba Usaha	Rp. Juta	219.178	59.320	95.550	150.110	188.733
Pendapatan (Beban) Lain-lain	Rp. Juta	(8.352)	989	(3.395)	(1.641)	4.623
Beban Penurunan Nilai Piutang	Rp. Juta	(62.033)	(4.918)	(3.344)	(5.435)	(665)
Alokasi Cadangan Liabilitas Jangka Panjang Kondisional	Rp. Juta	(92.693)	-	-	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	Rp. Juta	56.100	55.391	88.811	143.034	192.691
Beban Pajak Final	Rp. Juta	(1.096)	(7.546)	(9.010)	(10.287)	(6.471)
Beban Pajak Penghasilan	Rp. Juta	(2.100)	(4.833)	(1.710)	(11.504)	(74.620)
Laba Bersih	Rp. Juta	52.904	43.012	78.091	121.243	111.600
Jumlah Aktiva	Rp. Juta	2.120.457	966.343	899.248	871.801	3.784.993
Jumlah Kewajiban	Rp. Juta	1.355.826	160.037	57.840	26.293	605.945
Jumlah Ekuitas	Rp. Juta	764.631	806.306	841.408	845.508	3.179.048
Rasio Laba bersih terhadap Ekuitas (ROE)	%	7,43	5,60	10,23	15,38	14,58
Rasio Imbalan Investasi (ROI)	%	10,41	5,27	8,64	14,90	20,26
Rasio Kas	%	38,79	513,83	1.255	2.711,67	2.327,39
Rasio Lancar	%	149,13	605,50	1.343	2.720,36	2.330,05
Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset	%	36,07	83,69	93,56	96,98	96,85
Collection Periods Piutang	Hari	36	102	29	1,51	-



Jumlah Aset di akhir tahun 2020 sebesar Rp. 3.785 Milyar naik Rp. 2.914 Milyar atau naik 334% dari tahun 2019. Kenaikan terutama disebabkan adanya valuasi nilai penyertaan saham berdasarkan nilai wajar sebesar Rp 2.844 Milyar. Kenaikan nilai penyertaan saham ini dicatat pada akun *Other Comprehensive Income* (OCI) pada kelompok ekuitas. Hal ini mengingat kepemilikan saham Perseroan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Namun demikian pertumbuhan asset Perseroan juga berasal dari hasil operasional tahun berjalan.

Aset lancar di akhir tahun 2020 sebesar Rp 623 Milyar turun sebesar Rp 69 Milyar atau turun 10% dari tahun 2019. Penurunan terutama disebabkan adanya pembayaran dividen Tahun Buku 2019 ke PT Pertamina (Persero) sebesar Rp. 84,8 Milyar dan pembayaran untuk penyertaan saham sebesar Rp. 135,4 Milyar walaupun terdapat penerimaan kas dan setara kas dari kegiatan operasional Perusahaan.

Aset Tidak Lancar di akhir tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.982 Milyar atau 1.657% dari tahun 2019. Kenaikan aset tidak lancar berasal dari penambahan penyertaan saham Perseroan selama tahun 2020 di Anak Perusahaan Pertamina yaitu di PT Kilang Pertamina Balikpapan dan PT Tuban Petrochemical Industries sebesar Rp 133,6 Milyar dan kenaikan karena valuasi nilai wajar saham sehubungan dengan pemberlakukan PSAK 71 sebesar Rp 2.884 Milyar.

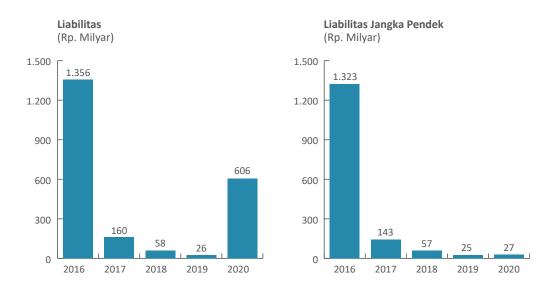


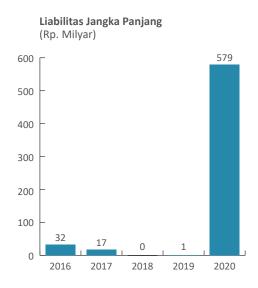




Liabilitas Jangka Pendek di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2 milyar dari tahun 2019. Kenaikan terutama karena pencatatan hutang pajak badan sebesar Rp 12 Milyar dan pencatatan hutang sewa sewa jangka pendek sebesar Rp 559 Juta. Sedangkan saldo pendapatan diterima dimuka dari PT Trans Javagas Pipeline mengalami penurunan sebesar Rp 11,5 Milyar sehubungan dengan pengakuan sebagai pendapatan dividen di tahun 2020.

Liabilitas Jangka Panjang sampai dengan tahun 2019 merupakan liabilitas imbalan kerja untuk pekerja tetap perseroan. Pada tahun 2020, selain mencatat kewajiban imbalan pekerja, Perseroan juga mencatat porsi jangka panjang hutang sewa sesuai implementasi PSAK 73 dan mencatat liabilitas pajak tangguhan sehubungan penyesuaian nilai wajar saham.

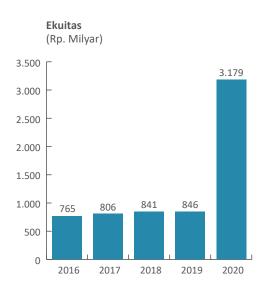






Ekuitas mengalami kenaikan net sebesar Rp. 2.333 Milyar dari tahun 2019 yang terutama disebabkan kenaikan nilai wajar penyertaan saham yang dicatat pada akun *Other Comprehensive Income (OCI)* pada kelompok ekuitas sebesar Rp 2.308 Milyar dan penambahan dari laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 111 Milyar serta berkurang dengan adanya pembayaran dividen sebesar Rp 84,8 Milyar.

Realisasi pendapatan usaha tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 37 milyar atau 23% dari tahun 2019 yang sebesar Rp. 161 milyar sehingga menjadi Rp. 198 milyar di tahun 2020. Hal ini terutama karena pendapatan dividen yang melampaui target.





BEBAN USAHA

Realisasi beban usaha tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1,7 milyar atau turun 16% dari sebesar Rp. 10,6 milyar di tahun 2019 menjadi Rp. 8,9 milyar di tahun 2020. Hal ini karena program efisiensi biaya operasional terutama biaya konsultan dan biaya kantor lainnya.

	20	19	2020		
Keterangan	Jutaan Rupiah	Kontribusi %	Jutaan Rupiah	Kontribusi %	
Biaya Kantor	3.403	32,01	2.058	23,03	
Biaya Karyawan	7.201	67,74	6.341	70,96	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	27	0,25	537	6,01	
Тс	tal 10.631	100	8.936	100	



PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

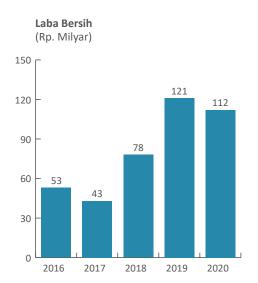
Realisasi pendapatan Lain-lain tahun 2020 sebesar Rp. 4.02 milyar terutama karena adanya laba selisih kurs sedangkan tahun 2019 mencatat beban lain-lain sebesar Rp. 7,08 milyar terutama karena adanya penyisihan kerugian piutang.

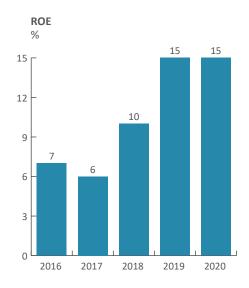
BEBAN PAJAK

Beban pajak final timbul atas pendapatan deposito. Realisasi beban pajak final tahun 2020 sebesar Rp. 6,4 milyar sedangkan beban pajak final tahun 2019 sebesar Rp. 10,3 milyar. Penurunan pajak final seiring dengan penurunan pendapatan deposito. Realisasi beban pajak Penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp. 74,6 milyar sedangkan beban pajak tahun 2019 sebesar Rp 11,5 milyar. Beban pajak badan tahun 2020 terdiri atas beban pajak tahun berjalan sebesar Rp Rp 35,6 Milyar dan koreksi beban pajak badan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp 38,9 Milyar.

Realisasi total laba bersih tahun 2020 sebesar Rp. 112 milyar atau turun sebesar Rp 9,6 milyar (8%) dari tahun 2019 sebesar Rp. 121,2 milyar yang disebabkan meningkatnya beban lain-lain dan beban pajak penghasilan badan walaupun pendapatan mengalami kenaikan biaya operasi mengalami sedikit penurunan.

Rasio ROE menggambarkan kemampuan ekuitas Perusahaan dalam menghasilkan laba, turun sebesar 5% dari 15,38% di tahun 2019 menjadi 14,58% di tahun 2020 seiring dengan turunnya laba bersih di tahun 2020.

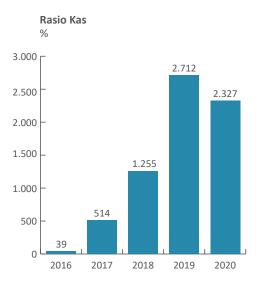


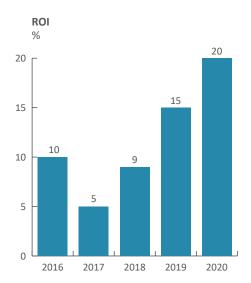




Rasio kas menggambarkan kemampuan aset sangat lancar (*quick assets*) Perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya, mengalami penurunan dari 2.712% di tahun 2019 menjadi sebesar 2.327% atau turun sebesar 14% di tahun 2020. Penurunan rasio kas di tahun 2020 terutama karena adanya pembelian saham sebesar Rp 135,4 Milyar.

Rasio ROI menggambarkan kemampuan aset yang dimiliki oleh Perusahaan dalam menghasilkan laba di tahun berjalan, mengalami kenaikan dari 14,9% di tahun 2019 menjadi 20,26% di tahun 2020.

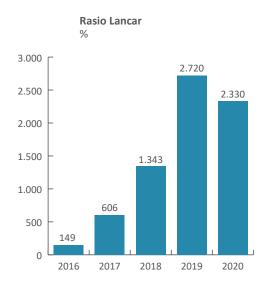




Rasio TMS/TA menggambarkan kemampuan Perusahaan dalam pertumbuhan aktiva dengan menggunakan modal sendiri turun dari 96,98% di tahun 2019 menjadi 96,85% di tahun 2020.

Rasio lancar menggambarkan kemampuan aset lancar Perusahaan dalam melunasi liabilitas jangka pendeknya, mengalami penurunan dari 2.720% di tahun 2019 menjadi 2.330% di tahun 2020. Penurunan rasio lancar disebabkan oleh penurunan deposito yang digunakan untuk pembelian saham sedangkan pada sisi kewajiban lancer meningkat berupa hutang pajak badan.





I Kemampuan Membayar Hutang

Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dapat dilihat melalui nilai rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Nilai rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yang diukur melalui rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan cara membandingkan kas yang dimiliki dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

RASIO LIKUIDITAS

Nilai Rasio Likuiditas pada tahun 2020 memperlihatkan penurunan dibandingkan dengan nilai pada tahun 2019. Nilai Rasio Kas pada tahun 2020 adalah 2.327% dan nilai Rasio Lancar sebesar 2.330%. Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan Perusahaan dalam membayar utang dalam kurun waktu periode pelaporan sangat baik.

Tabel Rasio Likuiditas (%)

Martin	2010		Perubahan		
Uraian	2019	2020	Nominal	%	
Rasio Kas	2.712	2.327	(385)	86	
Rasio Lancar	2.720	2.330	(390)	86	

RASIO SOLVABILITAS

Rasio Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya, dan diukur melalui:

- Rasio liabilitas terhadap ekuitas yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas.
- · Rasio liabilitas terhadap aset yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset.

Nilai Solvabilitas Perusahaan pada tahun 2020 menunjukkan adanya penurunan, dan dipengaruhi oleh penurunan liabilitas, di sisi lain ada peningkatan ekuitas. Secara umum kemampuan Perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh Rasio Solvabilitas rendah yang menunjukkan kondisi perusahaan semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil.

Tabel Rasio Solvabilitas (%)

			Perubahan		
Uraian	2019	2020	Nominal	%	
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	3,1	19	15,9	613	
Rasio Liabilitas Terhadap Aset	3,0	16	13,0	533	

Mulai tahun 2017 Perseroan tidak memiliki hutang pendanaan jangka panjang seiring dengan berakhirnya program saving plan di akhir tahun 2016 sehingga sudah tidak ada lagi beban bunga dari hutang jangka panjang.

■ Tingkat Kolektibilitas Piutang

Dalam mengukur Tingkat Kolektibilitas Piutang, Perusahaan menggunakan indicator Collection Period. Indikator ini digunakan untuk mengukur rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu. Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Pada tahun 2020, Collection Period mengalami penurunan yaitu selama 0 hari apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya selama 1,5 hari.



Struktural Modal

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 18 Juni 2002 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No.12 tanggal 18 Juni 2002 dibuat dihadapan Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta, komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- PT Pertamina (Persero) sebesar Rp.174.875.000.000 (99.93%) atau sebanyak 174.875 lembar saham.
- PT Pertamina Bina Medika sebesar Rp.125.000.000 (0.07%) atau sebanyak 125 lembar saham.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkluer yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.09 tanggal 23 Mei 2008 dibuat dihadapan Yulkhaizar Panuh, S.H., Notaris di Jakarta, komposisi pemegang saham Perseroan berubah di mana PT Pertamina Bina Medika telah menjual seluruh kepemilikan sahamnya (0.07%) atau sebanyak 125 lembar saham kepada PT Patra Niaga, sehingga komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

- PT Pertamina (Persero) sebesar Rp.174.875.000.000 (99.93%%) atau sebanyak 174.875 lembar saham.
- PT Patra Niaga sebesar Rp.125.000.000 (0.07%) atau sebanyak 125 lembar saham.

	2019		20	20	Perubahan		
Uraian	Nominal (A) (Rp. Ribu)	Kontribusi	Nominal (B) (Rp. Ribu)	Kontribusi	Nominal C=B-A	% D=B/A	
LIABILITAS							
Jangka Pendek	25.437.181	2,92 %	26.868.283	0,71 %	1.431.102	105,63 %	
Jangka Panjang	856.184	0,10 %	579.076.976	15,30 %	578.220.792	67.634,64 %	
Liabilitas	26.293.365	3,02 %	605.945.259	16,01 %	579.651.894	2.304,56 %	
EKUITAS							
Ekuitas	845.507.510	96,98 %	3.179.048.159	83,99 %	2.333.540.649	375,99 %	
LIABILITAS & EKUITAS	871.800.875	100,00 %	3.784.993.418	100,00 %	2.913.192.543	434,16 %	

Perbandingan Antara Target / Proyeksi Dengan Realisasi

Sepanjang tahun buku 2020 Perseroan tidak melakukan pembelian Barang Modal, mengingat kondisi pandemi Covid 19.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan Audited tanggal 09 Maret 2021, tidak terdapat peristiwa penting setelah tanggal Neraca yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Pemerintah memperkirakan sepanjang 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 2,07% secara year on year. Kontraksi ini dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi karena pandemi Covid 19. Pada awal tahun 2020 di berbagai penjuru dunia mengalami serangan virus yang dikenal dengan *Corona Virus Disease* atau Covid 19. Serangan virus telah berkembang menjadi pandemi yang menyerang seluruh penjuru dunia yang juga pada akhirnya melumpuhkan segala tatanan kehidupan masyarakat dunia. Hampir tidak ada bidang yang tidak terpengaruh dengan adanya pandemi ini, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, sosial dll. Terjadi perlambatan kegiatan yang signifikan pada bidang ekonomi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Kondisi penurunan perekonomian tersebut diatas membuat dunia usaha harus melakukan penyesuaian, merevisi target dan menyusun kembali perencanaannya agar tetap dapat bertahan dalam kondisi yang sulit ini. Dengan pertimbangan tersebut, PT Pertamina (Persero) melakukan revisi terhadap RKAP 2020 yang tentunya berimbas pada Perusahaan yang juga harus melakukan revisi terhadap RKAP tahun 2020.

Untuk mencapai target yang telah disusun, Perusahaan merencanakan serangkaian strategi yang dilakukan pada tahun 2020, antara lain :

- 1. Menambah penyertaan saham baru di Anak Perusahaan (AP)/ Afiliasi PT Pertamina (Persero) dalam rangka mengoptimalkan kontrol PT Pertamina (Persero) terhadap pemegang saham minoritas yang saat ini masih tersebar di AP lainnya yang secara langsung meningkatkan fokus dari masing-masing AP PT Pertamina (Persero) terhadap core business-nya.
- 2. Menyelenggarakan cash management yang optimal sehingga diperoleh jaminan atas pemenuhan kebutuhan dana yang tepat waktu dan tepat jumlah untuk kelancaran realisasi rencana-rencana investasi Perseroan dan operasional rutin Perseroan.
- 3. Terkait dengan kebutuhan pendanaan pada beberapa anak perusahaan/afiliasi Pertamina dan untuk optimalisasi dana Perseroan maka Perseroan merencanakan untuk memberikan *Shareholder loan* kepada anak perusahaan/afiliasi Pertamina. Namun demikian terkait persetujuan pemberian *shareholder loan* akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Pengujian kelayakan pemberian juga akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) mengingat Perseroan tidak memiliki fungsi yang melakukan kajian Investasi.

Perbandingan antara pencapaian dengan target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Pertamina Pedeve Indonesia tahun 2020 mencakup hal-hal sebagai berikut :

ASPEK FINANSIAL

Perbandingan realisasi dengan nilai target RKAP 2020 disajikan sebagai berikut :

URAIAN	2020		DENICA DALANI (0/)	
	TARGET (Rp.Juta)	REALISASI (Rp.Juta)	PENCAPAIAN (%)	
Laporan Laba (Rugi) Komprehensif				
Pendapatan	136.831	197.669	144	
Beban Pokok Pendapaatan	-	-	-	
Laba Kotor	136.831	197.669	144	
Beban Operasional	(9.242)	(8.936)	97	
Laba Usaha	127.589	188.733	148	
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(12.677)	4.623	-36	
Beban Penurunan Nilai Piutang	-	(665)	=	

URAIAN	202		
	TARGET (Rp.Juta)	REALISASI (Rp.Juta)	PENCAPAIAN (%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	114.912	192.691	168
Beban Pajak Final	-	(6.471)	-
Beban Pajak Penghasilan	(16.521)	(74.620)	452
Laba Setelah Pajak	98.391	111.600	113
Laporan Posisi Keuangan			
Aset Lancar	173.994	623.273	358
Penyertaan Saham	263.957	3.144.604	1.191
Aset Tetap	120	35	29
Aset Lain-Lain	400.144	17.081	4
lumlah Aset	838.215	3.784.993	
Liabilitas Jangka Pendek	14.389	26.868	187
Liabilitas Jangka Panjang	1.164	579.077	49.749
Ekuitas	822.662	3.179.048	386
lumlah Liabilitas dan Ekuitas	838.215	3.784.993	
Laporan Arus Kas			
Aktivitas Operasi			
Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi	113.523	157.155	138
Kas yang digunakan dari aktivitas operasi	(9.242)	(3.519)	38
lumlah Kas Bersih yang dihasilkan dari/(digunakan) untuk aktivitas operasi	104.281	153.636	147
Aktivitas Investasi			
Kas yang dihasilkan dari aktivitas Investasi	-	-	-
Kas yang digunakan dari aktivitas Investasi	(139.242)	(135.422)	97
lumlah Kas Bersih yang dihasilkan dari/(digunakan) untuk aktivitas nvestasi	(139.242)	(135.422)	97
Aktivitas Pendanaan			
lumlah Kas Bersih yang dihasilkan dari/(digunakan) untuk aktivitas pendanaan	(521.236)	(85.425)	16
Perubahan jumlah total arus kas	(556.198)	(67.212)	12
Saldo Awal Kas	689.773	689.773	100
Saldo Akhir Kas	133.576	622.560	466

INDIKATOR UTAMA KINERJA PERUSAHAAN

Indikator kinerja perusahaan yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari aspek keuangan, aspek pertumbuhan, aspek operasional, dan aspek administrasi dengan Perusahaan Kategori Sehat "AA" dengan skor 89,14.

Perbandingan antara Target Kinerja Perusahaan dalam RKAP tahun 2020 dengan realisasinya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

TINGKAT KINERJA KEUANGAN

Pada tahun 2020, Perusahaan menargetkan Tingkat Kinerja Keuangan dalam kategori "Sehat" dengan target Nilai Kinerja Keuangan (NKK) sebesar 65,00. Dengan strategi dan upaya yang telah dilakukan selama periode 2020, Nilai Kinerja Keuangan yang diperoleh adalah sebesar 65 dengan Tingkat Kinerja Keuangan "Sehat", memenuhi dari yang ditargetkan pada RKAP 2020.

Perbandingan target indikator Tingkat Kinerja Keuangan dengan realisasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

		2019	9		202	20	
NILAI KINERJA KEUANGAN	SATUAN	REALISASI		RKAP		REALISASI	
		Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot
ROE	%	15,38	20,0	13,58	20,00	14,58	20,00
ROI	%	14,90	15,0	13,76	15,00	20,26	15,00
Operating Profit Margin (OPM)	%	87,27	3,0	93,25	3,00	95,14	3,00
Net Profit Margin (NPM)	%	75,43	3,0	71,91	3,00	56,46	3,00
Rasio Kas (dengan Deposito)	%	2.711,67	5,0	928,29	5,00	2.327,39	5,00
Rasio Lancar	%	2.720,36	5,0	935,38	5,00	2.330,05	5,00
Perputaran Piutang	Hari	1,51	3,0	0,87	3,00	0,00	3,00
Perputaran Total Aset	%	18,43	3,0	15,51	3,00	21,98	3,0
Total Modal Sendiri Terhadap Aset	%	96,98	2,0	98,14	2,00	96,85	2,0
Jumlah NKK yang diproporsionalkan			65,00		65,00		65,00
Kondisi Kinerja Keuangan			Sehat		Sehat		Sehat

TINGKAT KINERJA PERTUMBUHAN

Pertumbuhan Perusahaan pada tahun 2020 berhasil mencapai Tingkat Kinerja Pertumbuhan dalam kategori "Kurang Tumbuh" dengan meraih Nilai Kinerja Pertumbuhan (NKP) sebesar 6,00 Angka ini lebih tinggi dari target Nilai Kinerja Pertumbuhan (NKP) RKAP 2020 sebesar 0,00.

Rincian Indikator Kinerja Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

		2019 REALISASI		2020			
NILAI KINERJA PERTUMBUHAN	SATUAN			RKAP		REALISASI	
		Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot
Asset Productivity Growth(ASPG)	%	83,84	2,00	(1,76)	-	35,22	2,0
Sales Growth (SALG)	%	38,64	2,00	(14,88)	-	22,97	2,0
Net Profit Margin Growth (NPMG)	%	3,28	1,50	(4,67)	-	(25,15)	-
Sales to Total Asset Growth (STAG)	%	43,01	2,00	(11,46)	-	19,04	2,0
Net Profit Growth(NPG)	%	42,95	2,00	(24,93)	-	(14,35)	-
Jumlah NKP yang diproporsionalkan			9,50		-		6,00
Kondisi Kinerja Keuangan		Tumbuh Sedang		Kurang Tumbuh		Kurang Tumbuh	

TINGKAT KINERJA OPERASIONAL

Pada tahun 2020, Perusahaan berhasil memperoleh Tingkat Kinerja Operasional dalam kategori "Sangat Baik" dengan pencapaian Nilai Kinerja Operasional (NKO) sebesar 8,14.

		201	19		20	20	
NILAI KINERJA OPERASIONAL	SATUAN	REALI	SASI	RKA	AP	REALI	SASI
		Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot
Service Level Agreement RUPS Sirkuler	Hari	2	1,88	2	1,88	2	1,88
Pengalihan saham di Pertamina Group	Hari	2	1,88	2	1,88	2	1,88
Ketepatan waktu dan akurasi data operasi keuangan	%	98	1,88	100	2,50	99	1,88
HSSE Excelence (Health & Safety Participation)	Jumlah	12	2,50	12	2,50	12	2,50
Jumlah NKA			8,14		8,76		8,14
		Sangat	Baik	Sangat	Baik	Sangat	: Baik

TINGKAT KINERJA ADMINISTRATIF

Pada tahun 2020, Perusahaan berhasil memperoleh Tingkat Kinerja Administratif dalam kategori "Tertib" dengan pencapaian Nilai Kinerja Administrasi (NKA) sebesar 10 Angka ini sesuai dengan target Nilai Kinerja Administrasi (NKA) sebesar 10.

		201	19	2020			
NILAI KINERJA ADMINISTRASI	SATUAN	REALI	SASI	RK#	\P	REALI	SASI
		Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot
Laporan Keuangan Bulanan	Hari	≤ 7 Hr	2,00	≤ 7 Hr	2,00	≤ 7 Hr	2,00
Laporan Manajemen Bulanan	Hari	≤ 15 Hr	2,00	≤ 15 Hr	2,00	≤ 15 Hr	2,00
Laporan Keuangan Audited	Bulan	Februari	3,00	Februari	3,00	Februari	3,00
Rancangan RKAP	Bulan	Juli	3,00	Juli	3,00	Juli	3,00
Jumlah NKA			10,00		10,00		10,00
		Tert	ib	Tert	ib	Tert	ib

Dengan perolehan nilai Tingkat Kinerja Perusahaan di atas, maka Rekapitulasi Aspek Kinerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2019	2020		
NILAI KINERJA	REALISASI	RKAP	REALISASI	
Nilai Kinerja Keuangan	65,00	65,00	65,00	
Nilai Kinerja Pertumbuhan	9,50	-	6,00	
Nilai Kinerja Operasional	8,14	8,76	8,14	
Nilai Kinerja Administrasi	10.00	10,00	10,00	
Total Nilai Kinerja	92,64	83,76	89,14	
	Sehat AA	Sehat AA	Sehat AA	

Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pihak-pihak yang tercatat melakukan transaksi dengan Perseroan dan merupakan pihak berelasi, yakni PT Pertamina (Persero) serta entitas anak dan cucunya. Perseroan memastikan transaksi yang terjadi bersifat wajar dan dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan. Transaksi yang berlangsung mengedepankan pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perusahaan tidak pernah mendapatkan sanksi terkait dugaan ketidakwajaran atas transaksi yang terjadi maupun dugaan adanya benturan kepentingan.

Transaksi dengan pihak berelasi meliputi pembebanan imbalan kerja karyawan perbantuan, dividen, deposito, dan transaksi penyerahan barang/jasa lainnya. Adapun transaksi dengan pihak berelasi antara lain:

PIHAK BERELASI	HUBUNGAN
PT Pertamina (Persero) PT Pertamina Patra Niaga	Pemegang saham
PT Pertamina Bina Medika PT Pertamina Training & Consulting PT Pertamina Hulu Energy PT Pertamina East Natuna PT Pertamina Lubricant PT Pertamina EP PT Pertamina EP PT Pertamina EP Cepu PT Pertamina EP Cepu PT Pertamina International Exploration & Production PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi PT Pertamina Algeria EP PT Pertamina Malaysia EP PT Pertamina Hulu Ataka PT Pertamina Hulu Sanga sanga PT Pertamina Retail PT Pertamina Internasional Sipping PT Pertamina Internasional Sipping PT Pertamina Power Indonesia PT Pertamina Power Indonesia PT Pertamina Hulu Indonesia PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur PT Pertamina Hulu Rokan PT Patra Badak Arun Solusi PT Ratrajasa PT Pelita Air Service PT Mitra Tours & Travel PT Tuban Petro Industries PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Perusahaan Asosiasi
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. PT Bank BNI Syariah PT Bank Mandiri Taspen Pos	Entitas Yang Berelasi dengan Pemerintah
PT Pratama Mitra Sejati	Mempunyai Induk sebagai Perusahaan Asosiasi

Hasil Audit menyatakan bahwa seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain:

- 1. Transaksi dengan perbankan terkait penempatan Deposito dan Kas Perseroan;
- 2. Piutang dengan PT Mitra Tours & Travel;
- 3. Utang dengan PT Mitra Tours & Travel, PT Patra Jasa, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Pertamina Bina Medika dan PT PTC;
- 4. Pendapatan Dividen Penyertaan saham;

Alasan dilakukan transaksi dengan pihak berelasi antara lain :

- Perseroan merupakan anak Perusahaan Pertamina (Persero) yang tugak pokoknya sebagai perusahaan pendamping Pertamina (Persero) untuk menjadi pemegang saham;
- Transaksi terjadi karena terkait operasional Perseroan.

TABEL REALISASI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI TAHUN 2019 DAN 2020:

Kas dan Setara Kas		(Rp.Ribu)
Entitas	2019	2020
PT Bank Rakyat Indonesia	7.315	1.497.535
PT Bank Mandiri	1.143.445	696.393
PT Bank BNI Syariah	4.768	250.369
PT Bank Negara Indonesia	5.234	22.193
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	-	51.270
PT Bank Tabungan Negara	3.096	56.498
PT Bank Syariah Mandiri	9.870	74.599
PT Bank Rakyat Indonesia Agro	1.239	-

Kas dan	Setara	Kas	(Dollar	AS)

(setara	ribu	Rupiah)
---------	------	--------	---

Entitas	2019	2020
PT Bank Mandiri	98.552	96.599
PT Bank Negara Indonesia	45.358	31.105

Kas dan Setara Kas (Deposito Rupiah)

(Rp. Ribu)

Entitas	2019	2020
PT Bank Syariah Mandiri	11.775.000	158.550.000
PT Bank Negara Indonesia Syariah	111.465.000	139.085.000
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	-	144.890.000
PT Bank Tabungan Negara	381.016.002	122.200.000
PT Bank Rakyat Indonesia	28.284.000	27.170.000
PT Bank Negara Indonesia	17.736.000	22.142.000
PT Bank Rakyat Indonesia Agro	65.205.000	-
PT Bank Mandiri	57.347.000	-

Kas dan Setara Kas (Deposito Dollar AS)

(setara ribu Rupiah)

Entitas	2019	2020
PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk	15.621.944	5.740.739

Piutang Lain-lain		(Rp.Ribu)
Entitas	2019	2020
PT Mitra Tours & Travel	8.701.355	8.701.355
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(8.148.161)	(8.701.355)
Utang Lain-lain		(Rp.Ribu)
Entitas	2019	2020
PT Patra Jasa	110.980	110.980
PT Tugu Pratama Indonesia	22.437	64.839
PT Pertamina Bina Medika	8.255	1.955
PT PTC	-	23.100
Pendapatan Dividen Penyertaan Saham		(Rp.Ribu)
Entitas	2019	2020
PT Trans Javagas Pipeline	19.792.503	12.192.126
PT Pertamina Hulu Energi	39.271.047	53.842.635
PT Pertamina EP Cepu	48.454.848	97.604.805
PT Pertamina EP	1.015.660	939.202
PT Pertamina Training & Consulting	369.043	-
PT Pertamina Drilling Services	97.928	-
PT Pertamina Lubricant	444.402	853.297
PT Pertamina Gas	52.631	35.922
PT Patrajasa	133	-
PT Pertamina Hulu Indonesia	-	481.583
PT Pertamina Trans Kontinental	-	1.770
Pendapatan Bunga		(Rp.Ribu)
Entitas	2019	2020
PT Bank Mandiri	6.284.461	684.420
PT Bank Negara Indonesia	6.260.175	1.225.473
PT Bank Rakyat Indonesia	3.788.213	1.483.496
PT Bank Tabungan Negara	27.539.042	11.221.253
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah		5.824.732
PT Bank Negara Indonesia Syariah		5.527.765
PT Bank Syariah Mandiri		5.003.580

PT Bank Rakyat Indonesia Agro

747.000

7.371.508

I Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan

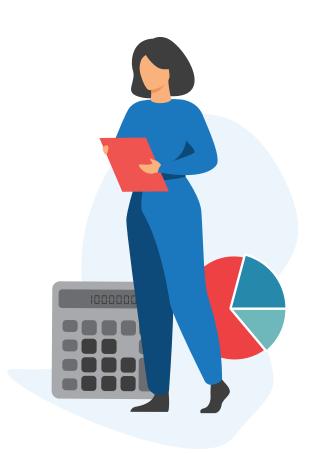
Sehubungan dengan penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana telah diputuskan oleh Pemegang Saham Perseroan, berikut disajikan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perseroan terkait dengan perizinan usaha: yaitu:

No	Peraturan Perundangan	Penjabaran
1	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	 Restrukturisasi Usaha dan Organisasi Perseroan dari perusahaan yang bergerak di bidang modal ventura menjadi Special Purpose Vehicle (SVP) PT Pertamina (Persero), yang fokus kepada penyertaan modal di lingkungan anak/afiliasi grup Pertamina, maka mengharuskan perusahaan melakukan perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran dasar Perusahaan, sehingga melalui Akta Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH, Nomor 5 tanggal 08 Februari 2018, Perusahaan merubah Anggaran Dasar PT. Pertamina Pedeve Indonesia. Untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai bidang usahanya sebagaimana diatur dalam KBLI 2017 dimaksud, membawa implikasi bagi perusahaan untuk menyesuaikan bidang usaha baru dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Anggaran Dasar perusahaan. Nama KBLI yang digunakan oleh perusahaan sesuai rahan Pemegang Saham adalah dibidang Perdagangan Besar Bahan Bakar, Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI dengan Nomor KBLI 2017 yakni 46610.
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018)	 Sejalan dengan perubahan kegiatan usaha, maka Izin Usaha Perusahaan diwajibkan disesuaikan dengan perizinan dasar sebagaimana diatur dalam PP 24/2018, yang dilakukan secara elektronik melalui www.oss.go.id Implikasi Perubahan kegiatan usaha Perusahaan dari Modal Ventura menjadi SVP mewajibkan perusahaan untuk menyesuaikan Izin Usaha dan Legalitas Perusahaan lainnya Sesuai PP 24/2018 dimaksud. Melalui permohonan izin usaha elektronik (www.oss.go.id), Pedeve mendapatkan pengesahan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang juga berlaku sebagai TDP dengan Nomor NIB 8120117152389 tanggal 28 November 2018 dengan Izin Usaha Perdagangan tertanggal 07 Desember 2018.

Perubahan Peraturan Akuntansi Yang Ditetapkan Perusahaan Pada Tahun Buku Terakhir

STANDAR DAN INTERPRETASI BARU/
REVISI YANG RELEVAN TERHADAP
KEGIATAN OPERASI PERUSAHAAN
DAN BERLAKU UNTUK TAHUN BUKU
YANG DIMULAI PADA ATAU SETELAH
TANGGAL 1 JANUARI 2020 ADALAH
SEBAGAI BERIKUT:

- PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK 73 "Sewa"
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-laba";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan":
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" dan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19; dan ISAK 36 "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".



I Teknologi Informasi





Penggunaan Teknologi Informasi (TI) yang semakin baik akan menciptakan organisasi yang kuat dan efisien. Sejalan dengan perkembangan teknologi, Perusahaan terus mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan kegiatan operasional Perusahaan. Pada tahun 2020, Perusahaan sedang melakukan modernisasi sistem TI untuk meningkatkan kecepatan, kehandalan, keamanan dan fleksibilitas melalui proses upgrade aplikasi yang sudah ada untuk mengakomodir perubahan proses bisnis dan prosedur yang berlaku di Perusahaan.

Perusahaan senantiasa memberikan kemudahan bagi stakeholders untuk mengakses informasi mengenai perusahaan, publikasi, produk dan aksi korporasi, serta terbuka menerima informasi dari stakeholders berupa keluhan, saran, kritik membangun melalui Care Center Perusahaan sebagai berikut :

www.pdv.co.id

pdv@pdv.co.id

(021) 3911857

(021) 3911859









Tata Kelola Perusahaan

Kebijakan Dan Pedoman Good Corporate Governance (GCG)

PRINSIP DASAR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Perusahaan merupakan komitmen, aturan main serta praktek penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika. Hal ini dapat terwujud sebagai pola pikir dan pola kerja di seluruh fungsi perusahaan agar dapat menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya perusahaan serta meningkatkan tanggung jawab manajemen pada Pemegang Saham dan stakeholder lainnya. Bagi Perusahaan, GCG merupakan proses meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai bagi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya dan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika bisnis.

Direksi berkomitmen memberikan perlakuan yang setara terhadap hak-hak pemangku kepentingan yang ditandai dengan menjalankan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara baik dengan mengacu kepada Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Pedoman ini telah disosialisasikan kepada organ Perusahaan dan *stakeholders* lainnya. Sebagai bentuk sosialisasi dan upaya transparansi, Pedoman ini telah diunggah ke website Perusahaan dan dapat diunduh melalui tautan: http://www.pdv.co.id/home/pedoman.

Selain berpedoman kepada Pedoman Tata Kelola Perusahaan, perusahaan juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang khusus mengatur mengenai penerapan GCG, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 *Juncto* Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaanya, Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini ditinjau dan diperbaharui secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta melakukan monitoring pembaharuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus mengatur mengenai penerapan GCG di Indonesia.

Sejalan dengan Direksi Perusahaan, Manajemen Perusahaan *pun* menyadari bahwa perlindungan kepentingan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dan terlaksananya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dapat menjadikan Perseroan tumbuh dan berkembang, sehingga Perseroan wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountablity*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*)

TUJUAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk :

- 1. Mengoptimalkan nilai Perseroan atau bagi pemangku kepentingan termasuk debitor, kreditor, pemberi dana;
- 2. Meningkatkan pengelolaan Perseroan secara profesional, efektif, dan efisien;
- 3. Meningkatkan kepatuhan Organ Perseroan dan jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
- 4. Mewujudkan Perseroan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan meningkatkan kontribusi Perseroan dalam perekonomian nasional.
- 5. Mengoptimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip transparansi (tranparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency) dan kewajaran (fairness) agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat.

Penerapan GCG di PT Pertamina Pedeve Indonesia mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang khusus mengatur mengenai penerapan GCG, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Juncto. Peraturan Menteri Negara BUMN nomor 09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara.



PEDOMAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku No. A-001/D0000/2019 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kpts-011/A0000/2019 tentang Pedoman Conflict of Interest (CoI) tertanggal 21 November 2019 merupakan perwujudan upaya Perusahaan dalam mengimplementasikan GCG dalam setiap aktivitas operasional Perusahaan. Seluruh Insan Perusahaan wajib mengetahui dan memahami Kode Etik Perusahaan sebagai dasar penerapan perilaku yang mengatur hubungan antara pekerja dengan Perusahaan, sesama pekerja, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Sebagai bentuk sosialisasi dan upaya transparansi, Pedoman ini telah diunggah ke website Perusahaan dan dapat diunduh melalui tautan: http://www.pdv .co.id/home /pedoman

PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)

Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) No. A-003/D0000/2019 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kpts-012/A0000/2019 tentang Pedoman Conflict of Interest (CoI) tertanggal 25 November 2019. Pedoman Col memberikan arahan dan acuan bagi selluruh insan Perusahaan berkenaan dengan potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi di lingkungan Perusahaan. Pedoman ini bertujuan agar potensi benturan kepentingan tersebut ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip GCG sehingga tetap menjunjung tinggi etika dan praktik bisnis yang sehat dan mencegah terjadinya kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.

Sebagai bentuk sosialisasi dan upaya transparansi, Pedoman ini telah diunggah ke website Perusahaan dan dapat diunduh melalui tautan: http://www.pdv .co.id/home/ pedoman

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

WBS diberlakukan di Perusahaan berdasarkan Tata Kerja Organisasi (Prosedur) yang dibentuk sebagai suatu sistem untuk penanganan pengaduan yang lebih tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab. Setiap laporan yang masuk melalui mekanisme WBS ditangani sesuai dengan Prosedur Whistleblowing System (WBS) No. B-003/D0000/2019 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kpts-011/A0000/2019 tentang Prosedur Whistleblowing System tertanggal 25 November 2019. Melalui WBS, Pelapor dapat menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan tersebut disampaikan melalui salah satu di antara cara berikut:

Email: pdv@pdv.co.id,

Web: http://www.pdv.co.id/home/wbs Telepon +6221 391 1857, Facs +6221 391 1859

Setiap laporan yang masuk akan diproses dengan mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tak bersalah dan profesionalisme. Jika laporan memenuhi indikasi awal, maka akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim yang bertugas melaksanakan investigasi. Hasil investigasi tim akan menentukan proses selanjutnya serta tindakan yang akan diberikan kepada terlapor . Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindaklanjuti, Pelapor setiap saat dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan melalui sarana yang telah Pelapor gunakan sebelumnya.

GCG COMPLIANCE ONLINE SYSTEM

Mengingat di tahun 2020 sedang dilakukan penyusunan sistem baru yang terintegrasi dengan sistem di Perusahaan, guna tetap memenuhi ketentuan yang berlaku maka pengisian pelaporan GCG Compliance yang terdiri dari pelaporan Penerimaan, Permintaan, dan Pemberian terkait Gratifikasi dilakukan secar manual dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan. Seluruh Insan Perusahaan wajib mengisi laporan sebagai berikut:

- a. Gratifikasi
- b. Pernyataan Potensi Konflik Kepentingan (CoI)
- c. Pernyataan Etika Usaha dan Tata Perilaku (CoC)
- d. Sosialisasi GCG

Selain laporan tersebut di atas, untuk pejabat manajer/setara dan Direksi diwajibkan mengisi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) setiap awal tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berjalan.

Tata Kelola Perusahaan

Asessment Penerapan Good Corporate Governance Perusahaan

TINDAKLANJUT AREA OF IMPROVEMENT (AOI) HASIL ASSESSMENT GCG TAHUN BUKU 2019

Pada periode tahun buku 2020, Pedeve melakukan kegiatan *Self Assessment* atas penerapan GCG dilingkungan perusahaan. Kegiatan *Self Assessment* penerapan GCG pada Tahun 2020 yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengukur tingkat atau capaian penerapan praktik-praktik terbaik dari masing-masing organ Perseroan sesuai dengan struktur dan proses terbaik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 ("Permeneg 1/2011") *jo.* Petunjuk Teknis Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 Tanggal 6 Juni 2012. Dasar hukum kegiatan penilaian penerapan GCG pada tahun buku 2020 secara *self-assessment* sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Permeneg 1/2011. Kegiatan *Self Assessment* penerapan GCG Tahun 2020 juga menindaklanjuti rekomendasi perbaikan terhadap area-area yang memerlukan perbaikan/ penyempurnaan atau *Area of Improvement* sebagaimana tertuang dalam Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai Hasil *Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* Pada PT Pertamina Pedeve Indonesia tahun buku 2019 tertanggal 14 April 2019.

Berdasarkan Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG pada PT Pertamina Pedeve Indonesia Tahun 2019 Nomor LGCG-286/D404/2/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah dilakukan oleh BPKP, terdapat 107 daftar usulan penerapan rekomendasi atau *Area of Improvement* yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing organ perusahaan dilingkungan PT Pertamina Pedeve Indonesia, dari 107 usulan atau *Area of Improvement* tersebut perusahaan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan terhadap area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan atau *Area of Improvement* sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab dari masingmasing Organ Perusahaan dimaksud.

Pelaksanaan asesmen penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) ini merupakan bagian dari proses implementasi GCG yang berkelanjutan di Pedeve, sehingga hasil penilaian ini mampu menunjukkan kemajuan pelaksanaan GCG selama ini.

Berdasarkan hasil *Self Assessment*, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada tahun 2020 Perseroan mencapai predikat "Cukup Baik", dengan skor 74,092. Berikut perbandingan hasil *Assessment* penerapan GCG oleh BPKP di Pedeve untuk Tahun Buku 2019 dibandingkan dengan hasil *Self Assessment* Tahun Buku 2020, dapat diikhtisarkan dalam tabel berikut:

	Aspek Pengujian	Bobot	Assessment 2019 BPKP Skor Capaian			Self Assessment 2020 Skor Capaian		
No.								
			Aktual	(%)	Keterangan	Aktual	(%)	Keterangan
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	5,90	84,24	Baik	5,99	85,60	Sangat Baik
II	Pemegang Saham Dan RUPS/ Pemilik Modal	9,00	6,88	76,41	Baik	7,03	78,16	Baik
III	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas	35,00	25,90	74,00	Cukup Baik	26,91	76,87	Baik
IV	Direksi	35,00	26,84	76,69	Baik	27,68	79,08	Baik
V	Pengungkapan Informasi Dan Transparansi	9,00	5,57	61,92	Cukup Baik	6,48	72,02	Cukup Baik
VI	Aspek Lainnya	5,00	0,00	0,00	-	0	0	-
	Total	100,00	71,09	71,09	Cukup Baik	74,09	74,09	Cukup Baik

Berdasarkan perbandingan hasil *Assessment* GCG tersebut diatas, peningkatan pada skor keseluruhan hasil *Assessment* Tahun 2019 yang sebesar 71,09 menjadi 74,09, dimana peningkatan ini dipengaruhi oleh aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi dari 61,92% menjadi 72,02%, *improvement* ini dipengaruhi oleh pemanfaatan *website* perusahaan dan meng-*upgrade* aplikasi sistem informasi utama perusahaan yang terdiri dari modul Kontroler, Treasury, SDM dan Umum untuk disesuaikan dengan kegiatan Perusahaan termasuk pengkinian *hardware* Perusahaan. Selain itu, terjadi juga peningkatan pada skor Organ perusahaan yakni Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal dari 76,41% menjadi 78,16%, Dewan Komisaris dari 74,00% menjadi 76,87% dan Direksi dari 76,69% menjadi 79,08%. Peningkatan pada masing-masing Organ perusahaan terjadi disebabkan adanya tindaklanjut dan *improvement* Aol GCG Tahun 2019 oleh perusahaan dari seluruh Faktor Uji yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Skor Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan pada tahun 2019 sebesar 84,24%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup baik menjadi sebesar 85,60%, kenaikan di sebabkan karena perusahaan melakukan pembaharuan *soft* struktur GCG, yakni Pembaharuan Pedoman GCG, Board Manual, Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pedoman Sumber Daya Manusia perusahaan serta tingkat Kepatuhan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berkoordinasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi Compliance PT Pertamina (Persero).

Kedepannya Pedeve berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang mendorong peningkatan capaian implementasi GCG di lingkungan perusahaan melalui kegiatan – kegiatan korporat maupun program terencana lainnya melalui:

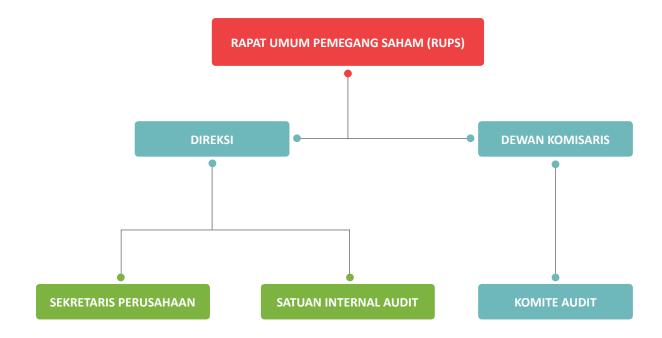
- Pemeliharaan secara terus menerus terhadap kekinian dan penerapan secara konsisten prinsip-prinsip GCG, Pedoman Investasi, Pedoman Manajemen Risiko dan ketentuan internal lainnya yang berlaku di Perseroan, termasuk penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi bagi seluruh pekerja dilingkungan perusahaan.
- Optimalisasi peran Komite audit selaku organ pendukung Dewan Komisaris melalui rapat-rapat gabungan yang diselenggarakan Perusahaan.
- Peningkatan kemampuan SDM dan kualitas manajemen pengelolaan SDM.
- Pemeliharaan organisasi yang dinamis dan senantiasa sesuai dengan kondisi terkini Perusahaan.
- Pemeliharaan kehandalan serta perluasan dan peningkatan layanan Teknologi Informasi.

Melengkapi informasi dan muatan materi yang disajikan dalam website Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelota Perusahaan yang balk pada BUMN termasuk keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana Perusahaan yang dapat berpengaruh secara signifikan kepada Pekerja perusahaan.

■ Struktur Tata Kelola Perusahaan

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pedeve telah memiliki struktur *Governance* yang terdiri terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perusahaan. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun Organ Pendukung Perusahaan antara lain adalah Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit.

Dewan Komisaris dan Komite Audit akan dimintakan pertimbangan dalam membuat keputusan terkait dengan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial oleh Direksi dalam rapat gabungan antara BOC dan BOD.



Rapat Umum Pemegang Saham

Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan adalah PT Pertamina (Persero) yang memiliki 99,97% saham Perseroan. PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang menjadi wadah Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan saham yang dimiliki dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, dengan batasan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Wewenang tersebut antara lain membuat keputusan atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perusahaan;
- 2. Penggunaaan laba bersih Perusahaan;
- 3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan
- 4. Penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan;
- 5. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan;
- 6. Rencana Perusahaan melakukan transaksi yang melebihi nilai tertentu dan Memutuskan hal lain yang telah diajukan sebagaimana dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan UndangUndang Perusahaan Terbatas.

Dengan wewenang tersebut, menunjukkan bahwa RUPS merupakan forum tertinggi dalam tata kelola Perusahaan, meskipun secara teknis yang menjalankan fungsi koordinator pelaksana adalah Corporate Secretary & Business Support sebagai Chief Compliance Officer. Penyampaian permasalahan penting kepada badan tata kelola tertinggi diatur dalam Board Manual. Penyampaian permasalahan penting dilakukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan melalui penyampaian laporan bulanan rutin.

Komunikasi antar Direksi maupun Komisaris dengan Pemegang Saham khususnya terkait penyampaian kendala dan evaluasi dapat disampaikan pada Forum Performance Dialog yang dilaksanakan setiap Triwulan untuk mengevaluasi kinerja Direksi.

KEPUTUSAN RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Pada tahun 2020 sehubungan dengan Pandemi COVID-19, Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan tanpa tatap muka, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 22 Juli 2020 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH.

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 beserta penjelasannya yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanuredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana termuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00233/2.1025/ AU.1/10/1130-3/1/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material". Dengan demikian Para Pemegang Saham memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggungjawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sepanjang:



- a. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 tersebut; dan
- b. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.
- 2. Menetapkan penggunaan laba Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 20198 sebesar Rp.121.242.930.691,- (seratus dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar 70% dari laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas Induk atau sebesar Rp.84.870.051.535,dibagikan sebagai dividen kepada Pemegang Saham dan dibayarkan secara tunai.
 - b. Sisanya sebesar 30% laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas Induk ata sebesar Rp. 36.372.879.156,-sebagai cadangan.
 - c. Besarnya dividen yang menjadi hak Pemegang Saham wajib disetorkan kepada Pemegang Saham selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkan oleh RUPS.
- 3. Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 berikut besaran nilai jasanya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa KAP yang ditunjuk Perseroan dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PT. Pertamina (Persero).
- 4. Penghargaan Atas Kinerja (Tantiem) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.

Dewan Komisaris

URAIAN DEWAN KOMISARIS

Sebagai penjabaran dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, semua Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia diwajibkan mempunyai Dewan Komisaris yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris tidak memiliki Saham di Perseroan maupun Perseroan lainnya. Begitu juga tidak ada perikatan dengan pihak ketiga.

URAIAN TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN **TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab kepada Perseroan dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan Perseroan selain honorarium dan fasilitas yang ditentukan oleh RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berwenang untuk:

- a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumendokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan
- d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat
- Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
- g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- h. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
- i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap
- j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
- k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
- Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk:

- 1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi;
- 2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah



- yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- 3. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
- 4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan:
- 5. Membentuk komite audit;
- 6. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS; dan
- 7. Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di induk perusahaan Perseroan dan dinyatakan berlaku bagi Perseroan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan tersebut apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah satu orang yaitu Bapak Cornelius Simanjuntak.

Tabel Susunan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020

No.	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Akhir Masa Jabatan
1.	Cornelius Simanjuntak	Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 29 Tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH.	27 November 2018	27 November 2021

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris salah satunya yang paling utama berpedoman pada Board Manual PT Pertamina Pedeve Indonesia.

BOARD MANUAL

Board Manual merupakan petunjuk tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga menjadi acuan hubungan kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam upaya pencapaian visi dan misi Perusahaan yang optimal.

Board Manual adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi antara Direksi, Dewan Komisaris dan antara kedua organ Perusahaan tersebut. Board Manual disusun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, Anggaran Dasar, prinsip-prinsip hukum korporasi, arahan Pemegang Saham serta best practices Good Corporate Governance (GCG). Meskipun demikian, berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik



diuraikan dalam Board Manual tersebut.

Board Manual yang berisi pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan GCG di Perusahaan. Board Manual Perusahaan yang berlaku saat ini adalah Board manual yang ditetapkan pemberlakuannya melalui Surat Keputusan No. Kpts-008/A0000/2020 tanggasl 12 November 2020 dan telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Naskah Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 12 November 2020.

Board Manual yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Direksi dan Komisaris yang penetapannya bertujuan

- 1. Menjadi rujukan atau pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ;
- 2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ;
- 3. Menerapkan asas-asas GCG yakni, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (kewajaran).

Dengan diberlakukannya Board Manual ini dalam hubungan kerja antar 2 (dua) organ Perusahaan, diharapkan kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan asas-asas Good Corporate Governance dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi perusahaan yang telah ditetapkan.

Aspek-aspek yang diatur dalam Board Manual meliputi :

- a. Fungsi Dewan Komisaris
- b. Persyaratan, Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
- c. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
- d. Etika Jabatan Dewan Komisaris
- e. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
- f. Wewenang Dewan Komisaris
- g. Hak Dewan Komisaris
- h. Rapat Dewan Komisaris
- i. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
- j. Organ Pendukung Dewan Komisaris
- k. Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris Dengan Direksi

KRITERIA PENENTUAN DEWAN KOMISARIS DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Saat ini Perusahaan tidak memiliki Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan juga tidak pernah dinyatakan pailit dan atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan juga tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari Pemegang Saham ataupun pihak lain. Dewan Komisaris dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu menjauhkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan.

Sesuai ketentuan Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) No. A-001/ H00200/2011-SO Revisi 1 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No Kpts-16/C00000/2013-S0 tanggal 25 Februari 2013, persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan terdiri dari: Syarat Formal, Syarat Materiil, dan Syarat Lainnya.

a. Syarat Formal

Calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:



- 1. Dinyatakan pailit;
- 2. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan (BUMN ataupun swasta) dinyatakan pailit;
- 3. Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, atau perusahaan swasta lainnya dan/atau tindakan pidana yang berkaitan dengan sector keuangan.

b. Syarat Materiil

Calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- 1. Integritas dan moral, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
 - a. Perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
 - b. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
 - d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsipprinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik);
- 2. Dedikasi;
- 3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- 4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
- 5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- 6. Memiliki kemauan yang kuat (antusiasme) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.

c. Syarat Lainnya

Calon anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah orang perseorangan yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1. Bukan pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- 2. Bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
- 3. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
- 4. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris;
- 5. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- 6. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit resmi dan diakui.

Selain itu, salah satu persyaratan Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Board Manual Perusahaan adalah memiliki kriteria independensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini berlaku khusus untuk Komisaris Independen yaitu :

- 1. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaanterafiliasi.
- 2. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- 3. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.
- 4. Bebas dari benturan kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.



PENILAIAN TERHADAP KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara self assessment dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Profesionalisme dan Pengetahuan.
- b. Independensi dan Obyektivitas.
- c. Kemampuan Dalam Berkomunikasi.
- d. Kemampuan Menganalisa dan Memutuskan.
- e. Orientasi Pada Bisnis.
- f. Komitmen Terhadap Pengawasan.
- g. Komitmen Terhadap Rencana Kerja yang Telah Disepakati.
- h. KomitmenPengawasan Terhadap Prinsip GCG.
- i. Kontribusi Pemikiran dan Gagasan Dalam Setiap Rapat.
- j. Pemahaman Terhadap Berbagai Dinamika dan Kondisi Mutakhir Perusahaan

LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundangundangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan Perusahaan ini diatur dalam Board Manual dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Proses pengawasan ini dapat dilakukan melalui rapat-rapat bersama antara Dewan Komisaris dengan Direksi, serta pada evaluasi laporan-laporan yang terkait.

Pada tahun 2020, Perusahaan telah memiliki rencana kerja Dewan Komisaris yang membahas kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan serta telaah atas kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga.

Dalam menjalankan aktivitasnya dalam pengambilan keputusan, Perusahaan telah memiliki peraturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris. Ada beberapa mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara formal yang diatur dalam Board Manual dan Tata Tertib Rapat Dewan Komisaris, yaitu:

- 1. Pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris
- 2. Pengambilan keputusan di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain)

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris dan dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris telah diagendakan sebelum tahun berjalan seperti tercantum dalam Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2020. Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, diatur bahwa mengingat Perseroan hanya meiliki seorang Komisaris, maka semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris.

Rekapitulasi Rapat Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2020

Nama Komisaris	Rapat Gabungar	0/		
Nama Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	
Cornelius Simanjuntak	12	12	100%	



Dalam melaksanakan rapat, Perusahaan akan mengirimkan undangan rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang. Bahan-bahan rapat seyogyanya disediakan dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diadakan rapat.

Berdasarkan aturan dalam Board Manual, waktu pengambilan keputusan paling lambat 3 minggu setelah rapat Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris sudah dilakukan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan sejak usulan tindakan disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Dewan Komisaris - Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler, dimana tingkat kesegeraan berkisar 3 hari.

Untuk memenuhi tata administrasi yang baik, dalam setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/ dissenting opinion anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Risalah rapat tersebut selanjutnya akan dibagikan dalam bentuk salinan kepada setiap Anggota Dewan, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.

Berikut agenda rapat dan pokok bahasan yang dalam Rapat Gabungan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit selama tahun 2020

No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat	Peserta Rapat	Agenda Rapat
Rapat Gab	ungan Direksi, Dewan Komisa	aris dan Komite Audit	
1	23 Januari 2020	Cornelius Simanjuntak	 Monitoring Risalah Rapat Bulan Desember 2019 Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Laporan Kinerja Dan Realisasi Keuangan Bulan Desember 2020
2	14 Februari 2020	Cornelius Simanjuntak	 Monitoring Risalah Rapat Bulan Januari 2020 Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Laporan Kinerja Dan Realisasi Keuangan Bulan Januari 2020
3	29 April 2020	Cornelius Simanjuntak	 Monitoring Risalah Rapat Bulan Februari 2020 Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Laporan Kinerja Dan Realisasi Keuangan Bulan Februari 2020
4	29 April 2020	Cornelius Simanjuntak	1. Monitoring Risalah Rapat Bulan Desember 2020 2. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum 3. Laporan Kinerja Dan Realisasi Keuangan Bulan Desember 2020 4. Lain-lain: - Laporan Hasil Assessment GCG Tahun Buku 2019 oleh BPKP - Pengadaan Barang dan Jasa s/d bulan April 2020 - Laporan Monitoring & Evaluasi Pengendalian Internal TW I 2020 - Laporan Monitoring Realisasi Mitigasi Risk Management Korporat TW I 2020
5	19 Mei 2020	Cornelius Simanjuntak	 Monitoring Risalah Rapat Bulan April 2020 Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Laporan Kinerja Dan Realisasi Keuangan Bulan April 2020



No.	Tanggal Pelaksanaan Rapat	Peserta Rapat	Agenda Rapat
6	29 Juni 2020	Cornelius Simanjuntak	 Monitoring Risalah Rapat Bulan Mei 2020 Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Laporan Kinerja Dan Realisasi Keuangan Bulan Mei 2020
7	29 Juli 2020	Cornelius Simanjuntak	 Monitoring Risalah Rapat Bulan Juni 2020 Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Laporan Kinerja Dan Realisasi Keuangan Bulan Juni 2020
8	28 Agustus 2020	Cornelius Simanjuntak	 Monitoring Risalah Rapat Bulan Juli 2020 Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Laporan Kinerja Dan Realisasi Keuangan Bulan Juli 2020
9	23 September 2020	Cornelius Simanjuntak	 Monitoring Risalah Rapat Bulan Agustus 2020 Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Laporan Kinerja Dan Realisasi Keuangan Bulan Agustus 2020
10	21 Oktober 2020	Cornelius Simanjuntak	 Monitoring Risalah Rapat Bulan September 2020 Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Laporan Kinerja Dan Realisasi Keuangan Bulan September 2020
11	30 November 2020	Cornelius Simanjuntak	 Monitoring Risalah Rapat Bulan Oktober 2020 Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Laporan Kinerja Dan Realisasi Keuangan Bulan Oktober 2020
12	23 Desember 2020	Cornelius Simanjuntak	 Monitoring Risalah Rapat Bulan November 2020 Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Masalah Hukum Laporan Kinerja Dan Realisasi Keuangan Bulan November 2020

PELATIHAN KOMISARIS

Pada tahun 2020 Implementasi rencana program pelatihan, seminar atau workshop yang diikuti oleh Anggota Komisaris mengarah pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas guna menunjang tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perseroan.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris terdapat dalam Board Manual, yang pada pokoknya mengatur bahwa penilaian kinerja Dewan Komisaris didasarkan pada rencana kerja dan pencapaiannya, tingkat kehadiran dalam rapat, kontribusi dalam proses pengawasan perusahaan, komitmen dalam memajukan perusahaan, dll. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.



Dalam menilai kinerja Dewan Komisaris, Perusahaan menggunakan asesmen atas kinerja Dewan Komisaris melalui Pelaksanaan RUPS. Asesmen penilaian kinerja Dewan Komisaris ini dilaksanakan oleh Pemegang Saham.

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja Dewan Komisaris sebagaimana yang tercantum dalam *Board Manual* Pedeve adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya.
- 2. Tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi, maupun rapat dengan komite-komite yang ada.
- 3. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perusahaan.
- 4. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu.
- 5. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
- 6. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, ketentuan RUPS, dan kebijakan Perusahaan. Hasil dari penilaian kinerja tersebut adalah diterimanya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun 2018 dalam RUPS Tahunan.

BENTURAN KEPENTINGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Perusahaan telah memiliki kebijakan Dewan Komisaris mengenai (potensi) benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Aturan ini dijelaskan dalam kebijakan COCG tentang Benturan Kepentingan dan *Board Manual*.

Untuk menunjukkan komitmennya, Dewan Komisaris menandatangani pernyataan dalam Pakta Integritas bahwa tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS/Pemilik Modal.

Dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan, disampaikan pula pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali satu sama lainnya, sebagaimana yang disampaikan pada tabel berikut:

		Hubungan Dengan						Hubungan keluarga Dengan					
Nama	Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		
	Υ	N	Υ	N	Υ	N	Y	N	Υ	N	Υ	N	
Cornelius Simanjuntak	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka membantu kelancaran tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Sekretaris Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya. Tugas dan kewajiban Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam membantu Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
- 2. Menyelenggrakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
- 3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
 - a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris



- b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan.
- 4. Memberikan dukungan administrasi yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan serta tindakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan, meliputi namun tidak terbatas pada aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Sistem Pengendalian Intern
 - b. Manajemen Risiko Perusahaan
 - c. Sistem Teknologi Informasi
 - d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - e. Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
 - f. Mutu dan Pelayanan
 - g. Kepatuhan pada Peraturan Perusahaan
- 5. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada saat ini, Perusahaan belum menetapkan jabatan definitif Sekretaris Dewan Komisaris. Namun fungsi dari Sekretaris Dewan Komisaris sudah dijalankan oleh Sekretaris Perusahaan yang oleh Perusahaan disebutkan sebagai jabatan Corporate Secretary & Business Support (CSBS). Selama tahun 2020, CSBS telah melaksanakan tugas mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib.

Selain itu, realisasi pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1. Menjembatani komunikasi antara Komisaris dengan Direksi Perusahaan dan Komite Audit.
- 2. Mempersiapkan dan mengurus administrasi (surat-menyurat) keluar dan masuk untuk Dewan Komisaris serta Komite Audit.
- 3. Menyimpan dan mengatur dokumen (administrasi) Dewan Komisaris, termasuk undangan dan setiap notulen rapat.
- 4. Memberikan/menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk rapat atau saat memberikan data pendukung untuk pengambilan keputusan dalam memberi saran/arahan kepada Direksi.
- 5. Mengurus administrasi & persiapan perjalanan Dinas Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Direksi

URAIAN DIREKSI

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi tidak memiliki Saham di Perusahaan dan Perusahaan lainnya.

URAIAN TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, berdasarkan Anggaran Dasar, Direksi berwenang untuk :

- 1. Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan Perusahaan;
- 2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk pembinaan pegawai, penetapan upah dan penghasilan lain, pesangon dan/atau penghargaan atas pengabdian serta manfaat pensiun bagi para pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS;
- 3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 4. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada pihak lain;
- 5. Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan berdasarkan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku; dan
- 6. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berkewajiban untuk :

- a. Mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan;
- b. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- c. Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP dan selanjutnya disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan;
- e. Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- f. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, dan pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
- g. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan jalannya Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini serta setiap kali diminta oleh RUPS;
- h. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- i. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan atau diminta anggota Dewan Komisaris;
- j. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- k. Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh RUPS; dan
- I. Melakukan penempatan investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang telah ditetapkan oleh RUPS.



Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan, kecuali apabila Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Mengingat sepanjang tahun 2020 hanya ada satu orang Direksi dan telah disahkan Struktur Organisasi Persahaan hanya memilik Direktur, untuk itu ruang lingkup Pekerja dan Tanggung jawab Direksi meliputi :

- a. Terimplementasinya Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap area operasional dan area strategis Perusahaan.
 - 1. Menetapkan kebijakan, pedoman, sistem Perusahaan termasuk menetapkan program pengawasan internal yang efektif agar pengurusan Perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
 - 2. Mewakili Perusahaan dalam urusan ke dalam dan ke luar yang bersifat kebijakan strategis.
 - 3. Menetapkan keputusan-keputusan yang diperlukan dalam pengelolaan Perusahaan termasuk tentang ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.
 - 4. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan operasional serta strategis Perusahaan untuk memastikan seluruh kegiatan Perusahaan didasarkan pada prinsip GCG.
- b. Tersedianya Key Performance Indicator (KPI), RKAP serta RJPP Perusahaan yang disetujui oleh para Pemegang Saham, termasuk di dalamnya tercapainya upaya untuk meningkatkan nilai Perusahaan bagi para Pemangku Kepentingan.
 - 1. Mengarahkan penyusunan dan mempersiapkan perencanaan usaha Perusahaan, KPI, RKAP serta RJPP sesuai dengan misi dan tujuan Perusahaan serta melakukan evaluasi dan penyesuaian perencanaan berdasarkan perubahan lingkungan strategis untuk pencapaian visi Perusahaan secara efisien dan efektif.
 - 2. Menyusun KPI, RKAP serta RJPP Perusahaan untuk disetujui oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
- c. Terlaksananya persetujuan dan penetapan Mitra Bisnis serta semua bentuk kontrak-kontrak perjanjian dengan Mitra Bisnis dalam rangka penempatan investasi pada Mitra Bisnis maupun aktifitas kegiatan usaha.
 - 1. Mengarahkan, memutuskan dan mengendalikan pengelolaan serta penempatan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya tingkat bunga maksimal dari Bank-bank Persepsi Perusahaan dan optimalisasi kinerja investasi lainnya.
 - 2. Membina hubungan baik dengan Perusahaan-perusahaan Mitra Bisnis dalam rangka menjaga kelangsungan kerja sama usaha yang telah berjalan dan mengidentifikasi peluang potensi bisnis untuk pengembangan usaha.
 - 3. Melakukan penempatan investasi kepada Mitra Bisnis sesuai dengan ketentuan Pedoman Investasi dan mencari peluang-peluang investasi baru untuk menumbuh kembangkan Perusahaan.
 - 4. Menyetujui dan menetapkan Mitra Bisnis termasuk penggunaan bank sebagai Bank Persepsi.
 - 5. Menandatangani semua bentuk kontrak-kontrak perjanjian dengan Mitra Bisnis.
- d. Tersedianya laporan periodik untuk Pemegang Saham Perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
 - 1. Mengarahkan, mengendalikan dan memantau penyusunan laporan periodik dari kegiatan operasional Perusahaan untuk memastikan tersedianya laporan bagi pihak yang terkait secara akurat dan tepat waktu sebagai bahan pengambilan keputusan Pemegang Saham Perusahaan.
 - 2. Menyetujui penggunaan dan pengeluaran dana untuk kegiatan operasional Perusahaan.
- e. Tersedia KPI, RKAP serta RJPP Perusahaan yang disetujui oleh para Pemegang Saham, dan tersedianya laporan-laporan baik Laporan Keuangan maupun Laporan Manajemen Perusahaan secara periodik bagi para Pembuat Keputusan atau Pemangku Kepentingan.
 - 1. Mengarahkan persiapan dan penyusunan RJPP, RKAP serta KPI sesuai dengan visi dan misi Perusahaan bersama-



- sama dengan Direktur Utama kemudian melakukan evaluasi dan penyesuaian bilamana diperlukan berdasarkan perubahan lingkungan strategis.
- 2. Mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi proses akuntansi dan anggaran Perusahaan agar dapat menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen yang akurat dan tepat waktu sehingga berguna sebagai alat pengendalian serta dasar pengambilan keputusan.
- 3. Menyusun KPI, RKAP serta RJPP Perusahaan untuk disetujui oleh Komisaris dan Pemegang Saham.
- f. Tercapainya Tingkat Kesehatan Perusahaan dan Tingkat Profit bagi seluruh Pemegang Saham sesuai dengan yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya tercapainya hasil perolehan dan pengelolaan dana pada bank-bank persepsi Perusahaan, hasil yang maksimal atas investasi yang dilakukan oleh Perusahaan, dan terlaksananya pembayaran atas kewajiban Perusahaan sesuai prosedur dan dalam waktu yang cepat.
 - 1. Mengarahkan, mengendalikan dan menentukan Portofolio Investasi sehingga diperoleh imbal hasil yang paling menguntungkan melalui analisa kajian, kalkulasi dan keputusan yang tepat.
 - 2. Mengarahkan, mengendalikan dan menentukan pengelolaan dana sehingga diperoleh imbal hasil yang menguntungkan serta aman melalui penempatan dalam bentuk Deposito, *Deposit On Call* (DOC) ataupun giro (*Cash Management*).
 - 3. Mengarahkan serta membina hubungan baik dengan perusahaan lainnya untuk menjaga keberlangsungan bisnis.
 - 4. Mengarahkan, mengendalikan proses arus dana agar kebutuhan Perusahaan dapat terpenuhi serta penempatan dana yang ada secara tepat sehingga aman dan mendapatkan hasil yang paling menguntungkan.
 - 5. Melakukan penempatan Investasi kepada Mitra Bisnis dengan batasan nilai tertentu untuk setiap proyek.
 - 6. Menyetujui dan menetapkan Mitra Bisnis termasuk penggunaan bank sebagai Bank Persepsi.
 - 7. Menandatangani semua bentuk kontrak-kontrak perjanjian dengan Mitra Bisnis.
- g. Terimplementasinya GCG dalam setiap area operasional dan area strategis Perusahaan.
 - 1. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan operasional Perusahaan dalam rangka memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Prinsip GCG.
 - 2. Menetapkan kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh kegiatan strategis serta operasional Perusahaan.

SUSUNAN DIREKSI

Jumlah anggota Direksi Perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 1 (satu) orang, yaitu Direktur sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, bahwa menetapkan bahwa Perusahaan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Pada tahun 2020 tidak ada pergantian Direktur maupun perubahan struktur Direksi, namun sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 27 tanggal 09 Maret 2020 tentang Penetapan Pejabat Definitif Direktur yang dibuat dihadapan Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH., Pemegang Saham menyetujui penetapan definitif Ibu Khurinnihayah semula sebagai Pj. Direktur Perseroan menjadi Direktur Perseroan, berlaku efektif sejak tanggal 28 Februari 2020 dengan masa jabatan sejak tanggal pengangkatan sebagai Pj. Direktur.

No.	Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Tanggal Pengangkatan	Tanggal Akhir Masa Jabatan
1.	Khurinnihayah	Direktur	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 Tanggal 04 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH.	15 November 2019	15 November 2022

RAPAT DIREKSI

Mengingat saat ini Direksi hanya satu orang, maka mekanisme pengambilan keputusan Direksi tidak dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat namun langsung ditetapkan oleh Direksi. Dokumen keputusan Direksi akan dituangkan dalam Notulen Rapat Direksi, sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.



Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila:

- a. Dianggap perlu; atau
- b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
- c. Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Board Manual merupakan petunjuk tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga menjadi acuan hubungan kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Perusahaan yang optimal.

Board Manual adalah pedoman yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang berkenaan dengan tata kerja Direksi dan Dewan Komisaris serta proses hubungan fungsi antara Direksi, Dewan Komisaris dan antara kedua organ Perusahaan tersebut. Board Manual disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, prinsip-prinsip hukum korporasi, arahan Pemegang Saham serta best practices Good Corporate Governance.

Meskipun demikian, berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam Board Manual tersebut. Board Manual yang berisi pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dan Direksi ini adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan GCG di Perusahaan.

Board Manual yang berisi pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah wujud dari implementasi komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan GCG di Perusahaan. Board Manual Perusahaan yang berlaku saat ini adalah Board manual yang ditetapkan pemberlakuannya melalui Surat Keputusan No. Kpts-008/A0000/2020 tanggasl 12 November 2020 dan telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Naskah Kesepakatan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 12 November 2020.

Board Manual yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang penetapannya bertujuan untuk:

- 1. Menjadi rujukan atau pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ;
- 2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ;
- 3. Menerapkan asas-asas GCG yakni, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (kewajaran).

Dengan diberlakukannya Board Manual dalam hubungan kerja antar 2 (dua) organ Perseroan, diharapkan kegiatan usaha Perseroan dapat dilaksanakan secara harmonis dengan asas-asas GCG dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan yang telah ditetapkan.

Aspek-aspek yang diatur dalam Board Manual meliputi :

- a. Kebijakan Umum
- b. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi
- c. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
- d. Independensi (Kemandirian) Direksi
- e. Etika Jabatan Anggota Direksi
- f. Susunan, Tugas dan Wewenang Direksi
- g. Rapat Direksi
- h. Evaluasi Kinerja Direksi
- i. Fungsi Pendukung
- j. Hubungan Perseroan Dengan Anak Perusahaan



HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Diantara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan tidak terdapat hubungan afiliasi, baik secara keluarga maupun keuangan. Sehingga, dengan tidak adanya hubungan afiliasi diantara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak secara independen, diharapkan juga tidak terdapat adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan oleh seluruh organ Perseroan.

PELATIHAN DIREKSI

Selama tahun 2020 terdapat beberapa program pelatihan, seminar atau workshop yang diikuti oleh anggota Direksi Perusahaan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi Direksi

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Perseroan saat ini tidak memiliki kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai keberagaman komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin. Meskipun demikian, pada prakteknya komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada setiap periode menunjukkan adanya keberagaman. Seperti halnya, komposisi Direksi Perseroan saat ini yang terdiri dari 1 (satu) orang perempuan. Selain itu, komposisi Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dengan pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan pada bidang Hukum.

Dalam hal ini, kebijakan Perseroan saat ini lebih banyak ditekankan pada batasan-batasan *normative* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya dalam penetapan komposisi jumlah anggota Direksi yang paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang dan disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas dan rencana strategis Perseroan. Begitupula dengan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan yang setidaknya terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih.

Tabel Hubungan Afiliasi antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali Perseroan

No	Hubungan Afiliasi	Jenis Hubu	ngna Afiliasi
INO	Hubungan Afiliasi	Keluarga	Keuangan
1	Antara Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Antara Anggota Direksi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), selaku Pemegang Saham Utama atau Pengendali	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Antara Anggota Dewan Komisaris dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), selaku Pemegang Saham Utamaatau Pengendali	Tidak Ada	Tidak Ada

PENILAIAN DIREKSI

Perusahaan telah memiliki sistem dan pedoman penilaian kinerja Direksi, baik kolegial maupun individu, sebagaimana yang diatur dalam *Board Manual*. Perusahaan merumuskan Kontrak Manajemen yang memuat target kinerja Direksi yang disahkan dan disetujui Pemegang Saham dalam RUPS. Mekanisme penilaian kinerja Direksi dapat dilihat melalui KPI Direksi. Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi secara kolegial, serta telah menyampaikannya kepada RUPS. Selain melalui KPI, dalam menilai kinerja Direksi, Perusahaan menggunakan asesmen atas kinerja Direksi melalui *Forum Performance Dialog* di hadapan Pemegang Saham. Asesmen penilaian kinerja Direksi ini dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan RUPS Tahunan.



Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen atas kinerja Direksi sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* mengenai Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi, adalah:

- 1. Penyusunan KPI pada awal tahun dan evaluasi pencapaiannya.
- 2. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Direksi maupun rapat dengan Dewan Komisaris.
- 3. Kontribusinya dalam aktivitas bisnis Perusahaan.
- 4. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu.
- 5. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan.
- 6. Ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.
- 7. Pencapaian target Perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan Kontrak Manajemen.

Hasil dari penilaian kinerja tersebut adalah diterimanya laporan tahunan dalam RUPS Tahunan.

Sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero), remunerasi Direksi ditentukan oleh Induk Perusahaan sebagai Pemegang Saham. Dewan Komisaris juga dapat mengusulkan remunerasi Direksi sesuai dengan tata aturan dan pertimbangan yang berlaku. Sedangkan pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan. Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS/Pemilik Modal. Lalu keputusan akhir remunerasi akan ditetapkan setiap tahunnya pada RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham.

Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

STRUKTUR REMUNERASI DIREKSI

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 diatur bahwa besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sedangkan berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, diatur bahwa ketentuan mengenai besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Proses Pengusulan Dan Persetujuan Pemberian Remunerasi bagi Direksi :

- 1. Direksi mengajukan usulan remunerasi bagi anggota Direksi (besaran dan bentuk remunerasi) kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan rekomendasi.
- 2. Apabila dipandang perlu, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi yang dipimpin salah satu anggota Komisaris untuk melakukan kajian remunerasi, namun dalam hal ini Perseroan tidak membentuk Komite Remunerasi dikarena kompleksitas dan lingkup kegiatan usaha Perseroan saat ini.
- 3. Setelah usulan remunerasi Direksi mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris, selanjutnya Direksi meneruskan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan.

Pemegang Saham melalui fungsi SDM PT Pertamina (Persero) kemudian melakukan kajian. Hasil kajian menjadi bahan pertimbangan dalam persetujuan dan pengesahan atas besaran, bentuk dan waktu berlakunya remunerasi Direksi dilakukan pada saat RUPS Tahunan atau Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler. Dengan demikian, Pemegang Saham menjadi satu-satunya pemangku kepentingan yang memiliki akses untuk ikut menentukan remunerasi Direksi.

Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas pada BUMN.

Penetapan penghasilan berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, serta kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tunjangan dan tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian target, tingkat kesehatan dan kemampuan keuangan serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*).

Sedangkan pengusulan tantiem/insentif kinerja Direksi mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan. Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Pemegang Saham sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 5 & 6 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS. Keputusan akhir remunerasi akan ditetapkan setiap tahunnya pada RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham.

Jumlah remunerasi yang diterima Direksi pada tahun 2020 sebagai berikut:

		Jenis Remunerasi						
Nama	Nama Jabatan		Tunjangan dan Fasilitas	Tantiem *				
Khurinnihayah	Direktur	Rp. 64.686.700,-	Rp. 25.874.680,-	Rp. 97.305.753,-				

^{*} Tantiem yang diterima Direktur pada tahun 2020 merupakan tantiem Net tahun Buku 2019 yang dibayarkan pada tahun 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Pemegang Saham No. 9 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Marianne V. Hamdani, SH. Sedangkan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020, akan ditetapkan pada RUPS Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2020.

STRUKTUR REMUNERASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan No. 20 tanggal 19 Juli 2020 dibuat dihadapan Marianne V. Hamdani S.H., Notaris di Jakarta tentang Penyesuaian Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2020. Sesuai ketentuan tersebut, remunerasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris terdiri atas:

- 1. Honorarium;
- 2. Tunjangan dan fasilitas;
- 3. Tantiem;
- 4. Imbalan atas kinerja;
- 5. Asuransi Purna Jabatan.

Dengan proporsi besaran honorarium sebagai berikut:

- 1. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama.
- 2. Honorarium Anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.

Tunjangan yang diberikan adalah meliputi Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Tunjangan Transportasi. Tantiem adalah penghargaan kepada Dewan Komisaris yang tidak dijabat oleh Direksi Pertamina, yang diberikan setiap tahun apabila Perusahaan memperoleh laba dan diputuskan dalam RUPS.

Alur penetapan penghasilan (remunerasi) berupa gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

- 1. Pendapatan.
- 2. Aktiva.
- 3. Kondisi dan kemampuan keuangan anak perusahaan/perusahaan patungan yang bersangkutan.
- 4. Faktor-faktor lain yang relevan.
- 5. Kepatuhan (compliance) yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.

Penetapan penghasilan berupa tantiem yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

- 1. Performance perusahaan, termasuk EBITDA dan Key Performance Indicator (KPI).
- 2. Tingkat kesehatan.
- 3. Kondisi dan kemampuan anak perusahaan/perusahaan patungan yang bersangkutan.
- 4. Faktor-faktor yang relevan.

Berdasar proses dan alur di atas, Pemegang Saham menjadi satu-satunya pemangku kepentingan yang terlibat dalam penentuan remunerasi Dewan Komisaris.

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2020

Nama		Jenis Remunerasi					
Nama	Jabatan	Honorarium	Tunjangan dan Fasilitas	Tantiem *			
Cornelius Simanjuntak	Komisaris	Rp. 29.109.015,-	-	-			

Pada tahun 2020, tidak ada pembayaran Tantiem Dewan Komisaris mengingat Komisaris pada Tahun 2019 masih berstatus Pekerja Aktif PT Pertamina (Persero), Tantiem Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 ditetapkan pada RUPS Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2020.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris perseroan dirangkap oleh Sekretaris Perseroan yang di dalam Perseroan sebutan jabatannya dikenal dengan Corporate Secretary & Business Support (CSBS), dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mengangkat seorang Sekretaris Dewan Komisaris guna membantu Dewan Komisaris di bidang kegiatan kesekretariatan antara lain:

- 1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris, serta membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
- 2. Membuat Laporan Kegiatan Dewan Komisaris per Triwulan ke Pemegang Saham.
- 3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik korespondensi, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
- 4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dan Rencana Kerja Komite Audit.
- 5. Membuat ulasan/reviu dokumen yang diajukan Direksi untuk minta persetujuan atau rekomendasi Dewan Komisaris.
- 6. Menyusun laporan-laporan Dewan Komisaris.
- 7. Memastikan bahwa dokumen penyelenggaraan kegiatan Dewan Komisaris tersimpan dengan baik di Perusahaan dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik.
- 8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- 9. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak-pihak terkait di lingkungan Perusahaan maupun pihak-pihak lain di luar lingkungan Perusahaan.
- 10. Menghadiri rapat Dewan Komisaris baik internal maupun eksternal (dengan Direksi) serta rapat Komite Penunjang Dewan Komisaris.
- 11. Melaksanakan tugas lain dan tugas khusus dari Dewan Komisaris; dan
- 12. Melakukan *self-assessment* terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik pedoman kerjanya setiap akhir tahun.
- 13. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Komisariat yang berkaitan dengan:
 - Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
 - Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
- 14. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-Komite di lingkungan Komisariat untuk keperluan Dewan Komisaris.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
- 2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait.
- 3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di Lingkungan Komisaris yang berkaitan dengan:
 - a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris
 - b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan.
- 4. Memberikan dukungan administrasi yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan serta tindakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan, meliputi namun tidak terbatas pada aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Sistem Pengendalian Intern
 - b. Manajemen Risiko Perusahaan
 - c. Sistem Teknologi Informasi
 - d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - e. Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
 - f. Mutu dan Pelayanan
 - g. Kepatuhan pada Peraturan Perusahaan
 - h. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- 5. Memberikan dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi
- 6. Mengumpulkan data teknis yang berasal dari komite di lingkungan Dewan Komisaris dan Tenaga Ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris

Komite Audit

Perusahaan sebagai Anak Perusahaan BUMN juga memperhatikan peraturan dilingkungan kementrian BUMN, termasuk keberadaan Komite Audit Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Mentri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris BUMN tanggal 24 Agustus 2012. Pembentukan Komite Audit dimaksudkan untuk membantu dan memperkuat Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses penyusunan laporan keuangan, pemilihan auditor eksternal dan proses auditnya, termasuk melakukan evaluasi independensi dari auditor eksternal, proses audit oleh Internal Audit, assessment control dan risiko serta penerapan GCG.

Masa jabatan Ketua Komite Audit yang merangkap anggota Dewan Komisaris sama dengan masa jabatan penunjukannya sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh RUPS. Sedangkan masa jabatan Anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Penegasan atas susunan keanggotaan Komite Audit dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.001/K0000/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penegasan Masa Tugas Komite Audit Serta Pemberhentian Dan Penetapan Pembubaran Komite Investasi & Remunerasi. Secara struktural Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Komposisi Komite Audit Perusahaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Ketua: Cornelius Simanjuntak

b. Anggota: Kurnia Pinayungan (s.d 28 Juli 2020) c. Anggota: Seny Saraswati (s.d 28 Juli 2020)

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Komite Audit tersebut, Perseroan telah berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait permintaan penunjukan Komite Audit pengganti, namun hingga 31 Desember 2020 belum ditetapkan calon Komite Audit pengganti.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka disusun Pedoman Kerja (Charter) Komite Audit. Charter tersebut mencakup komposisi anggota, struktur keanggotaan, persyaratan keanggotaan termasuk persyaratan kompetensi dan independensi, masa jabatan tugas, tanggung jawab dan wewenang, rapat, pelaporan dan anggaran

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit merupakan pekerja yang berasal dari PT Pertamina (Persero) dengan latar belakang pendidikan Akuntansi. Komite Audit tidak memiliki hubungan langsung dengan aktivitas utama Perusahaan, sehingga Anggota Komite Audit adalah orang-orang yang memiliki pemahaman mengenai bisnis Perusahaan dan memiliki independensi terhadap Perusahaan

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN **KOMITE AUDIT TAHUN 2020**

Selama tahun 2020, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan yang direncanakan sebagai berikut:

- 1. Membuat dan menjalankan kegiatan Rencana Kerja Komite Audit tahun 2020.
- 2. Melakukan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk membahas masalah-masalah kegiatan usaha yang memerlukan perhatian khusus dari Komite Audit.
- 3. telah melakukan review terhadap draft laporan auditor eksternal. Review dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang telah di audit telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- 4. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha bulanan, triwulan, semester serta tahun buku 2020 dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.
- 5. Melakukan analisa, evaluasi dan review terhadap berbagai hal lainnya yang diminta oleh Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

Sekretaris Perseroan

Pembentukan Sekretaris Perusahaan pada PT Pertamina Pedeve Indonesia mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.KEP-117/MMBU/2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara. Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat Direksi, serta bertanggung jawab kepada Direksi. Sekretaris Perusahaan di Perseroan dikenal dengan sebutan *Corporate Secretary & Business Support* (CSBS).

Sekretaris Perusahaan memiliki kedudukan strategis, yakni sebagai penghubung antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan juga menjadi sumber informasi dan berfungsi untuk meningkatkan hubungan komunikasi internal dan eksternal terkait dengan kegiatan usaha.

a. Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang Sekretaris Perusahaan

Fungsi pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1. Penghubung (*liaison officer*) antara Direksi dengan Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan *stakeholders*, serta mewakili Perusahaan dalam berkomunikasi dengan masyarakat, regulator, lembaga atau asosiasi lain yang berkaitan dengan Perusahaan.
- 2. Memberikan pelayanan kepada stakeholders atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan.
- 3. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (compliance officer).

b. Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1. Menghadiri Rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat Direksi.
- 2. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Khusus.
- 3. Membuat dan memperbarui secara berkala Daftar Pemegang Saham.
- 4. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS.
- 5. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan/kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar.
- 6. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan.
- 7. Melaksanakan penyelenggaraan rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersifat rutin maupun non-rutin.
- 8. Menindaklanjuti setiap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan beserta penanggung jawabnya dan memantau serta mengecek tahap kemajuan pelaksanaan hasil rapat.
- 9. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan serta pengadministrasiannya.
- 10. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
- 11. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung penerapan GCG.

c. Wewenang Direksi yang dapat dilimpahkan ke Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- 1. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan.
- 2. Melihat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Direksi.
- 3. Meminta laporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi yang dilaksanakan oleh person in charge.
- 4. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Direksi kepada pihak-pihak terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi.
- 5. Meningkatkan serta meminta penjelasan dari *person in charge* Perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam tahapan proses pelaksanaan keputusan Direksi.
- 6. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan-satuan kerja/pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan-bahan/informasi/data yang dibutuhkan oleh Direksi.
- 7. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan Direksi.
- 8. Mengusulkan agenda rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan.
- 9. Menghadiri rapat-rapat Direksl dengan pihak-pihak di dalam/luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 10. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.



d. Kegiatan Terkait Sekretaris Perseroan

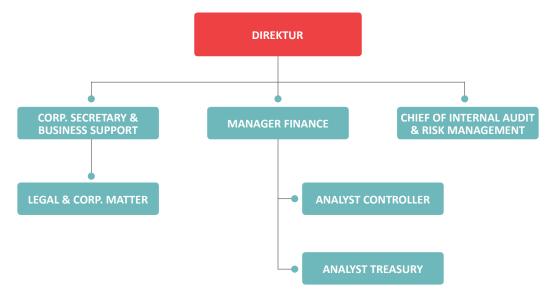
- 1. Corporate Social Responsibility (CSR);
- 2. Survey Pelanggan;
- 3. Sponsorship; dan
- 4. Kegiatan-kegiatan Kesekretariatan.

e. Profil Sekretaris Perusahaan

Sejak 01 Oktober 2018, posisi jabatan Corporate Secretary & Business Support dijabat oleh Bapak Ali Syamsul Rohman, Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1973, Lulus S-1 dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung. Bergabung di Pedeve sejak masih bernama PT Pertamina Saving & Investment (PT PSI) sebagai Tenaga Legal. Sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016 menjabat sebagai Manajer Legal & Compliance pada Fungsi Sekretaris Perseroan. Pada tanggal 01 September 2016 sampai dengan 31 Maret 2018 menduduki jabatan sebagai Manajer Fungsi Legal, Compliance & Risk Management.

f. Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Secara struktur organisasi tata kelola Perseroan, Sekretaris Perusahaan berkedudukan di bawah Direktur.



Ringkasan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Sekretaris Perusahaan melalui fungsi-fungsi di bawahnya telah melaksanakan tugas sebagai berikut:

- 1. Mengatur pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris dan melakukan dokumentasi notulensi.
- 2. Mendampingi Direksi dan melaksanakan protokoler kegiatan yang memerlukan kehadiran Direksi, antara lain Focus Group Discussion (FGD), undangan/audiensi dengan pemangku kepentingan, dan instansi pemerintah.
- 3. Menyiapkan bahan, informasi, dokumen lain yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas yang memerlukan kehadiran Direksi, antara lain FGD, undangan/audiensi dengan pemangku kepentingan, instansi pemerintah, termasuk untuk kegiatan penandatanganan perjanjian/MOU dan komitmen lainnya.
- 4. Melakukan koordinasi dengan fungsi terkait di Kantor Pusat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Direksi.
- 5. Mengkoordinasikan, mengelola dan mengembangkan strategi dan program komunikasi perusahaan.
- 6. Mengelola formalitas korporasi, penyampaian informasi perusahaan dan dokumentasi perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- 7. Membangun dan memelihara goodwill perusahaan di mata pemangku kepentingan dan instansi pemerintah dengan tetap berada dalam koridor kepatutan dan etika bisnis.

Unit Audit Internal

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya serta seluruh personil Perusahaan, yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Penerapan Sistem Pengendalian Internal efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Perusahaan melakukan dan melaksanakan sistem pengendalian internal oleh fungsi auditor internal yang melakukan audit terhadap kegiatan usaha Perusahaan dan laporan keuangan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan rencana audit tahunan, hasil audit dilaporkan kepada Direktur dan dikomunikasikan juga dengan Komite Audit sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris.

Audit dilakukan dengan ruang lingkup keseluruhan kegiatan Perusahaan yang difokuskan pada aspek dan unsur kegiatan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap kepentingan Perusahaan. Internal Audit Perusahaan telah melakukan fungsi pengawasan. secara independen dengan cakupan tugas yang memadai sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit dalam Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan (RAT).

Fungsi Internal Audit dibentuk dengan tujuan membantu Direksi dan jajaran manajemen dalam upaya mengefektifkan pengendalian internal atas kegiatan operasi. Internal Audit berfungsi melakukan pengawasan/audit keuangan maupun pelaksanaan operasional.

Fungsi Internal Audit berperan dalam melakukan kegiatan assurance (meningkatkan kualitas) operasional Perusahaan dan consulting yang independen dan objektif dalam rangka untuk memberikan nilai tambah, membantu tercapainya tujuan Perusahaan, peningkatan operasional organisasi dan pengelolaan tata kelola perusahaan, pengendalian internal serta manajemen risiko melalui proses evaluasi dengan pendekatan yang sistematis dan teratur. Beberapa aktivitas assurance yang dapat dijalankan oleh fungsi internal audit antara lain audit operasional, audit compliance, audit kinerja, audit keuangan, serta audit investigasi dan due diligence. Sementara itu kegiatan consulting mencakup fasilitator, mediator dan advisory lainnya yang dibutuhkan oleh manajemen yang sifat dan cakupan penugasannya telah disepakati dengan manajemen tanpa mengambil alih kewenangan manajemen.

PENGANGKATAN CHIEF OF INTERNAL AUDIT

Penunjukan Chief of Internal Audit merupakan kewenangan Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PIAGAM INTERNAL AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Fungsi Internal Audit berpedoman pada Piagam Internal Audit atau Internal Audit Charter. Piagam Internal Audit yang kini berlaku, disahkan dan ditandatangani Direktur dan Komisaris Perusahaan pada 02 Januari 2020.

VISI

Menjadi Internal Audit yang independen, profesional dan dapat dipercaya.

MISI

- Meningkatkan efektifitas pengendalian internal, pengelolaan manajemen resiko dan proses tata tata kelola perusahaan yang baik.
- Memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui kegiatan assurance provider, problem solver, insight generator, dan trusted advisor.
- Berperan aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan auditor eksternal dan penugasan lain yang diamanatkan manajemen perusahaan.



TUJUAN

- 1. Membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan efektivitas tata kelola Perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal.
- 2. Membantu manajemen Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan advice, insight dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.

KEDUDUKAN

- 1. Internal Audit mempunyai kedudukan yang independen dari semua fungsi Kerja lainnya, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- 2. Internal Audit dipimpin oleh seorang Chief of Internal Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Menyusun dan mengusulkan Annual Audit Plan untuk mendapatkan persetujuan Direktur.
- 2. Menilai efektifitas system pengendalian internal perusahaan melalui kegiatan assurance.
- 3. Melaksanakan fungsi pengawasan atas seluruh aktifitas / kegiatan usaha sesuai dengan program kerja yang telah disetujui manaiemen.
- 4. Memberikan rekomendasi /saran perbaikan yang relevan serta informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada manajemen.
- 5. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan baik yang bersumber dari internal maupun eksternal auditor .
- 6. Mendorong penerapan tata kelola /Good Corporate Governance yang baik di lingkungan Perusahaan.
- 7. Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasan kepadaDirektur.
- 8. Berkoordinasi dengan Komisaris dan Komite Audit dalam kegiatan pengawasan Perusahaan.

WEWENANG INTERNAL AUDIT

- 1. Menentukan dan mengelola strategi pengawasan, kebijakan pengawasan dan kegiatan pengawasan pada seluruh wilayah/kegiatan bisnis Perusahaan.
- 2. Memiliki akses tidak terbatas pada semua data, dokumen, kegiatan, fungsi, pekerja/SDM dan sumber daya Perusahaan lainnva.
- 3. Melaksanakan kegiatan investigasi atas permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan, namun terbatas pada pengungkapan dan pelaporan kepada Direktur Utama Perusahaan.
- 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal dengan fungsifungsi kerja Perusahaan.
- 5. Menentukan kegiatan koordinasi dengan internal Audit PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan, sesuai dengan piagam hubungan korporasi antara Perusahaan dengan induk perusahaan / PT Pertamina (Persero).
- Menentukan kegiatan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Sebagai bentuk awareness terhadap kompetensi pekerja pada tahun 2020, Perusahaan menyertakan Chief of Internal Audit & Risk Management dalam beberapa kegiatan pendidikan/pelatihan dalam upaya pengembangan kompetensi auditor dan pemenuhan terhadap Standard Profesi Internal Audit.

LAPORAN PELAKSANAAN DAN REALISASI HASIL AUDIT INTERNAL

a. Ruang Lingkup dan Jenis Audit/Konsultasi

Audit dilakukan terhadap operasional Perusahaan untuk melihat apakah operasional dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati serta melihat efektifitas pengendalian manajemennya serta preaktek kerja yang lebih memperhatikan dan mencermati risiko.

Audit diutamakan pada hal-hal yang memerlukan perbaikan. Adapun ruang lingkup pekerjaan adalah:

1. Menentukan dan merencanakan program audit secara keseluruhan yang akan dilakukan Kegiatan konsultasi (Formal



dan Informal).

- 2. Audit atas aktivitas Treasury.
- 3. Aktivitas Konsultansi, Penyesuaian Soft Structure Internal Audit & Risk Management, Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit dan Pendampingan Auditor Eksternal.

b. Metodologi Audit & Konsultasi

1. Kegiatan assurance.

Dalam pelaksanaan kegiatan assurance, Internal Audit menggunakan metode dan pendekatan dimana prioritas auditee yang diperiksa adalah auditee yang memiliki tingkat risiko paling tinggi. Tujuan kegiatan audit yang dilakukan oleh Internal Audit adalah sebagai berikut:

- a. Menilai efektivitas dan kualitas Risk Management.
- b. Menilai efektivitas dan kecukupan Internal Control.
- 2. Kegiatan Konsultasi dan Pendampingan

Jasa konsultasi dan Pendampingan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan/permintaan user, sepanjang tidak mengganggu independensi dan objektivitas Internal Audit dalam pelaksanaan audit.

c. Ringkasan Kegiatan Internal Audit Tahun 2020

Lingkup penugasan Internal Audit mencakup semua area dan kegiatan operasional Perseroan dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal. Pelaksanaan kegiatan Internal Audit selama tahun 2020 adalah melakukan Konsultasi terkait Governance, Risk, & Control (GRC) di Lingkungan Perseroan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Melakukan pendampingan secara independen dan objektif, terhadap objek konsultasi agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.
- 2. Memberikan insight kepada manajemen terkait objek konsultasi sehingga diharapkan dalam menjadi solusi atas permasalahan dan tidak menjadi *issue* berulang di kemudian hari.
- 3. Memberikan insight atas peluang optimalisasi biaya dan internal control pada proses terkait objek konsultasi.
- 4. Melakukan update Pedoman Internal Audit terkait.

Akuntan Publik

PEMERIKSAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Guna memastikan integritas dan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan, maka Perusahaan menyertakan kantor akuntan publik (KAP) untuk melakukan audit umum. Untuk audit umum Laporan Keuangan 2020, dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (afiliasi PricewaterhouseCoopers / PwC) sebagai auditor.

Penunjukan penugasan KAP dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) selaku pemegang saham berdasarkan keputusan RUPS. Penunjukan KAP oleh PT Pertamina (Persero) mempertimbangkan konsolidasi antara-induk perusahaan dan seluruh anak perusahaan.

Tahun ini merupakan periode kedua Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berperan sebagai auditor laporan keuangan Perusahaan. Biaya pelaksanaan (fee) audit laporan keuangan Perusahaan oleh KAP ditanggung Perusahaan, total biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan jasa di tahun 2020 adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) belum termasuk OPE dan PPN.

Tahun Buku	Nama KAP	Partner	Registrasi Akuntan Publik	Pernyataan Pendapat KAP
2020	PwC - Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Daniel Kohar	No.AP.1130	Wajar Dalam Semua Hal Yang Material
2019	PwC - Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Daniel Kohar	No.AP.1130	Wajar Dalam Semua Hal Yang Material
2018	Ernst & Young - Purwantono,Sungkoro, & Surja	Yovita	No.AP.0702	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	PwC - Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Daniel Kohar	No.AP.1130	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	PwC - Tanudiredja, Wibisana & Rekan	Yusron Fauzan	No.AP.0223	Wajar Tanpa Pengecualian

TUGAS POKOK AUDIT EKSTERNAL

KAP mempunyai tugas pokok sebagai akuntan publik yang melaksanakan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Audit juga menilai laporan keuangan secara keseluruhan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditentukan. Selain melakukan audit terhadap Laporan Keuangan, KAP PwC tidak memberikan jasa konsultasi lain kepada Perusahaan.

HASIL PENILAIAN

Hasil audit keuangan oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan menyatakan bahwa laporan keuangan PT Pertamina Pedeve Indonesia telah disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dengan opini "Wajar dalam Semua Hal Yang Material".

Sistem Manajemen Risiko

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM) PERUSAHAAN

Sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Perusahaan menerapkan standar praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan dengan menjadikan budaya sadar risiko dalam setiap proses bisnis sebagai bagian dari budaya perusahaan. Implementasi ERM membantu perusahaan menghindari atau meminimalkan potensi kerugian (potential loss), mengoptimalkan peluang (opportunity) meningkatkan share holder value dan mengintegrasikan strategi korporat.

Kerangka pengelolaan ERM Perusahaan mengacu kepada Pedoman Manajemen Risiko Revisi I (Pertama) Nomor A-001/A1000/2017-S0 dimana Perusahaan meyakini bahwa pengelolaan ERM merupakan pendekatan efektif dalam mengelola suatu keadaan dan kemungkinan penyebab terjadinya suatu kegagalan yang berdampak bagi perusahaan dalam menjalankan proses bisnis.

Proses Manajemen Risiko dilingkungan perusahaan dilakukan secara proaktif, sistematik dan berdisiplin, melalui aktivitas Communication & Consultation, Establishing The Context, Risk Identification, Risk Analysis, Risk Evaluation, Risk Treatment dan Monitoring & Review yang di implementasikan dengan kegiatan Penyusunan dan Penetapan Top Risk, Risk Attitude, Risk Appetite, dan Risk Tolerance serta Pemantauan pelaksanaan pengelolaan risiko yang dilakukan secara berkala melalui kegiatan Pelaporan kepada Manajemen Perusahaan dan fungsi ERM PT Pertamina (Persero).

Keberhasilan program penerapan manajemen risiko perusahaan salah satunya ditentukan oleh peran aktif Direksi. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang meliputi antara lain penetapan manajemen risiko di seluruh aktifitas dan kepentingan Perusahaan; penetapan penggunaan metode pengukuran dan system informasi manajemen risiko; penetapan toleransi risiko; mitigation plan dan penyusunan rencana darurat (contingenncy plan) dalam kondisi yang terburuk; serta penerapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko Revisi I (Pertama) Nomor A-001/A1000/2017-S0.

ORGANISASI PENGELOLAAN RISIKO

Pedoman Manajemen Risiko Revisi I (Pertama) Nomor A-001/A1000/2017-S0 mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan proses dan system manajemen risiko yang efektif, dibentuk:

- a. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) yang dibentuk oleh Direksi yang beranggotakan para Manajer Fungsi atau setingkat Manajer dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dalam menerapkan manajemen risiko, baik level korporat maupun level proses yang diketuai oleh salah satu Manajer yang diangkat dan atau ditunjuk oleh Direksi.
- b. Manajemen Risiko Korporat (*Corporate Risk Management*) adalah Fungsi yang secara organisasi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk antara lain menyusun profil risiko perusahaan, memantau posisi risiko perusahaan, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Komite Manajemen Risiko berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di tingkat Korporat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Fungsi *Legal, Compliance & Risk Management* atau Manajer Fungsi lainnya yang diangkat dan/atau ditunjuk oleh Direksi.
- c. Sub Fungsi Manajemen Risiko adalah pelaksana pengelolaan & penerapan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan yang berada dibawah Fungsi *Legal, Compliance & Risk Management*.

PROSES PENYUSUNAN RISK REGISTER & TOP RISK

Korporat dalam Pedoman Manajemen Risiko Revisi I (Pertama) Nomor A-001/A1000/2017-S0 bahwa: 1). Risk Register disusun oleh setiap Fungsi yang berisi semua risiko (*all risk*) di Fungsi tersebut untuk selanjutnya diagregasikan menjadi Risk Register Korporat Perusahaan; 2). Risk Register yang telah disusun oleh setiap Fungsi tersebut dilaporkan kepada fungsi ERM Pertamina untuk kemudian memasukkannya ke dalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (*Enterprise Risk Management System*); 3). Kegiatan input *Risk Register* kedalam Sistem Informasi Manajemen Risiko (*Enterprise Risk Management System*) diselenggarakan oleh Fungsi ERM Pertamina melalui username dan pada waktuwaktu yang dijadwalkan kemudian;



PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI ERM

Beberapa perkembangan penting dalam implementasi ERM di Perusahaan selama tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- 1. Kecukupan Pemantauan dan Pengendalian Risiko yang besumber dari aktifitas utama perusahaan, yakni:
 - a. Tersusunnya Pedoman Manajemen Risiko Revisi I (Pertama) Nomor A-001/A1000/2017-S0;
 - b. Tersusunnya Risk Register & Top Risk Korporat 2020 melalui ERM System (ERM);
- 2. Penyusunan Risk Register Profile PT Pertamina Dana Ventura Tahun Buku 2018 dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang didukung oleh sistem dan arahan dari Fungsi Enterprise Risk Management PT Pertamina (Persero).
- 3. Pelaporan Manajemen Risiko kepada manajemen dan Fungsi Enterprise Risk Management PT Pertamina (Persero) secara Triwulanan dalam bentuk Laporan Realisasi Mitigasi dari tiap-tiap Risk Register Profile Perusahaan untuk Tahun Buku 2020, dengan capaian Performance KPI Enterprise Risk Management pada tahun 2020 sebesar 100%.
- 4. Terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja perusahaan terkait pengembangan dan Upskilling berbasis manajemen risiko.

RENCANA KE DEPAN

- 1. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan shareholders dan stakeholders Perusahaan, pengelolaan Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance Perusahaan terus ditingkatkan sejalan dengan dan bagian dari pengembangan bisnis Perusahaan. Upaya pengembangan pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan dilakukan melalui upaya peningkatan kegiatan sosialisasi dan internalisasi budaya sadar risiko kepada seluruh pekerja Perusahaan termasuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dalam bidang Manajemen Risiko, serta meningkatkan pengawasan terhadap prosesproses bisnis yang ada dan sedang berjalan serta melakukan penyusunan Sistem Tata Kerja Manajemen Risiko secara lengkap dan terstruktur sesuai panduan Fungsi Enterprise Risk Management PT Pertamina (Persero).
- 2. Selain hal tersebut, kepatuhan Perusahaan terhadap mekanisme pelaporan terhadap seluruh kewajiban yang timbul sehubungan dengan restrukturisasi Perusahaan berdampak pada penyesuaian risk register terkait dengan ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan sehingga perlu dipastikan bahwa aktivitas proses bisnis telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan termasuk batas kewenangan pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan, Pedoman dan Prosedur yang berlaku di Perusahaan.

PENGELOLAAN RISIKO KORPORAT

Perusahaan telah menetapkan Strategi penerapan manajemen risiko yang merupakan langkah-langkah implementasi dari manajemen risiko untuk mengendalikan risiko, agar profil risiko berada pada batas yang telah ditetapkan. Strategi manajemen risiko ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko. Strategi penerapan manajemen risiko mencakup:

- 1. Penetapan Top Risk, Risk Attitude, Risk Appetite, dan Risk Tolerance;
- 2. Penetapan rencana penanganan risiko (risk treatment);
- 3. Penyusunan Profil Risiko sebelum dan setelah dilakukan penanganan risiko (risk treatment);
- 4. Pembuatan skala prioritas (prioritas risiko) dalam penanganan risiko;
- 5. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kerangka manajemen risiko;
- 6. Pelaporan pelaksanaan pengelolaan risiko;
- 7. Strategi manajemen risiko dapat dievaluasi secara berkala apabila dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan kebijakan Perusahaan.

Perusahaan juga telah menetapkan Kategori Risiko dalam proses bisnis perusahaan sebagaimana diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko Revisi I (Pertama) Nomor A-001/A1000/2017-S0, sebagai berikut:



- Governance Risk (Risiko Tata Kelola)
 adalah risiko yang disebabkan oleh kurang atau tidak patuhnya terhadap aturan Tata Kelola Perusahaan (Corporate
 Governance) dan Etika Bisnis (Business Ethics) dalam pengelolaan Perusahaan.
- Strategy and Planning Risk (Risiko Perencanaan dan Strategi)
 adalah risiko terkait dengan perencanaan strategis Perusahaan antara lain corporate responsibility & sustainablility,
 external factors, planning, project, dan strategy.
- 3. Financial Risk (Risiko Finansial)
 adalah risiko terkait dengan kegiatan bisnis antara lain accounting, credit, liquidity & finance intelligence, financial market, planning & budgeting, dan operational yang mengakibatkan kerugian keuangan Pertamina bagi Perusahaan.
- 4. Operational/Infrastructure Risk (Risiko Operasional dan Infrastruktur) adalah risiko terkait dengan kegiatan operasional dan prasarana Pertamina antara lain corporate assets, human resources, information technology, external events, legal, process management, product development, dan sales, marketing and communications.
- Compliance Risk (Risiko Kepatuhan)
 adalah risiko terkait dengan kegiatan bisnis Perusahaan yang disebabkan oleh kurang atautidak patuhnya terhadap
 peraturan.
- 6. Reporting Risk (Risiko Pelaporan) adalah risiko terkait dengan kewajiban Perusahaan untuk menyampaikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/shareholder.

Terkait dengan pemantauan penerapan risiko (monitoring risk), Perusahaan melakukan pelaporan realisasi mitigasi risiko all risks dan top risks dalam Risk Register Korporat yang telah disetujui oleh Direksi kepada Fungsi ERM Pertamina, pelaporan dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan Risk Register Korporat yang telah di agregasi-kan dalam Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko (Enterprise Risk Management System), Penyusunan Rencana Mitigasi menggunakan Form yang telah ditentukan oleh Fungsi ERM Pertamina, dokumen pelaporan ini menjadi bagian yang digunakan oleh Fungsi ERM Pertamina untuk mengukur parameter Risk Treatment dalam KPI Shared Risk Management Implementation.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota manajemen lainnya serta seluruh personil Perusahaan, yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Penerapan Sistem Pengendalian Internal efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen.

Perusahaan melakukan dan melaksanakan sistem pengendalian internal oleh fungsi auditor internal yang melakukan audit terhadap kegiatan usaha Perusahaan dan laporan keuangan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan rencana audit tahunan, hasil audit dilaporkan kepada Direktur dan dikomunikasikan juga dengan Komite Audit sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris.

Audit dilakukan dengan ruang lingkup keseluruhan kegiatan Perusahaan yang difokuskan pada aspek dan unsur kegiatan yang memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap kepentingan Perusahaan. Internal Audit Perusahaan telah melakukan fungsi pengawasan. secara independen dengan cakupan tugas yang memadai sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit dalam Rencana Audit dan Konsultasi Tahunan (RAT).

FUNGSI INTERNAL AUDIT

Internal Audit bertugas merencanakan, mengelola. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengendalian internal (audit) sesuai dengan standar audit terhadap seluruh proses bisnis Perusahaan, pedoman dan kebijakan perusahaan untuk memastikan terlaksananya seluruh kegiatan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada di Perusahaan dalam mengamankan misi dan tujuan Perusahaan serta merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan kegiatan Perusahaan.

LAPORAN PELAKSANAAN DAN REALISASI HASIL **AUDIT INTERNAL**

a. Ruang Lingkup dan Jenis Audit/Konsultasi

Audit dilakukan terhadap operasional Perusahaan untuk melihat apakah operasional dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati serta melihat efektifitas pengendalian manajemennya serta preaktek kerja yang lebih memperhatikan dan mencermati risiko. Audit diutamakan pada hal-hal yang memerlukan perbaikan. Adapun ruang lingkup pekerjaan adalah:

1. Menentukan dan merencanakan program audit

- secara keseluruhan yang akan dilakukanKegiatan konsultasi (Formal dan Informal).
- 2. Audit atas aktivitas Treasury.
- 3. Aktivitas Konsultansi, Penyesuaian Soft Structure Internal Audit & Risk Management, Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit dan Pendampingan Auditor Eksternal.

b. Metodologi Audit & Konsultasi

1. Kegiatan assurance.

Dalam pelaksanaan kegiatan assurance, Internal Audit menggunakan metode dan pendekatan dimana prioritas auditee yang diperiksa adalah auditee yang memiliki tingkat risiko paling tinggi. Tujuan kegiatan audit yang dilakukan oleh Internal Audit adalah sebagai berikut:

- a. Menilai efektivitas dan kualitas Risk Management.
- b. Menilai efektivitas dan kecukupan Internal
- 2. Kegiatan Konsultasi dan Pendampingan

Jasa konsultasi dan Pendampingan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan/permintaan user, sepanjang tidak mengganggu independensi dan objektivitas Internal Audit dalam pelaksanaan audit.

c. Realisasi Pelaksanaan Audit

Penyelesaian temuan audit internal menjadi komitmen seluruh fungsi Perusahaan untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan dan perwujudan aspek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal.Sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 2020, Fungsi Internal Audit telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1. Audit Umum
- 2. Jasa Konsultasi
- 3. Monitoring tindak lanjut temuan

Kegiatan audit difokuskan dalam konsultasi dan pendampingan dalam proses operasional Perusahaan. Kegiatan Assurance yang dilakukan pada Tahun 2020 dilakukan terhadap aktivitas Treasury, dengan hasil perlu dilakukan updating serta penyempurnaan pedomanpedoman terkait Treasury disesuaikan dengan kondisi Perusahaan serta peremajaan dan pengembangan aplikasi/ system Perusahaan. Penyelesaian temuan audit internal ditindaklanjuti pada Tahun 2020.

I Kode Etik Dan Fakta Integritas

KODE ETIK PERUSAHAAN

Perusahaan telah memiliki kebijakan mengenai potensi benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Kode etik Perusahaan diperbarui dan disempurnakan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Kode etik Perusahaan diterapkan untuk mengarahkan Perusahaan menjadi perusahaan yang dapat memberikan manfaat lebih kepada PT Pertamina (Persero) selaku Pemegang Saham dan Pertamina Group pada umumnya.

Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku Perusahaan tertuang dalam Pedoman Nomor A-001/D0000/2020. Pedoman ini merupakan perwujudan upaya Perusahaan dalam mengimplementasikan GCG dalam setiap aktivitas operasional Perusahaan. Seluruh Insan Perusahaan wajib mengetahui dan memahami Kode Etik Perusahaan sebagai dasar penerapan perilaku yang mengatur hubungan antara pekerja dengan Perusahaan, sesama pekerja, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Sebagai bentuk sosialisasi dan upaya transparansi, Pedoman ini telah diunggah ke website Perusahaan dan dapat diunduh melalui tautan: http://www.pdv.co.id/home/pedoman.

ISI PENTING KODE ETIK PERUSAHAAN

Memuat prinsip-prinsip GCG yang dianut oleh Perusahaan.

- A. Etika usaha terhadap hubungannya dengan stakeholders, yakni:
 - 1. Pemegang Saham;
 - 2. Pekerja;
 - 3. Pelanggan;
 - 4. Pesaing;
 - 5. Penyedia Barang/Jasa;
 - 6. Mitra Bisnis;
 - 7. Kreditur;
 - 8. Investor;
 - 9. Pemerintah;
 - 10. Masyarakat;
 - 11. Media Massa;
 - 12. Organisasi Profesi.
- B. Standar etika usaha Perusahaan terhadap aspek khusus, yakni:
 - 1. Kebijakan akuntasi dan keuangan;
 - 2. Pemberian donasi;
 - 3. Transaksi afiliasi.
- C. Standar Tata Perilaku terkait Hubungan Kerja, yakni:
 - 1. Lingkungan kerja bebas diskriminasi, pelecehan, perbuatan asusila, ancaman dan kekerasan;
 - 2. Hubungan dan kerjasama antar pekerja;
 - 3. Hubungan atasan dan bawahan.
- D. Standar Tata Perilaku terkait Aspek Khusus yakni:
 - 1. Integritas dan komitmen;
 - 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Kerahasiaan data dan informasi;
 - 4. Penggunaan komunikasi elektronik;
 - 5. Benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan;
 - 6. Hadiah/cenderamata, jamuan bisnis/hiburan dan lainnya (gratifikasi);
 - 7. Penyuapan;
 - 8. Aktivitas politik;



- 9. Aktivitas sosial;
- 10. Perlindungan dan penggunaan aset Perusahaan;
- 11. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindung Lingkungan (K3LL);
- 12. Pencatatan data, pelaporan dan dokumentasi;
- 13. Penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, minuman keras dan perjudian;
- 14. Citra perusahaan.
- E. Pelaksanaan etika usaha dan tata perilaku, yakni:
 - 1. Penerapan etika usaha dan tata perilaku;
 - 2. Sosialisasi dan internalisasi;
 - 3. Pelaporan, penanganan dan penegakan pelanggaran;
 - 4. Pembaruan/revisi Code of Conduct.

TUJUAN PENERAPAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Tujuan dari Pedoman etika usaha dan Tata Perilaku adalah:

- 1. Mengembangkan standar perilaku terbaik bagi insan Pedeve yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG, sehingga mendorong terciptanya budaya Perusahaan yang diharapkan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan.
- 2. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.
- 3. Menjabarkan nilai-nilai perusahaan sebagai landasan perilaku yang harus diikuti oleh seluruh insan Pedeve dalam menjalankan aktivitas kerjanya sehari-hari.
- 4. Mendorong perbaikan pengelolaan Perusahaan dan pengembangan nilai yang pada akhirnya akan meningkatkan citra Perusahaan.

Pedoman etika usaha dan tata perilaku selanjutnya menjadi acuan perilaku dalam mengelola Perusahaan dengan cakupan:

- 1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas dipatuhinya etika usaha dan tata perilaku di lingkungan Perusahaan.
- 2. Direksi bertanggung jawab atas penerapan etika usaha dan tata perilaku di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan fungsi Internal Audit.
- 3. Chief of Internal Audit, Manajer dan setingkat Manajer bertanggung jawab atas penerapan etika usaha dan tata perilaku di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
- 4. Setiap insan Pedeve mengisi komitmen kepatuhan terhadap etika usaha dan tata perilaku secara online dengan menggunakan teknologi berbasis komputer. Dengan demikian, setiap insan Pedeve telah memahami dan setuju untuk mematuhinya, untuk selanjutnya didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan sebagai Chief Compliance Officer (CCO).

SOSIALISASI PEDOMAN KODE ETIK

Kode Etik Perusahaan disebarkan kepada semua insan Pedeve melalui berbagai media. Media sosialisasi penyebaran kode etik antara lain melalui:

- 1. Website
- 2. Buku saku
- 3. Banner

Untuk mewujudkan perilaku yang berlandaskan kode etik tersebut, terdapat sejumlah inisiatif strategis yang dilakukan Perusahaan, antara lain melalui:

- 1. Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi serta pekerja untuk menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik dalam setiap langkah Perusahaan, yang tertuang dalam Pakta Integritas yang diperbarui setiap awal tahun.
- 2. Keteladanan Pimpinan dengan memberi contoh sikap dan perilaku yang tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan Perusahaan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- 3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pekerja Perusahaan yang diperbarui setiap tahun.



PENANDATANGANAN KOMITMEN KODE ETIK PERUSAHAAN

Untuk menunjukkan komitmennya, Dewan Komisaris menandatangani pernyataan dalam Pakta Integritas bahwa tidak memiliki benturan/konflik kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan/konflik kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada RUPS/Pemilik Modal. Dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan, disampaikan pula pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/ atau pengendali satu sama lainnya, sebagaimana yang disampaikan pada tabel berikut:

	Hubungan Dengan						Hubungan keluarga Dengan					
Nama	Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Υ	N	Υ	N	Υ	N	Υ	N	Υ	N	Υ	N
Cornelius Simanjuntak	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧

MEKANISME SANKSI

Perusahaan telah menyiapkan mekanisme penegakan atas tindakan yang tidak sesuai Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku, antara lain:

- 1. Setiap insan Pedeve dapat melaporkan melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS) apabila ditemukan fakta terjadinya penyimpangan etika usaha dan Tata Perilaku. Tim yang ditunjuk Perusahaan akan menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
- 2. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing. Bentuk sanksi yang diberikan akan diatur secara tersendiri.
- 3. Insan Pedeve yang melakukan penyimpangan etika usaha dan tata perilaku memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung, sebelum diberikan tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.
- 4. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh fungsi Corporate Secretary & Business Supports.

Dalam kurun waktu periode pelaporan, Perusahaan telah menerima nihil (0) laporan terkait dugaan pelanggaran pedoman etika usaha dan tata perilaku.

KONSISTENSI PENERAPAN GCG DAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan praktik-praktik terbaik GCG dan secara konsisten melaksanakan kode etik Perusahaan pada setiap kegiatan Perusahaan. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui:

- 1. Membangun hubungan kerja sama dengan pihak eksternal dan menjadi narasumber/peserta pada berbagai aktivitas berskala nasional terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Selama tahun 2020, tercatat ada nihil (0) pejabat Perusahaan yang menjadi narasumber berbagai aktivitas berskala nasional terkait upaya pemberantasan korupsi.
- 2. Pelaksanaan Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Gratifikasi.
- 3. Implementasi UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. PT Pertamina (Persero) telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor Kpts-70/C00000/2017-S0 tertanggal 30 Nopember 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Pertamina termasuk bagi pejabat perusahaan di lingkungan Perusahaan, yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero).



4. Board Manual.

Merupakan dokumen kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi mengenai pedoman dan mekanisme hubungan kerja antar kedua organ, tugas pokok dan tanggung jawab.

5. Code of Corporate Governance.

Merupakan struktur dan proses yang digunakan oleh organ Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya.

PAKTA INTEGRITAS DAN TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perusahaan secara khusus mewajibkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses dan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk menandatangani Pakta Integritas. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan praktik kecurangan dan/atau ketidaksesuaian yang mungkin dapat terjadi.

Melalui mekanisme pakta integritas dan tata kelola pengadaan barang, tidak ada kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terindikasi praktik kecurangan dan/atau ketidaksesuaian dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan.

PENCEGAHAN KORUPSI

Setiap insan Pedeve harus menjunjung integritas serta tidak diperbolehkan mentoleransi perbuatan suap. Perusahaan mendorong agar pekerja menyampaikan laporan jika mengetahui adanya tindakan korupsi atau tindakan yang berpotensi pada terjadinya korupsi. Perusahaan melindungi identitas pekerja yang memberikan laporan.

Perusahaan melarang pekerja untuk memberi atau menerima suap. Adapun pemberian sumbangan atau donasi dan sejenisnya diperbolehkan selama hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan mengatur pencegahan korupsi melalui Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest).

Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) Nomor A-003/D0000/2020 mengatur hal-hal yang terkait dengan penolakan, penerimaan, pemberian dan permintaan hadiah/cenderamata dan hiburan (entertainment), serta batasan penerimaan, pemberian dan pemberian atas permintaan dari pihak ketiga.

Pedoman ini memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan Pedeve yang berkenaan dengan gratifikasi, penerimaan, pemberian, dan permintaan hadiah/ cenderamata dan hiburan (entertainment) di lingkungan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), sehingga dapat mendorong terlaksananya etika bisnis yang tinggi dan mencegah timbulnya konflik kepentingan, kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.

Insan Pedeve bilamana menemui kondisi Konflik Kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman Conflict of Interest wajib melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Corporate Secretary & Business Support selaku pejabat yang ditunjuk oleh Direktur (Chief Compliance Officer) yang bertanggungjawab atas program kepatuhan perusahaan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan pekerja mematuhi peraturan dan ketentuan baik pemerintah, Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku serta perilaku organisasi sesuai dengan Pedoman yang berlaku di perusahaan.



Rekapitulasi Laporan konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) Pribadi, Keluarga dan/atau golongan dengan posisi Jabatannya di Perusahaan periode Januari sampai dengan Desember 2020, sebagai berikut:

Laporan Konflik Kepentingan Tahun 2020											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
NIHII											

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT PERUSAHAAN

Sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Pedeve juga memiliki kebijakan tentang kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Penerapan kebijakan ini mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor: Kpts - 70/C00000/2017-S0 tertanggal 30 Nopember 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di lingkungan Pertamina Group. Surat keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pejabat Perusahaan yang berkewajiban menyampaikan LHKPN adalah:

- a. Direksi
- b. Manajer/setara
- c. Komisaris yang tidak sekaligus menjabat sebagai Direksi Pertamina dan bukan pejabat tugas perbantuan.

EVALUASI PEDOMAN ETIKA DAN TATA PERILAKU

Periode terakhir Perusahaan melakukan penyesuaian atas Pedoman etika dan tata perilaku yakni pada tahun 2019, kegiatan dilakukan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana kesesuaian Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dengan kebutuhan Perusahaan serta efektivitas dari program implementasi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

Dalam evaluasi atas Pedoman Etika dan Tata Perilaku, Perusahaan menerima berbagai masukan, kritik dan saran dari pemangku kepentingan terkait agar target penerapan implementasi Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dalam aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari dapat tercapai.

Tata Kelola Perusahaan

Whistleblowing System

Whistleblowing System dibentuk sebagai suatu sistem untuk penanganan pengaduan yang lebih tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab. Setiap laporan yang masuk melalui mekanisme WBS ditangani sesuai dengan Tata Kerja Organisasi (TKO) Whistleblowing System (WBS) yang telah diperbaharui di tahun 2020 melalui TKO Nomor B-003/D0000/2020.

Pengaduan dan pelaporan yang dimaksud berasal dari pihak internal maupun eksternal Perusahaan dan Anak/Afiliasi Perusahaannya terkait pelanggaran terhadap ketentuan hukum, ketentuan internal Perusahaan, maupun ketentuan etika dan Code of Conduct Perusahaan.

Perusahaan memiliki WBS sebagai sistem pelaporan yang berdiri sendiri dan dikelola secara independen serta terlepas dari sistem dan mekanisme WBS Perusahaan induk, yakni PT Pertamina (Persero) sebagai Pemegang Saham Mayoritas.

WBS yang dibangun Perusahaan dibentuk sebagai suatu sistem untuk penanganan pengaduan yang lebih tanggap, transparan, aman dan bertanggung jawab. Setiap laporan yang masuk melalui mekanisme WBS ditangani sesuai dengan Prosedur Whistleblowing System (WBS) yang berlaku di lingkungan perusahaan.

Implementasi TKO Whistleblowing System Nomor B-003/D0000/2020 yang diberlakukan di Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor Kpts-011/A0000/2020 tanggal 25 Nopember 2020 tentang Whistleblowing System. Prosedur ini mendorong peran serta pejabat dan atau seluruh Insan PT Pertamina Pedeve Indonesia untuk mencegah dan turut serta dalam kegiatan pemerintah melakukan program pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang melalui pengelolaan pengaduan, pelaporan dan atau penyingkapan terhadap setiap tindakan/ perbuatan melawan hukum, perilaku tidak etis secara rahasia dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, TKO WBS ini dijalankan oleh fungsi Corporate Secretary & Business Support selaku Chief Compliance Officer yang ditunjuk oleh Direksi. Secara teknis, Corporate Secretary & Business Support selaku Chief Compliance Officer menerima dan mencatat seluruh pengaduan, pelaporan atau penyingkapan yang masuk melalui sarana/media sebagai berikut:



Seluruh pengaduan, pelaporan atau penyingkapan yang masuk melalui sarana-sarana tersebut diatas dilakukan verifikasi (Pengumpulan bahan dan Keterangan/ Pulbaket) dan kemudian dilakukan telaahan sebagai data awal bagi Corporate Secretary & Business Support selaku Chief Compliance Officer untuk memastikan apakah pengaduan, pelaporan atau penyingkapan yang masuk dapat ditindaklanjuti atau tidak. Seluruh pengaduan, pelaporan atau penyingkapan akan dituangkan ke dalam format standard laporan secara periodik minimal setiap 1 (satu) bulan yang memuat laporan antara lain meliputi 1) jumlah pengaduan/ penyingkapan, 2) kategori pengaduan/penyingkapan dan 3) saluran yang digunakan oleh Pelapor serta menyampaikannya kepada Corporate Secretary & Business Support selaku Chief Compliance Officer.



Lingkup pengaduan/pelaporan WBS Perusahaan yang ditindaklanjuti hanya terkait dugaan pelanggaran hukum, ketentuan internal Perusahaan, serta ketentuan etika dan code of conduct yang diduga dilakukan oleh Insan Pedeve, khususnya untuk kasus:

- 1. Korupsi;
- 2. Suap;
- 3. Gratifikasi;
- 4. Konflik Kepentingan;
- 5. Pencurian;
- 6. Kecurangan/Fraud;
- 7. Pelanggaran etika dan code of conduct yang berlaku di Pedeve dan/atau Anak Perusahaan.

Laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti dalam WBS dan ditangani oleh fungsi terkait, jika terkait dengan lingkup kedinasan, antara lain:

- 1. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum di bidang lingkungan hidup;
- 2. Perselisihan pribadi antar Insan Pedeve atau antara Insan Pedeve dengan pihak ketiga di luar lingkup kedinasan, permasalahan fasilitas SDM dan Perusahaan.

Rekapitulasi Laporan Bulan Whistleblowing System periode Januari sampai dengan Desember 2020 terhadap setiap pengaduan, pelaporan atau penyingkapan sebagaimana dimaksud dalam TKO Whistleblowing System dapat dilaporkan sebagai berikut:

No	ı	umlah & Salura	an Penerima	Kategori lingkup Pengaduan/ penyingkapan		Keterangan	
	Telephone	Website	Email	Facs	SMS	Sesuai	Tidak Sesuai
NIHIL							

a. Perlindungan Bagi Whistleblower

Perusahaan (Pedeve) menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan. Pedeve tidak akan melakukan upaya apapun untuk mencari identitas asli pelapor jika pengaduan bersifat anonim. Meskipun demikian, Pedeve dapat meminta informasi kepada pelapor mengenai tata cara untuk dapat menghubungi pelapor apabila diperlukan sehubungan dengan keperluan klarifikasi lebih lanjut atas aduan/laporan yang disampaikan.

Tindak lanjut atas setiap aduan/laporan pada WBS wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan asas-asas WBS Pedeve sebagaimana diatur di dalam Pedoman WBS Pedeve.

b. Penanganan Pelaporan/Pengaduan

Pihak yang mengelola pengaduan sistem WBS Pedeve adalah Fungsi Sekretaris Perusahaan dalam hal ini Corporate Secretary & Business Support selaku *Chief Compliance Officer* (CCO). Pelaporan/pengaduan yang masuk ke dalam sistem WBS Pedeve memiliki potensi untuk menimbulkan benturan kepentingan antara para pihak yang terkait dengan sistem WBS Pedeve. Berdasarkan hal tersebut, maka diatur mekanisme tindak lanjut khusus untuk kondisi-kondisi tertentu sebagai berikut:

- Aduan/laporan yang berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan Direksi dan/atau anggota Direksi akan diserahkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
- Aduan/laporan yang berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan Dewan Komisaris akan diserahkan oleh Direktur Utama kepada para pemegang saham Pedeve.
- Aduan/laporan yang berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota Fungsi Corporate Secretary & Business Support yang diserahkan oleh Direktur Utama kepada Internal Audit.

c. Sanksi/tindak Lanjut atas Pengaduan yang telah Selesai Diproses pada Tahun Buku 2020

Setiap pelaporan yang terbukti akan ditindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak terlapor, sesuai Aturan Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku. Sepanjang tahun 2020, tidak terdapat pengaduan/pelaporan yang disampaikan melalui WBS Pedeve.

Tata Kelola Perusahaan

Akses Informasi Dan Data Perusahaan

Pedeve berkomitmen untuk memberikan akses data dan informasi kepada para stakeholders sebagai bagian dari bentuk transparansi dan upaya peningkatan penerapan GCG yang telah dilakukan selama ini. Namun di sisi lain, Pedeve juga menerapkan manajemen data untuk menjaga informasi penting yang wajib dirahasiakan.

Dalam rangka mendukung komitmen penerapan keterbukaan informasi, maka seluruh akses untuk mendapatkan informasi Perseroan dibuka semaksimal mungkin. Seluruh informasi mengenai Perseroan, publikasi, produk, aksi korporasi ataupun berupa keluhan, saran dan kritik membangun dapat di akses melalui Care Center Perseroan :

Website : http://www.pdv.co.id

Email: pdv@pdv.co.id • Telepon: (021) 391 1857 • Fax: (021) 391 1859

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perseroan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa selalu mengacu kepada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Keputusan sesuai Keputusan Direksi No. Kpts-004/PDV/DIRUT/2008 tanggal 17 Juni 2008. Pada prinsipnya Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi calon penyedia barang/jasa sesuai prinsip dasar pengadaan antara lain : efisien, kompetitif, transparan, adil, bertanggung jawab, kehati-hatian dan kemandirian.

- 1. Prinsip dasar dimaksud dilandasi dengan etika bisnis yang baik antara lain :
 - a. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan tidak sehat;
 - b. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai wewenang;
 - c. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest);
 - d. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian Perusahaan;
 - e. Tidak menyalahgunakan wewenang;
 - f. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberikan hadiah, imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- 2. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan metode:
 - a. Pelelangan; dilakukan untuk mengadakan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Pemilihan Langsung; dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Penunjukan langsung; dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - Cash & Carry, untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Kontrak/SPK, untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

DASAR LANDASAN HUKUM

- 1. Surat Keputusan No. Kpts-004/PDV/Dirut/2008 tanggal 17 Juni 2008 Tentang Revisi Pertama Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.
- 2. Pedoman No A-001/PDV/SP/2008-S0 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- 3. Prosedur No. B-001/PDV/SP/2008-S0 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Metode Pemilihan Langsung /Pelelangan.
- 4. Prosedur No. B-002/PDV/SP/2008-SO Tentang Pengadaan Jasa Konsultasi Metode Pelelangan/Pemilihan Langsung.
- 5. Prosedur No. B-003/PDV/SP/2008-S0 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Metode Penunjukan Langsung.
- 6. Prosedur No. B-004/PDV/SP/2008-S0 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dengan Cash&Carry.
- 7. Instruksi Kerja No. C-001/PDV/SP/2008-S0 Tentang Penyusunan OE/HPS (Harga Perhitungan Sendiri).
- 8. Instruksi Kerja No. C-002/PDV/SP/2008-S0 Tentang Negosiasi.

Tata Kelola Perusahaan

■ Permasalahan Hukum & Lainnya

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN TAHUN 2020

No	Perkara Hukum	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
1.	Perseroan sebagai Tergugat II dalam Perkara: 636/ Pdt.G/2018/PN JKT.SEL yang diajukan oleh 127 orang Peserta Tabungan Pegawai Pertamina yang terdaftar dalam individual account per 15 Juli 2002	 Putusan Pengadilan yang memenangkan Perseroan akan memberikan kepastian atas status Tabungan Pegawai Pertamina; Adanya biaya yang harus ditanggung Perseroan. 	 BELUM SELESAI Monitoring Banding Perkara dimenangkan oleh Perusahaan. Dalam Putusannya Majelis Hakim menerima Eksepsi Perusahaan untuk sebagian dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. Penggugat menyatakan Banding atas putusan dimaksud. Berkas Kontra Memori Banding telah dikirim dan diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 03 Desember 2020. Kontra Memori Banding telah didaftarkan di PN Jakarta Selatan tgl 23 November 2020 	Tidak Ada
2.	Permohonan Banding atas Gugatan wanprestasi Terhadap PT Duamitra Oil (DMO) dan Para Penanggung (Personal Guarantee) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan nomor 544/PDT.G/2017.	Perseroan menjadi terkendala untuk melakukan eksekusi personal guarantee; Adanya biaya yang harus ditanggung Perseroan	Putusan Pengadilan memenangkan Perseroan. Menghukum Para tergugat membayar utangnya kepada Perseroan sebesar Rp.9.565.160.043,- secara tanggung renteng dengan kewajiban masingmasing sebesar Rp. 2.391.290.010,75. Perkara Banding diputuskan dan dimenangkan oleh Perseroan. Putusan PT DKI Jakarta No.415/PDT/2019/PT DKI menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 544/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Namun demikian PN JakPus belum dapat mengeluarkan Surat yang menyatakan Perkara telah <i>Incraht</i> , disebabkan Relass Delegasi pemberitahuan kepada Para Penanggung Jawab PT DMO dari PN Bontang & PN Samarinda belum kembali ke PN Jakarta Pusat. Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT DMO telah diturunkan penuh nilainya (full impairment)	Tidak Ada
3.	PT Gatramas Internusa (GTR) oleh salah satu kreditur, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.06/Pdt.Sus-Pem. Perdamaian/2017/ PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 07 November 2017 PT GTR dinyatakan pailit	Adanya biaya yang harus ditanggung Perseroan	SELESAI & UPAYA RECOVERY Piutang Perseroan kepada PT GTR diakui oleh Pengadilan sebesar Rp.37.805.506.042, Saat ini dalam Proses likuidasi aset PT GTR dalam Pailit oleh Kurator - Pelelangan Aset Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT GTR telah diturunkan penuh nilainya (full impairment)	Tidak Ada

PERMASALAHAN LAINNYA: MERUPAKAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERSEROAN TERKAIT AKTIFITAS USAHA YANG DILAKUKAN SEBELUM PERSEROAN BERUBAH BENTUK **MENJADI PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA YANG TERDIRI DARI:**

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
1.	Gugatan wanprestasi Terhadap PT Inpar Saka (IS) dan Para Penanggung (Personal Guarantee) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Oktober 2017 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 570/PDT.G/2017.	 Putusan Pengadilan memenangkan Perseroan Menghukum tergugat membayar seluruh hutang kepada PT Pedeve sebesar Rp, 35,5 Milyar secara tanggung menanggung Adanya biaya yang harus ditanggung Perseroan. 	 SELESAI & UPAYA RECOVERY Perkara dimenangkan oleh Perusahaan (sudah berkekuatan hkum tetap / inkracht). Para Tergugat tidak mengajukan banding, dan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap Perseroan terkendala melakukan eksekusi PT IS dan Para Penanggung (Personal Guarantee) dikarenakan aset Jaminan yang tidak executable serta tidak diketahui aset-aset milik Para Penanggung (Personal Guarantee) Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT IS telah diturunkan penuh nilainya (full impairment). 	Tidak Ada
2.	Permohonan arbitrase atas PT Vialine Mandiri Agung Selaras (VMAS) ke BANI pada tanggal 22 jan 2016 dengan perkara No. 787/I/ RB-BANI/2016	Putusan arbitrase memenangkan Perseroan Menghukum PT VMAS, Bindu VL. Simanungkalit, Basar Situmeang secara tanggung renteng membayar kewajibannya kepada PDV sebesar Rp. 10.657.225.664 Menghukum Para tergugat secara tanggung renteng mengembalikan ½ bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp. 299.476.000 Adanya biaya yang harus ditanggung Perseroan	• SELESAI & UPAYA RECOVERY • Sdr. Bindu VL. Simanungkalit selaku Penanggung jawab PT VMAS mengajukan mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase terhadap Perseroan, mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perseroan serta melaporkan Perseroan kepada Pihak Kepolisian, sehingga Perseroan belum dapat mengajukan Eksekusi Putusan Arbitrase dan Aset-Aset Jaminan PT VMAS • Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT VMAS telah diturunkan penuh nilainya (full impairment).	Tidak Ada

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
3.	Permohonan arbitrase atas PT Sarjo Indah (SI) ke BANI dengan nomor pendaftaran Arbitrase di Sekretariat BANI No.722/VI/ARB-BANI/2015 tanggal 26 Juni 2015	 Putusan arbitrase memenangkan Perseroan Menghukum PT SI membayar kerugian sebesar Rp. 26.184.503.937 Menghukum PT SI membayar biaya adm sebesar ½ bagian atau sebesar Rp. 301.808.000 	SELESAI & UPAYA RECOVERY Perkara dimenangkan oleh Perusahaan (berkekuatan hukum tetap / incracht) Saat ini proses Lelang Eksekusi Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT SI telah diturunkan penuh nilainya (full impairment).	Tidak Ada
4.	Permohonan arbitrase atas PT Tata Wirautama (TWU) ke BANI dengan nomor pendaftaran Arbitrase di Sekretariat BANI No.732/VII/ ARB-BANI/2015 tanggal 14 Juli 2015	 Putusan arbitrase memenangkan Perseroan Menghukum PT TWU membayar kerugian sebesar Rp. 11.635.550.122 Menghukum PT TWU membayar biaya adm sebesar ½ bagian atau sebesar Rp. 213.683.500,- kepada PDV. 	SELESAI & UPAYA RECOVERY Perkara dimenangkan oleh Perusahaan (berkekuatan hukum tetap / incracht) Perseroan telah mengajukan permohonan eksekusi Putusan BANI, dan Aanmanning telah dilakukan PN Jakarta Selatan, namun para tergugat/termohon tidak hadir dan aset milik Para Penanggungjawab PT TWU tidak diketahui. Perseroan telah berkoordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara (melalui Kasi Datun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan), Tim JPN telah melakukan upaya menghubungi penaqngung jawab PT TWU diketahui PT TWU tidak lagi beroperasi. Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT TWU telah diturunkan penuh nilainya (full impairment).	Tidak Ada
5.	Permohonan arbitrase atas PT Indobuana Jaya Perkasa (IJP) ke BANI dengan nomor pendaftaran Arbitrase di Sekretariat BANI 723/VI/ ARB-BANI/2015 tanggal 26 Juni 2015	 Putusan arbitrase memenangkan Perseroan Menghukum PT IJP membayar kerugian sebesar USD 89,931.75,- Menghukum PT IJP untuk menyerahkan sisa aset jaminan yang belum diserahkan dan menyatakan sah penguasaan aset untuk selanjutnya Perseroan dapat menjual sendiri aset jaminan tersebut. Menghukum PT IJP membayar biaya adm sebesar ½ bagian atau sebesar Rp. 47.183.000,- kepada Perseroan. 	 SELESAI & UPAYA RECOVERY Perkara dimenangkan oleh Perusahaan (berkekuatan hukum tetap / incracht). Perseroan telah berkoordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara (melalui Kasi Datun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan), JPN telah memperoleh identitas Direktur PT IJP, hasil penelusuran identitas melalui dukcapil, alamat terdaftar di dukcapil berbeda dengan di copy KTP namun setelah dilakukan pemanggilan kealamat tsb tetap ybs tidak dikenal oleh RT setempat. Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di PT IJP telah diturunkan penuh nilainya (full impairment). 	Tidak Ada

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan	
6.	Obligasi subordinasi – Bank Global Pada tanggal 31 Desember 2004, Perusahaan melakukan penyisihan terhadap obligasi subordinasi I sebesar Rp70.000.000 disebabkan oleh status pembekuan PT Bank Global International Tbk yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan Desember 2004. Pada bulan September 2005, Perusahaan mendapatkan penjelasan dari Wali Amanat obligasi subordinasi I, PT Bank CIMB Niaga Tbk, bahwa obligasi subordinasi I tidak termasuk dalam investasi yang dijamin oleh Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah - UP3.	 sejak tahun 2005, Perusahaan telah melakukan penyisihan penuh terhadap investasinya di PT Bank Global Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi tersebut telah diturunkan penuh nilainya 	SELESAI & UPAYA RECOVERY Perseroan melakukan monitoring melalui PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Wali Amanat Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi di Bank Global telah diturunkan penuh nilainya (full impairment).	Tidak Ada	
7.	MTN PT Goro Batara Sakti (GBS) Pada tanggal 26 Juli 2006, PT GBS dinyatakan pailit dan piutang MTN PT Goro Batara Sakti diakui oleh Kurator dan Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, masing-masing sebesar Rp26.800.000. Pembayaran piutang akan dilakukan secara proporsional dari hasil penjualan aset Pada tanggal 12 Juli 2005, Perusahaan, pemegang saham lama BPI dan manajemen BPI menandatangani kesepakatan bersama yang disahkan oleh Akta Notaris dari Tetty Herawaty No.33 dan 34 ("Akta 33 dan 34") yang merupakan bundling penyelesaaan MTN HOLI PHARMA GRUP, MTN PT GBS dan Deposito BPI.	Karena Para pihak dalam Akta 33 & 34 tidak memenuhi kewajiban, maka Perusahaan melakukan upaya gugatan ke Pengadilan. No. Perkara : 204/ Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst No. Perkara : 50/ Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst	Putusan Perkara: 204/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, MA memutus menolak permohonan kasasi dari Para Tergugat, dan menghukum Para Tergugat membayar investasi Perusahaan sebesar Rp.81,7 Milyar. Putusan Perkara: 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst, PN Jakarta Pusat memutus secara verstek Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Rp. 48,63 Milyar Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi ex. MTN Holi pharma Grup, MTN GBS dan Deposito BPI telah diturunkan penuh nilainya (full impairment).	Tidak Ada	

		Pengaruh Terhadap		Sanksi Administrasi
No	Permasalahan Lainnya	Perseroan	Status Terakhir	terhadap Perseroan
8.	HOLI PHARMA GRUP: MTN PT Holi Pharma (HP), PT Indah Raya Corporindo (IRC), PT Buana Garmndo Sakti (BGS) Pada tanggal 14 Maret 2003, Perusahaan melakukan penempatan Hutang Menengah Berjangka (MTN) yang diterbitkan oleh PT HP, PT IRC, dan PT BGS, masing-masing sebesar Rp10.000.000. MTN tersebut jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2005 dengan tingkat bunga masing- masing sebesar 17,60% per tahun. Pada tahun 2004. Pada tanggal 12 Juli 2005, Perusahaan, pemegang saham lama BPI dan manajemen BPI menandatangani kesepakatan bersama yang disahkan oleh Akta Notaris dari Tetty Herawaty No.33 dan 34 ("Akta 33 dan 34") yang merupakan bundling penyelesaaan MTN HOLI PHARMA GRUP, MTN PT GBS dan Deposito BPI.	Karena Para pihak dalam Akta 33 & 34 tidak memenuhi kewajiban, maka Perusahaan melakukan upaya gugatan ke Pengadilan. No. Perkara: 204/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst No. Perkara: 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst	Putusan Perkara: 204/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, MA memutus menolak permohonan kasasi dari Para Tergugat, dan menghukum Para Tergugat membayar investasi Perusahaan sebesar Rp.81,7 Milyar. Putusan Perkara: 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst, PN Jakarta Pusat memutus secara verstek Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Rp. 48,63 Milyar Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi ex. MTN Holi pharma Grup, MTN GBS dan Deposito BPI telah diturunkan penuh nilainya (full impairment).	Tidak Ada
9.	Deposito Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) Pada tanggal 12 Juli 2005, Perusahaan, pemegang saham lama BPI dan manajemen BPI menandatangani kesepakatan bersama yang disahkan oleh Akta Notaris dari Tetty Herawaty No.33 dan 34 ("Akta 33 dan 34") yang merupakan bundling penyelesaaan MTN HOLI PHARMA GRUP, MTN PT GBS dan Deposito BPI. Akta 33 menyebutkan bahwa pemegang saham lama BPI akan memberikan penerimaan dividen dari saham saham di BPI dan manajemen BPI setuju untuk memberikan 35% tagihan kredit bermasalahnya kepada semua pihak yang terkait.	Karena Para pihak dalam Akta 33 & 34 tidak memenuhi kewajiban, maka Perusahaan melakukan upaya gugatan ke Pengadilan. No. Perkara : 204/ Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst No. Perkara : 50/ Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst	Putusan Perkara: 204/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, MA memutus menolak permohonan kasasi dari Para Tergugat, dan menghukum Para Tergugat membayar investasi Perusahaan sebesar Rp.81,7 Milyar. Putusan Perkara: 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst, PN Jakarta Pusat memutus secara verstek Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar Rp. 48,63 Milyar Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi ex. MTN Holi pharma Grup, MTN GBS dan Deposito BPI telah diturunkan penuh nilainya (full impairment).	Tidak Ada

No	Permasalahan Lainnya	Pengaruh Terhadap Perseroan	Status Terakhir	Sanksi Administrasi terhadap Perseroan
10.	Cessie PT Goro Batara Sakti (GBS) Pada tanggal 15 Juli 2004, Perusahaan membeli hak tanggungan atas aset-aset yang dijaminkan oleh PT Goro Batara Sakti dari Development Capital Investment Limited, perusahaan yang berdomisili di British Virgin Island, sebesar Rp20.000.000Sejak tanggal 26 Juli 2006, PT Goro Batara Sakti dinyatakan pailit dan piutang cessie PT Goro Batara Sakti diakui oleh Kurator dan Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebesar Rp43.990.117 dengan piutang preferen sebesar Rp9.000.000 Pembayaran piutang non preferen akan dilakukan secara proporsional (prorata) dari hasil penjualan aset.	Pada bulan Mei 2010 untuk piutang preferen, Perusahaan memperoleh hasil penjualan tanah Margonda sebesar Rp9.000.000, sedangkan untuk piutang non preferen Perusahaan telah menerima pembayaran dari kurator atas cessie PT GBS(dalam pailit) sebesar Rp2.080.413 yang dibayarkan tanggal 13 April 2016 dari hasil likuidasi aset PT GBS.	SELESAI & UPAYA RECOVERY Pada tanggal laporan ini dibuat, sisa investasi atas Cessie PT GBS telah diturunkan penuh nilainya (full impairment).	Tidak Ada
11	Perusahaan menuntut Sdr. Khairudin Nur (selaku Personal Guarantee) dari Cessie PT GBS No. Perkara : 629/ Pdt.G/2008/PN.Jkt Sel	Karena PT GBS pailit, maka Perusahaan selalu pemegang Cessie PT GBS menuntut pemberi jaminan Pribadi (<i>Personal Guarantee</i>) Sdr. Khairudin Nur untuk membayar kewajiban PT GBS	Khairudin Nur mengajukan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung telah memutus dan menyatakan permohonan peninjauan kembali Khairudin Nur tidak dapat diterima, sehingga menguatkan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi yang memenangkan PT PDV dengan menghukum Khairudin Nur untuk membayar sebagian jumlah hutang (pokok, bunga,denda) kredit sebesar 1/3 dari Rp.20.000.000 yaitu sebesar Rp. 6.666.667.	Tidak ada

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

■ Corporate Social Responsibility / "CSR"

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN UMUM

Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), yang menyebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan", dan mengingat kegiatan usaha Perseroan tidak terkait dengan sumber daya alam, maka tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk melaksanakan Tanggung jawab sosial. Namun demikian, Perseroan sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero), tetap berkomitmen untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara berkesinambungan. Perseroan bahkan telah mencanangkan pelaksanaan CSR sebagai salah satu program Perseroan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan CSR dapat menciptakan ruang untuk diperolehnya manfaat timbal balik (mutual benefit) bagi Perseroan dan masyarakat.

Agar aktivitas CSR dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan, maka pelaksanaannya harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas CSR yang telah dicanangkan dalam RJPP dan RKAP dapat direalisasikan secara terprogram dan berkelanjutan sehingga hasil dari pelaksanaan aktifitas CSR tersebut dapat dimonitor dari waktu ke waktu dan ukuran keberhasilan serta akuntabilitas dari pelaksanaan program tersebut dapat dinilai secara transparan dan obyektif. Oleh karena itu, Perseroan telah menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan tersebut di atas yang mengatur mengenai penetapan ruang lingkup program CSR, penetapan kriteria penerima bantuan dan donasi, prosedur pemberian bantuan dan donasi, serta mekanisme pertanggungjawaban dan ukuran keberhasilan pelaksanaannya.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perseroan pada pelaksanaannya mencakup:

- 1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan.
- 2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- 3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan.
- 4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Konsumen.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Kebijakan

Sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2020, Perseroan diarahkan untuk melakukan kegiatan CSR terprogram dan berkesinambungan. Dalam hal ini salah satu program yang direncanakan pelaksanaannya secara berkesinambungan adalah program peduli lingkungan.

Lokasi kantor Perseroan sendiri saat ini berada di Gedung Wisma Tugu Lantai 4 yang beralamatkan di Jalan Raden Saleh Raya No.44, Cikini, Jakarta Pusat, yang merupakan gedung bertingkat yang tidak memiliki area hijau di dalamnya. Kegiatan operasional Perseroan pun sebenarnya juga tidak melibatkan proses pengolahan bahan material maupun proses fisik lain yang memberi dampak langsung terhadap lingkungan sekitar. Meskipun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, baik secara aktif maupun pasif.

Kegiatan

Beberapa kegiatan dalam program peduli lingkungan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan sepanjang tahun 2020 masih melaksanakan program-program di lingkungan internal Perusahaan yang berdampak positif pada kelestarian lingkungan dan juga pada keberlangsungan kegiatan operasional yang lebih efektif dan efisien, seperti melalui penghematan penggunaan energi listrik, air dan alat tulis kantor, pendayagunaan kertas bekas dalam pencetakan dokumen-dokumen internal dan non formal, serta penerapan e-filing dan paperless system dalam proses administrasi, yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi kertas dengan dukungan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, antara lain meliputi aplikasi PIIS (PDV Integrated Information System).

Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Mengingat jenis kegiatan usaha dan karakteristik lingkungan Perseroan saat ini, hingga kini Perseroan belum memiliki sertifikasi di bidang lingkungan.

Dampak Keuangan

Total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan selama tahun 2020 telah menjadi bagian dari anggaran biaya kantor Perseroan tahun 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan Misi Perseroan untuk melaksanakan kegiatan usaha Perseroan secara transparan, prudent dan berlandaskan GCG, Perseroan telah menetapkan berbagai Pedoman, Prosedur dan ketentuan lainnya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pekerjaan secara baik dan profesional. Dalam pelaksanaannya, Perseroan sangat memperhatikan aspek-aspek ketenagakerjaan kesehatan dan keselamatan kerja yang erat kaitannya dengan keberlangsungan pelaksanaan pekerjaan.

Perseroan pada prinsipnya menetapkan kebijakan-kebijakan pada bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Namun untuk memastikan terpenuhinya dengan baik harapan-harapan pekerja pada bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan tidak jarang menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dari ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Kegiatan

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan terkait aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, maka sepanjang tahun 2020 Perseroan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan yang relevan bagi Pekerja dalam rangka meningkatkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Pekerja maupun Perseroan.
- Perseroan secara konsisten memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh Pekerja untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan selain tentunya agar Perseroan dapat memastikan Pekerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jabatan dan bisnis yang semakin kompleks.
- · Pelaksanaan sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran pekerja akan aspek kesehatan dan keselamatan kerja, antara lain melalui kegiatan HSSE Meeting, Safety Breefing, dan latihan-latihan untuk menghadapi situasi bencana dan kebakaran di lingkungan kantor.
- Terjaganya tingkat kecelakaan kerja sebesar 0% (zero accident) selama 5 tahun terakhir, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagai bentuk keberhasilan atas upaya penerapan praktek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang baik di lingkungan kerja Perseroan.
- Pemberian Bingkisan Hari Raya kepada Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, Teknisi Gedung dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) serta panti asuhan di lingkungan sekitar kantor Perseroan.

Dampak Keuangan

Total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja selama tahun 2020 telah menjadi bagian dari anggaran biaya operasional Perseroan tahun 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP PENGEMBANGAN SOSIAL **DAN KEMASYARAKATAN**

Sesuai dengan rencana strategis CSR Perseroan yang dituangkan dalam RJPP dan RKAP, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan CSR yang terprogram dan berkesinambungan. Telah ditetapkan ruang lingkup dan kriteria penerima manfaat program CSR Perseroan berupa bantuan atau donasi, yang antara lain ditujukan untuk keperluan :

- a. Bencana Alam Nasional
 - Khususnya untuk Bencana Alam Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Kegiatan Sosial
 - Antara lain ditujukan untuk kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial dan pembangunan tempat ibadah.
- c. Hari Besar Keagamaan
 - Merupakan pemberian bantuan hari besar keagamaan kepada masyarakat di lingkungan operasi perusahaan, antara lain kepada petugas kebersihan, taman dan juru parkir.
- d. Donasi Pendidikan Beasiswa
 - Dalam bentuk beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi, khususnya bagi orang tua/wali yang kurang mampu secara ekonomi.
- e. Donasi Pendidikan Berkelanjutan
 - Merupakan donasi pendidikan yang diberikan secara berkelanjutan bagi anak-anak dari kalangan tidak mampu dan anak jalanan.

Kegiatan

Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Perseroan pada tahun 2020 antara lain adalah:

- 1. Pemberian Bantuan bagi Pekerja TKJP dan Masyarakat sekitar terdampak Covid 19, termasuk pemberian bantuan fasilitas pencegah penyebaran Covid 19 dalam bentuk Wash Tafel Portable, di Lingkungan Wisma Tugu Raden Saleh tempat dimana Perusahaan berkantor;
- 2. Pemberian Bantuan kepada Rumah Sakit Rujukan Covid 19 (RSPP) melalalui PT Pertamina Bina Medika IHC berupa 10 Tempat & Kantung Sampah Medis;
- 3. Pembagian Paket Sembako Idul Fitri untuk dibagikan di Lingkungan Wisma Tugu Raden Saleh tempat dimana Perusahaan berkantor;
- Pemberian Santunan Anak Yatim & Piatu serta Kaum Dhuafa di Lingkungan Wisma Tugu Raden Saleh tempat dimana Perusahaan berkantor serta dalam Rangka Syukuran HUT PT Pertamina (Persero).

Dampak Keuangan

Total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan selama tahun 2020 telah menjadi bagian dari anggaran biaya kantor Perseroan tahun 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KONSUMEN

Perseroan tidak melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen pada tahun 2020 mengingat Perusahaan adalah Special Purpose Vehicle, maka Perusahaan tidak memiliki konsumen definitive yang menggunakan produk Perusahaan.

a. Anggaran dan Sumber Pendanaan

Kegiatan Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT Pertamina Pedeve Indonesia adalah sebagai tanda keperdulian terhadap tanggung jawab sosial di lingkungan Perusahaan. Dalam pendanaan program CSR-nya, Pedeve menganggarkan pendanaannya dalam RKAP 2020 kedalam Biaya Pemasaran (termasuk CSR) yakni sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta Rupiah).

b. Realisasi CSR

Secara umum, pada tahun 2020 total realisasi penyaluran dana untuk pemasaran dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan meningkat menjadi Rp.91.104.500,- (sembilan puluh satu juta seratus empat ribu lima ratus Rupiah). Penurunan reaslisai CSR tahun 2020 ini disebabkan karena pemegang saham melakuka pengetatan anggaran dan meminta Perusahaan melakukan penyesuian rencana biaya kantro yang cukup signifikan dan salah satu yang terdampak adalah anggaran biaya CSR.

No.	Kegiatan CSR	Jumlah (Rp.)
1	Bantuan Uang Tunai untuk 35 Orang TKJP Terdampak Covid 19 di Lingkungan Wisma Tugu Raden Saleh tempat dimana Perusahaan berkantor	3.500.000,-
2	Pembagian Paket Sembako Idul Fitri untuk dibagikan di Lingkungan Wisma Tugu Raden Saleh tempat dimana Perusahaan berkantor	5.428.500,-
3	Pembagian Paket Sembako bagi Masyarakat terdampak Covid 19 lingkungan Perusahaan berdomisili melalui Kelurahan Cikini Bulan Mei 2020	16.302.000,-
4	Pembelian Wash Tafel Portable sebagai CSR Perusahaan untuk ditempatkan di akses masuk Gedung Wisma Tugu Raden Saleh tempat dimana perusahaan berkantor	4.725.000,-
5	Santunan Yatim & Piatu kepada Yayasan Panti Asuhan Aisyiyah, Menteng, Jakarta Pusat	10.000.000,-
6	Pemberian Bantuan kepada Rumah Sakit Rujukan Covid 19 (RSPP) melalalui PT Pertamina Bina Medika IHC berupa 10 Tempat & Kantung Sampah Medis	8.545.000,-
7	Pembagian Paket Sembako bagi Masyarakat terdampak Covid 19 lingkungan Perusahaan berdomisili melalui Kelurahan Cikini Bulan Juni 2020	16.302.000,-
8	Pembagian Paket Sembako bagi Masyarakat terdampak Covid 19 lingkungan Perusahaan berdomisili melalui Kelurahan Cikini Bulan Juli 2020	16.302.000,-
9	Santunan Anak Yatim & Dhuafa dalam Rangka Syukuran HUT PT Pertamina (Persero)	10.000.000,-
Total		91.104.500,-

c. Realisasi HSSE

Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan juga memberikan perhatian terhadap masalah Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (HSSE). Oleh karena itu, dalam tahun 2020 telah dijadwalkan sebanyak 12 kali kegiatan rutin untuk membahas masalah tersebut. Untuk pelaksanaan HSSE dilakukan secara online mengingat terdapat pembatasan kegiatan secara fisik dan pelaksanaan Work From Home (WFH).

Adapun pelaksanaan kegiatan HSSE tahun 2020 sebagai berikut :

No	Bulan	Tema
1.	Januari 2020	Waspada Deman Berdarah
2.	Februari 2020	Gejala dan Pencegahan Virus Corona (COVID-19)
3.	Maret 2020	Mengelola kegiatan Work From Home (WFH) yang efektif
4.	April 2020	Tips Berpuasa di Saat Wabah Virus Corona
5.	Mei 2020	Ergonomi "Working From Home"
6.	Juni 2020	Sehat Mental dan Fisik Selama Wabah Virus Covid-19
7.	Juli 2020	Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja Selama Pandemi
8.	Agustus 2020	Meningkatkan Daya Tahan Tubuh
9.	September 2020	Keamanan Berkendara di Musim Hujan
10.	Oktober 2020	Menjaga Kesehatan di Musim Hujan
11.	Nopember 2020	Pemilihan dan Pemakaian Alat Pelindung Diri
12.	Desember 2020	Protokol Pencegahan Covid di Tempat Kerja

Laporan Keuangan Audit

Informasi Keuangan

- 1. Surat Pernyataan Direksi
- 2. Opini Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan
- 3. Deskripsi Akuntan Publik di Opini
- 4. Laporan Keuangan lengkap



LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2020/ 31 DECEMBER 2020



Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan 31 Desember 2020 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut PT Pertamina Pedeve Indonesia (Dahulu PT Pertamina Dana Ventura) Directors' Statement Letter Relating To The Responsibillity on The Financial Statements 31 December 2020 And For The Year Then Ended PT Pertamina Pedeve Indonesia (Formerly PT Pertamina Dana Ventura)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama

Khurin Nihayah

Name

Alamat kantor

Gedung Wisma Tugu Raden Saleh, Lantai 4

Address

Jl. Raden Saleh No. 44 Cikini Menteng

Jakarta Pusat 10330

Alamat domisili sesuai

Perumahan The Gayungan G-11 RT 005 RW 006

Residential Address

KTP

Gayungan Surabaya

to begin to a laboration of the laboration of th

Nomor Telepon

(021) 391 1857

Telephone

Jabatan

Direktur / Director

Title

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian 1. Iaporan keuangan PT Pertamina Pedeve Indonesia;
- 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar:
 - b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 3. Bertanggung jawab atas system pengendalian intern Perusahaan.

- 1. We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements PT Pertamina Pedeve Indonesia;
- 2. The financial statements have been prepared and presented in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia; and
 - All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements;
 - b. The Company's financial statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.
- 3. We are responsible for the Company's internal control system.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This is our declaration, which has been made truthfully.

Jakarta, 25 March, 2021

Khurin Nihayah

Direktur/ Director



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT PERTAMINA PEDEVE INDONESIA

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pertamina Pedeve Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of PT Pertamina Pedeve Indonesia, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2020, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia, T: +62 21 5212901, F:+ 62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. bergantung Prosedur yang dipilih pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian tersebut, auditor mempertimbangkan risiko pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pertamina Pedeve Indonesia tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud orIn making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An includes also evaluating audit appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Pertamina Pedeve Indonesia as at 31 December 2020, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA 25 Maret/March 2021

Daniel Kohar, S.E., CPA

Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1130

Lampiran 1/1 Schedule

LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2020

	Catatan/ Notes	2020	2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR Kas dan setara kas	1 10	622 560 076	600 772 177	CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain	4,18	622,560,976	689,773,177	Cash and cash equivalents Other receivables
Pihak berelasiPihak ketiga	5,18 5	-	553,194 112,077	Related parties - Third parties -
Uang muka	3	79,040	120,296	Advances payments
Pendapatan bunga yang masih akan diterima		633,399	1,424,476	Accrued interest income
Jumlah aset lancar		623,273,415	691,983,220	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	Oh Oo	35,250	55,250	Fixed assets
Aset hak guna Penyertaan saham	2b,9a 6	1,090,697 3,144,604,333	- 124,815,694	Right-of-use asset Investments in shares
Taksiran tagihan pajak	11a	15,845,456	54,803,058	Claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya		144,267	143,653	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		3,161,720,003	179,817,655	Total non-current assets
JUMLAH ASET		3,784,993,418	871,800,875	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain	7.40	000.074	444.070	Other payables
Pihak berelasiPihak ketiga	7,18 7	200,874 2,233,503	141,672 2,244,551	Related parties - Third parties -
Liabilitas yang masih harus dibayar	9	5,798,919	5,858,532	Accrued liabilities
Bagian lancar atas liabilitas sewa	·	0,1 00,0 10	0,000,002	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
jangka panjang	10b	559,300	-	Short-term lease liabilities
Uang muka diterima dari	0	E 000 004	47,000,074	Advance received from -
Trans Javagas Pipeline ("TJP") Utang pajak	8 11b	5,689,601 12,386,086	17,082,874	Trans Javagas Pipeline ("TJP") Taxes payable
Otalig pajak	110	12,300,000	109,552	Taxes payable
Jumlah liabilitas jangka pendek		26,868,283	25,437,181	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa jangka panjang	10b	492,563	-	Long-term lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	11d	576,873,335	- 956 194	Deferred tax liabilities
Liabilitas imbalan kerja		<u>1,711,078</u>	856,184	Employee benefits liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>579,076,976</u>	856,184	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		605,945,259	26,293,365	TOTAL LIABILITIES

Lampiran 1/2 Schedule

LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2020

	Catatan/ Notes	2020	2019	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - saham				Share capital - ordinary
biasa dengan nilai nominal				shares at par value of
Rp1.000.000 per saham; modal dasar: 350.000 saham:				Rp1,000,000 per share; authorised capital: 350,000
modal ditempatkan dan				shares; issued and fully
disetor penuh: 175.000 saham	12	175,000,000	175,000,000	paid capital: 175,000 shares
Tambahan modal disetor		8,307,977	8,307,977	Additional paid-in capital
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaanya	13	43,807,046	43,807,046	Appropriated
Belum ditentukan penggunaanya	13	630,338,647	603,608,608	Unappropriated
Komponen ekuitas lainnya		<u>2,321,594,489</u>	<u>14,783,879</u>	Other equity components
JUMLAH EKUITAS		3,179,048,159	845,507,510	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>3,784,993,418</u>	<u>871,800,875</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran 2 Schedule

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

	Catatan/ Notes	2020	2019	
Pendapatan Pendapatan dividen dari penyertaan saham Pendapatan bunga	14,18 15,18	165,951,340 31,717,719	109,498,195 51,243,399	Revenue Dividend income from investments in shares Interest income
Pendapatan		197,669,059	160,741,594	Revenue
Beban usaha Beban keuangan Lain-lain, bersih Beban pajak final	16 10b 17	(8,936,298) (61,135) 4,018,990 (6,470,782)	(10,630,870) - (7,076,463) (10,287,398)	Operating expenses Finance costs Others, net Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan		186,219,834	132,746,863	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan Kini	11c	(35,662,138)	-	Income tax expense Current Adjustment in respect of
Penyesuaian tahun lalu		(38,957,602)	(11,503,932)	prior year
Beban pajak penghasilan		(74,619,740)	(11,504,932)	Income tax expense
Laba tahun berjalan		111,600,094	121,242,931	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Perubahan nilai wajar dari investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak		355,216,500 (682,729)	(6,467)	Other comprehensive income Items that will not be reclassified to profit or loss Changes in the fair value of equity investment at fair value through other comprehensive income, net of tax Re-measurement of post- employment benefit obligations,net of tax
Jumlah penghasilan komprehensi tahun berjalan	if	<u>466,133,865</u>	<u>121,236,464</u>	Total comprehensive income for the year

Lampiran 3 Schedule

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 (Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Balance 1 January 2019	Profit for the year Other comprehensive income Remeasurement of post-		Dividerias	Balance 31 December 2019	Opening balance adjustment due to implementation of SFAS 71 related to: Remeasurement of - investment in shares	Balance 1 January 2020	Profit for the year	Other comprehensive income Remeasurement of - investment in shares Remeasurement of post -	employment benefits	Dividends	Balance 31 December 2020
Jumlah ekuitas/ Total equity	841,408,103	121,242,931	(147 437 067)	(700,701,711)	845,507,510	1,952,276,839	2,797,784,349	111,600,093	355,216,500	(605,129)	(84,870,054)	3,179,048,159
Komponen ekuitas lainnya/ Other equity component	14,783,879	•			14,783,879	1,952,276,839	1,967,060,718	•	355,216,500	(607,129)		2,321,594,489
Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	599,509,201	121,242,931	(5,157)	(10,751,711)	603,608,608		603,608,608	111,600,093	,	•	(84,870,054)	630,338,647
Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	43,807,046				43,807,046	•	43,807,046	•		•		43,807,046
Tambahan modal disetor/ Additional pald-in capital	8,307,977	•			8,307,977	•	8,307,977	•		•		8,307,977
Modal saham/ Share capital	175,000,000	•			175,000,000	•	175,000,000	•	•	•		175,000,000
	Saldo 1 Januari 2019	Laba tahun berjalan Rugi komprehensif lain - Pengukuran kembali liahilitas nasca kenda		Dividen	Saldo 31 Desember 2019	Penyesuaian saldo awal atas implementasi PSAK 71 terkait: - Pengukuran kembali investasi pada saham	Saldo 1 Januari 2020	Laba tahun berjalan Penghasilan komprehensif	lain - Pengukuran kembali investasi pada saham - Pengukuran kembali inahilikan kembali	ilabilitas pasca Kerja	Dividen	Saldo 31 Desember 2020

Lampiran 4 Schedule

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan pendapatan dividen Penerimaan pendapatan bunga Penerimaan pendapatan bunga Pembayaran kepada karyawan, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak penghasilan Pembayaran pajak penghasilan Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penyertaan saham (135,421,965) Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS Pembayaran saham (135,421,965) ARUS KAS DARI AKTIVITAS Pembayaran saham (135,421,965) ARUS KAS DARI AKTIVITAS Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran liabilitas sewa Pembayaran dividen ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penyertaan saham (135,421,965) ARUS KAS DARI AKTIVITAS Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran dividen ARUS KAS DARI AKTIVITAS Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran dividen ARUS KAS DARI AKTIVITAS Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran dividen ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran dividen ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran dividen ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN PENDANAAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN PENDANAAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS PAyments for interest expense of lease liabilities Repayments of lease liabilities ARUS KAS DARI AKTIVITAS PAyments of dividends ARUS KAS DARI SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT		2020	2019	
Penerimaan pendapatan bunga Pembayaran kepada karyawan, pemasok dan beban operasional Pembayaran pajak penghasilan Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penyertaan saham Pembelian aset tetap Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran liabilitas sewa Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (61,135) Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (67,212,201) (36,611,782) Receipts of interest income Payments to employee, Supplier and operating expense for income taxes Receipts of interest income Payments for income taxes CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Receipts of interest income Payments of income taxes CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES OCASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Payments for interest expense of lease liabilities Payments for interest expense of lease liabilities Repayments of lease liabilities Repayments of lease liabilities Repayments of dividends Net cash flows used in financing activities NET DECREASE IN CASH AND CASH CASH AND CASH				
Pembayaran kepada karyawan, pemasok dan beban operasional Pembayaran pajak penghasilan Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aset tetap Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMDANAAN Pembayaran liabilitas sewa Pembayaran liabilitas sewa Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Arus kas bersih digunakan (61,135) Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan (88,470,054) Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan (88,470,054) Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan (85,426,549) Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan (85,426,549) Penurunan bersih (67,212,201) Penurunan bersih (7,112,444) Pembayaran dividen Payments to employee, 20,256,246 Payments for income taxes Payments of embayaran dividen Net cash flows used in financing activities Net Decrease in Net Decrease in Payments of dividends Net Cash AND Cash (67,212,201) Penurunan bersih (67,212,201) Penurunan bersih (67,212,201) Penurunan bersih (67,212,201) Penurunan bersih (7,112,444) Payments to employee, (2,590,624) Payments of interest expense of lease liabilities Penurunan bersih (7,112,444) Payments of c	Penerimaan pendapatan dividen	131,117,722	75,429,817	Receipts of dividend income
pemasok dan beban operasional Pembayaran pajak penghasilan (3,519,423) (25,926,246) (7,112,444) Pembayaran pajak penghasilan Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penyertaan saham (135,421,965) (2,970,624) (45,000) Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (135,421,965) (3,015,624) ARUS KAS DARI AKTIVITAS (135,421,965) (3,015,624) ARUS KAS DARI AKTIVITAS (135,421,965) (3,015,624) ARUS KAS DARI AKTIVITAS (135,421,965) (3,015,624) Pembayaran untuk beban bunga (61,135) - Payments for interest expense of lease liabilities Pembayaran dividen (84,870,054) (117,137,057) Penurunan Bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (85,426,549) (117,137,057) Penurunan Bersih digunakan (135,421,201) (36,611,782) (36,611,782) ARUS KAS DARI AKTIVITAS Pembayaran dividen (85,426,549) (117,137,057) (117,137,057) Payments for interest expense of lease liabilities Repayments of dividends Arus kas bersih digunakan (17,137,057) (17,137,057) (17,137,057) Penurunan Bersih digunakan (17,137,057) (17,137	Penerimaan pendapatan bunga	26,038,014	41,149,772	Receipts of interest income
Pembayaran pajak penghasilan - (7,112,444) Payments for income taxes Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penyertaan saham Pembelian aset tetap Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS (135,421,965) ARUS kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMDANAAN Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran liabilitas sewa Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan (495,360) Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan (84,870,054) Arus kas bersih digunakan (85,426,549) Arus kas bersih digunakan (85,426,549) PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS ARUS KAS DA	Pembayaran kepada karyawan,			Payments to employee,
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penyertaan saham (135,421,965) (2,970,624) Investments in shares Pembelian aset tetap (45,000) Acquisition of fixed assets Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (135,421,965) (3,015,624) used in investing activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMDANAAN PEMDANAAN PEMDAYARAI Untuk beban bunga liabilitas sewa (495,360) Pembayaran liabilitas sewa (495,360) Rembayaran dividen (84,870,054) (117,137,057) Payments of dividends Arus kas bersih digunakan untuk kativitas pendanaan (85,426,549) (117,137,057) Net cash flows used in financing activities Net cash flows used in financing activities Net cash flows provided by operating activities Acquisition of fixed assets Ac	pemasok dan beban operasional	(3,519,423)	(25,926,246)	supplier and operating expense
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penyertaan saham (135,421,965) (2,970,624) Investments in shares (45,000) Acquisition of fixed assets Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (135,421,965) (3,015,624) Used in investing activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN (61,135) Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa (495,360) Pembayaran dividen (84,870,054) (117,137,057) Payments of dividends Arus kas bersih digunakan untuk beban bunga liabilitas sewa (495,360) Pembayaran dividen (84,870,054) (117,137,057) Payments of dividends Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (85,426,549) (117,137,057) Net cash flows used in untuk aktivitas pendanaan (85,426,549) (117,137,057) Payments of dividends PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (67,212,201) (36,611,782) CASH AND CASH EQUIVALENTS	Pembayaran pajak penghasilan		(7,112,444)	Payments for income taxes
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penyertaan saham (135,421,965) (2,970,624) Investments in shares (45,000) Acquisition of fixed assets Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (135,421,965) (3,015,624) Used in investing activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN (61,135) Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa (495,360) Pembayaran dividen (84,870,054) (117,137,057) Payments of dividends Arus kas bersih digunakan untuk beban bunga liabilitas sewa (495,360) Pembayaran dividen (84,870,054) (117,137,057) Payments of dividends Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (85,426,549) (117,137,057) Net cash flows used in untuk aktivitas pendanaan (85,426,549) (117,137,057) Payments of dividends PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (67,212,201) (36,611,782) CASH AND CASH EQUIVALENTS	A I I 9 . I' I . I			Not and the second state
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penyertaan saham (135,421,965) (2,970,624) Investments in shares (45,000) Acquisition of fixed assets Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (135,421,965) (3,015,624) Used in investing activities ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa (495,360) Pembayaran liabilitas sewa (495,360) Pembayaran dividen (84,870,054) (117,137,057) Payments of lease liabilities ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN (495,360) Payments for interest expense of lease liabilities Pembayaran dividen (84,870,054) (117,137,057) Payments of lease liabilities ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN (495,360) Payments for interest expense of lease liabilities Pembayaran dividen (84,870,054) (117,137,057) Payments of lease liabilities PENURUNAN BERSIH (67,212,201) (36,611,782) Net cash flows used in financing activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES INVESTING ACTIVITIES (135,421,965) (3,015,624) Used in investing activities Repayments for interest expense of lease liabilities Repayments of lease liabilities Repayments of lease liabilities Payments of dividends Net cash flows used in financing activities NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH		450 000 040	00 540 000	
INVESTASI Penyertaan saham Pembelian aset tetap Pembelian aset tetape Pembelian aset aset aset aset aset aset aset aset	aktivitas operasi	153,636,313	83,540,899	operating activities
Pembelian aset tetap - (45,000) Acquisition of fixed assets Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran liabilitas sewa Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS Arus kas DAN SETARA KAS - (45,000) Acquisition of fixed assets Net cash flows used in investing activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Payments for interest expense of lease liabilities Repayments of lease liabilities Repayments of lease liabilities Net cash flows used in financing activities NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH				
Pembelian aset tetap - (45,000) Acquisition of fixed assets Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran liabilitas sewa Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS Arus kas DAN SETARA KAS - (45,000) Acquisition of fixed assets Net cash flows used in investing activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Payments for interest expense of lease liabilities Repayments of lease liabilities Repayments of lease liabilities Net cash flows used in financing activities NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH	Penvertaan saham	(135.421.965)	(2.970.624)	Investments in shares
untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran liabilitas sewa Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (135,421,965) (135,421,965) (135,421,965) (135,421,965) (135,421,965) (135,421,965) (135,421,965) (135,421,965) (136,611,624) Used in investing activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Payments for interest expense of lease liabilities (495,360) (117,137,057) (117,137,057) (117,137,057) (117,137,057) Repayments of lease liabilities (84,870,054) (117,137,057) (117,137,057) (117,137,057) Net cash flows used in financing activities NET DECREASE IN CASH AND CASH KAS DAN SETARA KAS (67,212,201) (36,611,782) (23,015,624) (495,364) (495,360			(45,000)	Acquisition of fixed assets
untuk aktivitas investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran liabilitas sewa Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (135,421,965) (135,421,965) (135,421,965) (135,421,965) (135,421,965) (135,421,965) (135,421,965) (135,421,965) (136,611,624) Used in investing activities CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Payments for interest expense of lease liabilities (495,360) (117,137,057) (117,137,057) (117,137,057) (117,137,057) Repayments of lease liabilities (84,870,054) (117,137,057) (117,137,057) (117,137,057) Net cash flows used in financing activities NET DECREASE IN CASH AND CASH KAS DAN SETARA KAS (67,212,201) (36,611,782) (23,015,624) (495,364) (495,360				
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran untuk beban bunga liabilitas sewa Pembayaran liabilitas sewa Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Penurunan Bersih KAS DAN SETARA KAS ARUS KAS DARI AKTIVITAS Pembayaran untuk beban bunga (61,135) - Payments for interest expense of lease liabilities Repayments of lease liabilities Payments of dividends Net cash flows used in financing activities NET DECREASE IN CASH AND CASH KAS DAN SETARA KAS (67,212,201) (36,611,782) CASH AND CASH		(405 404 005)	(0.04=.004)	
PENDANAAN Pembayaran untuk beban bunga (61,135) - Payments for interest expense of lease liabilities Pembayaran liabilitas sewa (495,360) - Repayments of lease liabilities Pembayaran dividen (84,870,054) (117,137,057) Payments of dividends Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (85,426,549) (117,137,057) Net cash flows used in financing activities PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (67,212,201) (36,611,782) CASH AND CASH CASH AND CASH	untuk aktivitas investasi	(135,421,965)	(3,015,624)	used in investing activities
liabilitas sewa Pembayaran liabilitas sewa Pembayaran dividen Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS lease liabilities Repayments of lease liabilities Repayments of dividends				
Pembayaran dividen (84,870,054) (117,137,057) Payments of dividends Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (85,426,549) (117,137,057) Net cash flows used in financing activities PENURUNAN BERSIH CASH AND CASH KAS DAN SETARA KAS (67,212,201) (36,611,782) CASH AND CASH	,	(61,135)	-	
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan (85,426,549) (117,137,057) PENURUNAN BERSIH CASH AND CASH KAS DAN SETARA KAS (67,212,201) (36,611,782) **CASH AND CASH CASH CASH CASH CASH CASH CASH CASH	Pembayaran liabilitas sewa	(495,360)	-	
untuk aktivitas pendanaan (85,426,549) (117,137,057) financing activities NET DECREASE IN CASH AND CASH KAS DAN SETARA KAS (67,212,201) (36,611,782) EQUIVALENTS CASH AND CASH	Pembayaran dividen	<u>(84,870,054</u>)	(117,137,057)	Payments of dividends
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (67.212.201) (36.611.782) CASH AND CASH CASH AND CASH		(85,426,549)	(117,137,057)	
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (67.212.201) (36.611.782) CASH AND CASH CASH AND CASH				
		(67.212.201)	(36.611.782)	CASH AND CASH
				CASH AND CASH
	KAS DAN SETARA KAS			EQUIVALENTS AT
PADA AWAL TAHUN		689.773.177	726.384.959	
		***************************************	. = 0,000 .,300	
KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS				
PADA AKHIR TAHUN <u>622,560,976</u> <u>689,773,177</u> <i>AT END OF THE YEAR</i>	PADA AKHIR TAHUN	622,560,976	689,773,177	AT END OF THE YEAR

Lampiran 5/1 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pertamina Pedeve Indonesia ("Perusahaan"), didirikan sebagai yayasan bernama Yayasan Tabungan Pegawai Pertamina pada tahun 1975 di Jakarta. Berdasarkan Akta Notaris Ny. Sulami Mustafa, S.H., No. 12, tanggal 18 Juni 2002, Perusahaan berubah dari bentuk Yayasan ke bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT Pertamina Saving and Investment dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No.C.13857HT.01.01.TH.2002 tanggal 25 Juli 2002.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Notaris No. 9 tanggal 30 Desember 2004 yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor dengan Keputusan No.C03142.HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Februari 2005, Perusahaan berganti nama menjadi PT Pertamina Dana Ventura.
- Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 5 tanggal 08 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHII-0003443.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018, dimana Pemegang Saham Perusahaan memutuskan mengubah nama Perusahaan menjadi "PT Pertamina Pedeve Indonesia" dan mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan menjadi tidak lagi bergerak di bidang modal ventura.
- Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 03 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH., dimana Pemegang Saham Perusahaan mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan serta menyetujui pemberlakuan Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 3 April 2020, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah:

 Menjalankan usaha yang bergerak di bidang perdagangan besar khusus lainnya yang berkaitan dengan energi dan industri baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk menjalankan usaha kerjasama dengan perseroan-perseroan lain.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Pertamina Pedeve Indonesia ("the Company") was established as a foundation named Yayasan Tabungan Pegawai Pertamina in 1975, in Jakarta. Based on Notarial Deed No. 12 of Mrs. Sulami Mustafa, S.H., dated 18 June 2002, the Company changed its form from a foundation to a limited liability company named PT Pertamina Saving and Investment, and this was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C.13857HT.01.01.TH.2002 dated 25 July 2002.

The Company's Articles of Association have been amended several times, including the following:

- Based on Notarial Deed No. 9 dated 30 December 2004 which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through decision letter No.C.03142.HT.01.04.TH.2005 dated 4 February 2005, the Company changed its name to PT Pertamina Dana Ventura.
- Based on Notarial Deed No. 5 dated 08 January 2018 of Marianne Vincentia Hamdani, SH, was acknowledged by the Ministry of Law and Human Right of the Republic of Indonesia through its Letter No. AHU-0003443.AH.01.02. Tahun 2018 dated 13 February 2018, where the Company's shareholders decided to change the Company's name to "PT Pertamina Pedeve Indonesia" and purposes and objectives of the Company which no longer engaged in venture capital.
- Based on Notarial Deed No. 1 dated 03 April 2020 of Marianne Vincentia Hamdani, SH, where the Company's shareholders decided to change purposes and objectives of the Company and approved the implementation of the Good Corporate Governance.

In accordance with Article 3 of the Article of Shareholders Decision Statement No 1 dated 03 April 2020 purposes and objectives of the Company are as follows:

 Running businesses that are engaged in other specialised wholesale trading related to energy and industry, either directly or indirectly, including running joint ventures with other companies.

Lampiran 5/2 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

- a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)
 - Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Menjalankan usaha yang berkaitan dengan perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas, dan produk yang berhubungan dengan itu. Sub golongan ini mencakup perdagangan besar bahan bakar, grease (minyak semir), minyak pelumas dan minyak. golongan ini mencakup perdagangan besar arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta; perdagangan besar minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin; perdagangan besar LPG, gas butana dan propana; perdagangan besar minyak semir dan pelumas, produk minyak bumi yang telah dimurnikan.
 - Melaksanakan kegiatan perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, padat serta produk seperti minyak bumi cair, dan padat sejenisnya, mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

1. **GENERAL INFORMATION** (continued)

- a. Establishment and general information (continued)
 - To achieve its purposes and objectives, the Company may carry out business activities as follows:
 - a. Carrying out the wholesale trading activities of solid fuels, liquid and gas and related products. This subgroup includes wholesale trade of fuel, grease (polish oil), lubricants and oil. This subcategory includes wholesale trade in charcoal, coal, slag of charcoal, wood fuel, naphtha; wholesale trade of crude petroleum, crude oil, diesel fuel, gasoline, fuel oil, kerosene; wholesale trade of LPG, butane and propane gas; wholesale trade of polishes and lubricants, refined petroleum products.
 - b. Carrying out wholesale trading activities of solid fuels, liquid and gas and related products. This group includes wholesale trade of gas, liquid and solid fuels and similar products, such as crude petroleum, crude oil, diesel fuel., gasoline, fuel oil, kerosene, premium, diesel, kerosene, coal, charcoal, coal, charcoal, wood fuel, naphtha and other fuels including natural gas, such as LPG, butane gas and propane and polishes, lubricants and refined petroleum products.

Lampiran 5/3 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

- a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)
 - Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (lanjutan)
 - Melaksanakan kegiatan perdagangan besar produk lainnya, termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat Subgolongan ini mencakup perdagangan besar kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain; perdagangan besar pupuk dan produk kimia pertanian; perdagangan besar bahan plastik dalam bentuk dasar; perdagangan besar karet; perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain: perdagangan besar kertas dalam iumlah besar (borongan); perdagangan besar barang kertas dan karton; dari perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain); perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih misalnya berguna mobil mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Apalagi, pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai ini Subgolongan juga mencakup pembongkaran mobil, komputer, televisi dan peralatan lainnya untuk mendapatkan dan menjual kembali bagian yang masih dapat dipakai. Sub golongan ini tidak mencakup pengumpulan sampah rumah tangga dan sisa industri; pengelolaan barang sisa, bukan untuk penggunaan lebih lanjut dalam proses industri pabrik, tapi dengan tujuan untuk pembuangan; pengolahan barang sisa dan potongan serta barang lainnya menjadi barang baku sekunder, hasilnya siap untuk digunakan langsung dalam proses industri pabrik, tapi bukan sebagai barand pembongkaran mobil, komputer, televisi dan peralatan lainnya untuk daur ulang; pembongkaran mobil melalui proses mekanik; pembongkaran kapal; dan perdagangan eceran dari barang-barang bekas.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

- a. Establishment and general information (continued)
 - To achieve its purposes and objectives, the Company may carry out business activities as follows: (continued)
 - Carrying out the wholesale trading of other products including waste and unclassified This subcategory includes industrial chemical wholesale trade, such as printer inks, essential oils, industrial gases, chemical adhesives, dyes, artificial resins, methanol, paraffins, flavorings and fragrances, soda, industrial salts, acids and sulfur and others: wholesale trade in fertilizers and agrochemical products; wholesale trade in plastic materials in basic forms; wholesale rubber trade; wholesale trade of fiber or textile fiber and others; paper trade in bulk (wholesale); paper and cardboard goods trading; wholesaler of laboratory, pharmaceutical and medical equipment; wholesale trade in precious stones (diamonds, sapphires and others); wholesale trade of used goods and scraps and scrap metal and non-metallic materials for recycling, including collection, sorting, segregation, disposing of useful items such as cars to get usable parts, packing and repacking, storage and shipping, but without a real change process. Moreover, the buying and selling of valuable leftovers. This subcategory also includes the dismantling of cars, computers, televisions and other equipment to obtain and resell usable parts. This subcategory does not cover collection of household waste and industrial waste: waste management. not for further use in industrial manufacturing processes, but for disposal purposes; processing of waste and scraps as well as other goods into secondary raw materials, the result is ready to be used directly in the industrial factory process, but not as final goods; disassembly of cars, computers, televisions and other equipment for recycling; disassembly of the car through a mechanical process; ship dismantling; and retail trade of used goods.

Lampiran 5/4 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

- Untuk mencapai maksud dan tujuan, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (lanjutan)
 - d. Melaksanakan kegiatan perdagangan besar produk lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar yang sudah disebutkan sebelumnya. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, dan perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).

Pada tanggal 14 Maret 2018, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Keputusan Dewan Komisioner ("KDK") Nomor KEP-20/D.05/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Pertamina Dana Ventura terhitung efektif sejak tanggal 13 Februari 2018.

Menindaklanjuti Keputusan Pemegang Saham dan persetujuan pencabutan izin usaha modal ventura dari OJK tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan izin usaha baru dan kemudian telah memperoleh izin usaha perdagangan dengan Nomor Induk Berusaha ("NIB") 8120117152389 yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* ("OSS") pada tanggal 28 November 2018 dan perubahan NIB ke-3 tanggal 16 Juli 2020.

Perusahaan berlokasi di Wisma Tugu Raden Saleh, Lantai 4, Jl. Raden Saleh No. 44, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 167/27.1BU/31.71.06.1003/-071.562/e/2018 tanggal 7 November 2018.

b. Penyelesaian laporan keuangan

Laporan keuangan ini telah disusun dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 25 Maret 2021.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

- a. Establishment and general information (continued)
 - To achieve its purposes and objectives, the Company may carry out business activities as follows: (continued)
 - d. Carrying out other product wholesale trading, this group includes other wholesale trading businesses that have not been included in one of the wholesale trading groups as listed above. Includes wholesale trade in fiber or textile fibers and others and wholesale trade in precious stones (diamonds, diamonds, sapphires, etc.).

On 14 March 2018, from Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") through the Board of Commissioner Decision ("KDK") No. KEP-20/D.05/2018 regarding the Revocation of the Venture Capital Business License of PT Pertamina Dana Ventura, effective from 13 February 2018.

As a follow-up to Shareholders' decision and the Revocation of Venture Capital Business License from OJK, the Company had submitted a proposal for new business license and obtained business license for trading Nomor Induk Berusaha ("NIB") 8120117152389 issued by Government of Indonesia c.q Online Single Submission ("OSS") Management and Organising Agency on 28 November 2018 and changes to the 3rd NIB dated 16 July 2020.

The Company's office is located at Wisma Tugu Raden Saleh, 4th Floor, Jl. Raden Saleh No. 44, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330, as stated in Letter of Business Domicile No. 167/27.1BU/31.71.06.1003/-071.562/e/2018 dated 7 November 2018.

b. Completion of the financial statements

The accompanying financial statements were prepared and authorised for issue by the Company's Board of Director on 25 March 2021.

Lampiran 5/5 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 04 Desember 2019, dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0376432 tanggal 21 Desember 2019, Pemegang Saham Perusahaan memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Sjahril Samad dari jabatannya sebagai PJ. Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Khurin Nihayah sebagai Ρį (Pejabat) Direktur Perseroan. Berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01.03-0141373 tanggal 13 Maret 2020, Pemegang Saham Perseroan menyetujui penetapan Definitif Khurin Nihayah semula sebagai Pj Direktur Perseroan menjadi Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung mulai tanggal 28 Februari 2020. Pemegang Saham juga memutuskan untuk merubah struktur organisasi Perseroan dari semula terdiri atas Direktur Utama dan Direktur Keuangan & Investasi menjadi hanya satu orang Direktur

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

I. GENERAL INFORMATION (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees

Based on the Notarial Deed No. 2 dated 04 December 2019, made by Notary Marianne Vincentia Hamdani, SH., and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-AH.01.03-0376432 dated 21 December 2019, the Company's Shareholders decided to terminate with respect Sjahril Samad from his position as President Director of the Company and appointed Khurin Nihayah as Pj (Officials) Director of the Company. Based on decree of the Ministry of Law and Human Right of the Republic of Indonesia through its Letter No. AHU-AH.01.03-0141373 dated 13 March 2020, the Company's shareholders approved the definitive determination of Khurin Nihayah was originally as Pj Director becomes the Director of the Company which is effective starting from 28 February 2020. The Shareholders also decided to change the Company's organisational structure from initially consisting of the President Director and the Finance & Investment Director to consist of only one Director.

The Company's Board of Commissioner and Board of Director as at 31 Desember 2019 and 2018 are as follows:

Z0202019Dewan Komisaris
KomisarisCornelius SimanjuntakBoard of Commissioner
CommissionerDireksi
DirekturBoard of Director
Khurin NihayahSjahril SamadBoard of Director

Lampiran 5/6 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor Kpts-001/K0000/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penegasan Masa Tugas Komite Audit serta Pemberhentian Komite Investasi dan Remunerasi Perusahaan, masa jabatan Komite Audit sejak tanggal 29 Juli 2018 s/d 28 Juli 2020 dengan susunan keanggotaaan sebagai berikut:

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

1. **GENERAL INFORMATION** (continued)

c. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees (continued)

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners of the Company Number Kpts-001 / K0000 / 2019 dated 5 August 2019 concerning the Confirmation of the Audit Committee Term and Termination of the Company's Investment and Remuneration Committee, the term of office of the Audit Committee is from 29 July 2018 to 28 July 2020 with the composition membership as follows:

2020 2019

Komite AuditAudit CommitteeKetuaCornelius SimanjuntakCornelius SimanjuntakChairmanAnggota-Kurnia PinayunganMemberAnggota-Seny SaraswatiMember

Jumlah karyawan tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 5 orang (2019: 4 orang) (tidak diaudit).

d. Pelepasan saham entitas anak

Pada tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 4 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ferdinandus Indra Santoso, SH., MH., sebagai pengganti Notaris Esther Mercia Sulaiman SH., Perusahaan menjual saham di PT MTT sebanyak 119.000 lembar saham setara dengan 85% kepada PT Patra Jasa ("Patra Jasa"), pihak berelasi.

Transaksi ini merupakan transaksi dengan pihak berelasi dalam pengendalian yang sama, oleh karena itu keuntungan dari penjualan saham tersebut sebesar Rp7.249.404 dicatat di komponen ekuitas. Perusahaan secara efektif tidak lagi mengkonsolidasi laporan keuangan PT MTT mulai 10 Januari 2018.

(unaudited).

d. Divestment of subsidiary's shares

On 10 January 2018 based on Sales and Purchase of Shares No. 4 by Notary of Ferdinandus Indra Santoso, SH., MH., as replacement to Notary Esther Mercia Sulaiman SH., the Company sold the 85% ownership of shares in PT MTT or equal to 119,000 shares to PT Patra Jasa ("Patra Jasa"), related party.

The Company had 5 permanent employees as at

31 December 2020 (2019: 4 employees)

This was a related party transaction under common control therefore the gain from shares sale of Rp7,249,404 was recognised directly as equity component. The Company no longer consolidates PT MTT's financial statements as of 10 January 2018.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan telah diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 oleh Perusahaan.

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan ini telah disusun berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies which were applied consistently by the Company in the preparation of the financial statements for the years ended 31 December 2020 and 2019.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants.

Lampiran 5/7 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perusahaan beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah karena sifat dan jumlahnya yang signifikan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area di mana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar-standar baru dan amandemen yang relevan terhadap kegiatan operasional dan bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap Perusahaan sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

Penerapan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

Perusahaan menerapkan PSAK 71 mulai dari 1 Januari 2020 secara retrospektif dengan dampak kumulatif atas penerapan awal PSAK 71 disesuaikan pada saldo awal ekuitas tanggal 1 Januari 2020.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts, and using the accrual basis except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared using the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Company, several items of income or expense have been shown separately, due to the significance of their nature or amount.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Changes to SFAS and IFAS

On 1 January 2020, the Company adopted new SFAS and IFAS that were effective for application from that date. Changes to the Company's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of the following new standards and amendments relevant to the Company's operations which have a significant effect on the financial statements are as follows:

Adoption of SFAS 71 "Financial Instruments"

The Company has adopted SFAS 71 from 1 January 2020 retrospectively with the cumulative impact of the initial adoption of SFAS 71 adjusted to the opening balance of equity as at 1 January 2020.

Lampiran 5/8 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENTING (lanjutan)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

"Instrumen Penerapan atas PSAK 71 Keuangan" (lanjutan)

Perusahaan memiliki investasi pada instrumen ekuitas yang merupakan investasi strategis. Sebelum adopsi PSAK 71, instrumen ini diperbolehkan diukur pada biaya perolehan. Pada 1 Januari 2020, sesuai dengan ketentuan PSAK 71, Perusahaan melakukan pengukuran nilai wajar atas instrumen ini dan mencatat penvesuaian nilai wajar sehesar Rp2.603.035.785.

Penerapan PSAK 71 tidak menyebabkan adanya kenaikan provisi penurunan nilai aset keuangan yang diakui sebagai penyesuaian atas saldo laba pada 1 Januari 2020.

penerapan Dampak PSAK 71 secara keseluruhan pada tanggal 1 Januari 2020 menyebabkan penambahan saldo komponen ekuitas lainnya di ekuitas sebesar Rp1.952.276.839 setelah memperhitungkan dampak pajak tangguhan.

Penerapan atas PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Perusahaan menerapkan PSAK 72 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020.

Penerapan atas PSAK 72 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Penerapan atas PSAK 73 "Sewa"

Perusahaan menerapkan PSAK 73 secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angkaangka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Pada saat penerapan PSAK 73, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30, "Sewa" ("PSAK 30"). Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental adalah sebesar 6,41% pada tanggal penerapan awal.

POLICIES (continued)

b. Changes to SFAS and IFAS (continued)

Adoption of SFAS 71 "Financial Instruments" (continued)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Expressed in thousands of Rupiah, unless

31 DECEMBER 2020

otherwise stated)

The Company owns investments in equity instruments for strategic purposes. Prior to the adoption of SFAS 71, these investments were allowed to be measured at cost. On 1 January 2020, in accordance with the requirement of SFAS 71, the Company measured the fair value of these investments and recognised fair value adjustments of Rp2,603,035,785.

The adoption of SFAS 71 did not result in an increase in the provision for impairment of financial assets which was recognised as an adjustment to the retained earnings as at 1 January 2020.

The overall impact of the adoption of PSAK 71 as at 1 January 2020 resulted in an increase in other equity components balance by Rp1,952,276,839 after taking into account deferred tax impact.

Adoption of SFAS 72 "Revenue from Contracts with Customers"

The Company has adopted SFAS 72 effective for the financial year starting 1 January 2020...

The adoption of SFAS 72 did not have a significant impact on the Company's financial statements.

Adoption of SFAS 73 "Leases"

The Company has adopted SFAS 73 for the financial year starting 1 January 2020, but did not restate comparative figures for the previous reporting period as permitted under the specific transition provisions in the standard.

On the adoption of SFAS 73, the Company recognised right-of-use assets and lease liabilities in relation to leases which were previously classified as 'operating lease' under the principles of SFAS 30, "Leases" ("PSAK 30"). These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Company's incremental borrowing rate as at 1 January 2020. The weighted average of the Company's incremental borrowing rate applied was 6,41% on the initial application date.

Lampiran 5/9 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

Penerapan atas PSAK 73 "Sewa" (lanjutan)

Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran dimuka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019.

Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020 aset hak guna Perusahaan meningkat sebesar Rp581.868 terdiri dari reklasifikasi dari biaya dibayar di muka sebesar Rp60.991 dan pengakuan sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp520.877. Selain itu, liabilitas sewa Perusahaan meningkat sebesar Rp520.877 akibat dari pengakuan liabilitas sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi.

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to SFAS and IFAS (continued)

Adoption of SFAS 73 "Leases" (continued)

Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liability, adjusted by the amount of any prepaid or accrued lease payments relating to that lease recognised in the statement of financial position as at 31 December 2019.

By applying this standard, as at 1 January 2020 the Company's right-of-use asset increased by Rp581,868 which comprised reclassification of prepaid expense amounted to Rp60,991 and recognition of leases that were previously recognised as operating lease amounted to Rp520,877. In addition, the Company's lease liabilities increased by Rp520,877 as a result of recognition of lease obligations that were previously recognised as operating lease.

The reconciliation between the operating lease commitments disclosed under SFAS 30 as at 31 December 2019 and the lease liabilities recognised under SFAS 73 on 1 January 2020 are as follows:

Jumlah/Amount

Komitmen sewa yang tidak diungkapkan pada 31 Desember 2019	563.757	Operating lease commitment that were not disclosed as at 31 December 2019
Dikurang: Sewa jangka pendek	(42.880)	Less: Short-term leases
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	520.877	Lease liabilities recognised as at 1 Januari 2020

Panduan Praktis

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Perusahaan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- Sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek.
- Menggunakan tinjauan ke belakang (hindsight) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.
- Tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa berdasarkan kelas aset pendasar.

Practical Expedient

In applying SFAS 73 for the first time, the Company applies the following practical means permitted by the standard:

- Operating leases with a remaining lease term of less than 12 months as at 1 January 2020 are treated as short-term leases.
- 2) The use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate the lease.
- Not separating non-lease components from lease components on lease by class of underlying assets.

Lampiran 5/10 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Expressed in thousands of Rupiah, unless

31 DECEMBER 2020

otherwise stated)

b. Changes to SFAS and IFAS (continued)

Adoption of SFAS 73 "Leases" (continued)

Practical Expedient

- The use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics.
- 5) Rely on the assessment of whether leases are onerous based on SFAS 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" immediately before the date of initial application as an alternative to perform an impairment review.

The Company does not apply PSAK 73 to contracts previously identified as not containing leases under SFAS 30 and IFAS 8.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

Penerapan atas PSAK 73 "Sewa" (lanjutan)

Panduan Praktis

- Menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.
- 5) Mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi" segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

Perusahaan tidak menerapkan PSAK 73 ini untuk kontrak yang sebelumnya tidak diidentifikasi mengandung sewa sesuai PSAK 30 dan ISAK 8.

PSAK dan ISAK lainnya

Standar dan interpretasi baru/revisi yang relevan terhadap kegiatan operasi Perusahaan dan berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-laba";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 15 "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" dan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19; dan
- ISAK 36 "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Other SFAS and IFAS

New and amended standards and interpretations relevant to the Company's operation that are effective for the financial year beginning on or after 1 January 2020 are as follows:

- IFAS 35 "Presentation of Financial Statements for Non-profit oriented Entities";
- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements";
- The amendments to SFAS 15 "Investments in Associates and Joint Ventures":
- The amendments to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Annual improvements on SFAS "Presentation of Financial Statements";
- The amendments of SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement", SFAS 60 "Financial Instruments Disclosure", and SFAS 71 "Financial Instrument" concerning interest rate benchmark reform;
- The amendments of SFAS 71 "Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation";
- The amendments of SFAS 73 "Lease" about rent concession related to COVID-19; and
- IFAS 36 "Interpretation of the Interaction between Provisions regarding Land Rights in SFAS 16: Fixed Assets and SFAS 73: Leases".

Implementation of these standards does not result in substantial changes to the Company's accounting policies and has no material impact on the financial statements in the current period or the previous year.

Lampiran 5/11 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

b. Perubahan pada PSAK dan ISAK (lanjutan)

PSAK dan ISAK lainnya (lanjutan)

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis";
- Amandemen PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi IBOR Tahap 2)":
- Amandemen PSAK 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi IBOR Tahap 2)";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan (Reformasi IBOR Tahap 2)"; dan
- Amandemen PSAK 73 "Sewa (Reformasi IBOR Tahap 2)".

Efektif 1 Januari 2022

- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis (Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan)";
- Amandemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan – Biaya Pemenuhan Kontrak";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan"; dan
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 "Sewa".

Efektif 1 Januari 2023

 Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan (Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Panjang)".

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari penerapan standar dan interpretasi diatas terhadap laporan keuangan Perusahaan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes to SFAS and IFAS (continued)

Other SFAS and IFAS (continued)

New standards, amendments and interpretations issued but effective for the financial year beginning 1 January 2021 are as follows:

Effective 1 January 2021

- The amendments to SFAS 22 "Business Combination";
- The amendments to SFAS 55 "Financial Instruments: Recognition and Measurement (IBOR Reform Batch 2)";
- The amendments to SFAS 60 "Financial Instruments: Disclosures (IBOR Reform Batch 2)";
- The amendments to SFAS 71 "Financial Instruments (IBOR Reform Batch 2)"; and
- The amendments to SFAS 73 "Lease (IBOR Reform Batch 2)".

Effective 1 January 2022

- The amendments to SFAS 22 "Business Combination (References to the Conceptual Framework of Financial Reporting)";
- The amendments to SFAS 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts";
- Annual improvement on SFAS 71 "Financial Instruments": and
- Annual improvement on SFAS 73 "Lease".

Effective 1 January 2023

- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements (Liabilities Classification as Short or Long Term)".

As at the completion date of the financial statements, the Company is still evaluating the impact of the application of the above standards and interpretations on the Company's financial statements.

Lampiran 5/12 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihakpihak Berelasi".

Saldo dan transaksi yang material antara Perusahaan dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Perusahaan memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

d. Penjabaran mata uang asing

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perusahaan.

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transactions with related parties

The Company entered into transactions with related parties as defined in SFAS No. 7 (Revised 2010) "Related Party Disclosures".

Significant transactions and balances of the Company with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the financial statements. The Company elected to disclose the transactions with Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

Transactions with related parties are based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of transactions between unrelated parties.

d. Foreign currency transactions

(i) Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the functional currency). The financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional and presentation currency.

(ii) Transaction and balances

Foreign currency transactions translated into functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into functional currency using the closing exchange rate. The exchange rate used as a benchmark is the rate that is issued by the Bank of Indonesia. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows:

	2020	2019	
1 Dolar Amerika Serikat			1 United States Dollar
("Dolar AS")	14,105	13,901	("US Dollar")

Lampiran 5/13 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

e. Aset keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori sebagai berikut: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) dimiliki hingga jatuh tempo, (iii) pinjaman yang diberikan dan piutang, dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan perolehan aset keuangan. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Perusahaan hanya memiliki aset keuangan kategori (iii) dan (iv).

Aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas dari suatu investasi telah berakhir atau telah ditransfer dan Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

Pinjaman dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan ini digolongkan ke dalam aset lancar kecuali diperkirakan akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Aset keuangan yang disebut terakhir ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan terdiri "kas dan setara kas", "piutang lain-lain" dan "pendapatan bunga yang masih akan diterima" pada laporan posisi keuangan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan pada kategori lain. Aset keuangan ini digolongkan sebagai aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau manajemen bermaksud untuk melepasnya dalam waktu 12 bulan dari akhir periode pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets

Before 1 January 2020

The Company classified its financial assets into the categories of: (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) held-to-maturity investments, (iii) loans and receivables and (iv) available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition. The Company only has financial assets in categories (iii) and (iv).

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Company has transferred substantially all risks and rewards of ownership.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determined payments and not quoted in an active market. These financial assets are included in current assets, except where expected to mature more than 12 months after the end of the reporting period. These are classified as non-current assets.

The Company's loans and receivables comprise "cash and cash equivalents", "other receivables" and "accrued interest income", in the statement of financial position.

Loans and receivables are initially recognised at fair value including directly attributable transaction costs and subsequently carried at amortised cost using the effective interest rate method.

Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are nonderivative financial assets that are designated as available-for-sale or that are not classified in any other category. These financial assets are included in non-current assets unless the investment matures or management intends to dispose of it within 12 months of the end of the reporting period.

Lampiran 5/14 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan tersedia untuk dijual (lanjutan)

Aset keuangan tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengakuan awal, aset keuangan diukur dengan nilai wajar. Perubahan nilai wajar diakui di bagian pendapatan komprehensif lainnya, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs diakui di laporan laba rugi.

Jika suatu aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, maka akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui di bagian pendapatan komprehensif lainnya, diakui dalam laporan laba rugi.

Setelah 1 Januari 2020

Klasifikasi

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Secara umum, aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal.

Pada tanggal pelaporan keuangan, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan dengan kategori sebagai biaya diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan dengan kategori biaya diamortisasi terdiri dari "kas dan setara kas", "piutang lain-lain" dan "pendapatan bunga yang masih akan diterima". Aset keuangan dengan kategori nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari "penyertaan saham".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets (continued)

Before 1 January 2020 (continued)

<u>Available-for-sale financial assets</u> (continued)

Available-for-sale financial assets are initially recognised at fair value, including directly attributable transaction costs. Subsequently, the financial assets are carried at fair value. Changes in the fair value are recognised in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains or losses, which are recognised in the profit or loss.

If the available-for-sale financial assets are impaired, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is recognised in the profit or loss.

After 1 January 2020

Classification

From 1 January 2020, the Company has adopted SFAS No. 71, which sets the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedge accounting.

In general, financial assets are classified in the following two categories:

- 1 Financial assets at amortised cost; and
- 2 Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").

The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition.

As at the reporting date, the Company only has financial assets which are categorised as amortised cost and fair value through other comprehensive income. The Company's amortised cost comprise "cash and cash equivalents", "other receivables" and "accrued interest income". The Company's fair value through other comprehensive income comprise "investment in shares".

Lampiran 5/15 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN **31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 2. **PENTING** (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Klasifikasi (lanjutan)

Perusahaan melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

Pengakuan dan pengukuran

Pembelian dan penjualan aset keuangan diakui pada saat tanggal perdagangan dimana, Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut dialihkan kedaluwarsa atau Perusahaan telah mengalihkan secara substansial risiko dan manfaat atas kepemilikan.

Saat pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikan instrumen utang:

- Biaya perolehan diamortisasi

Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disaiikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya bersama dengan keuntungan dan kerugian selisih kurs. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

POLICIES (continued)

e. Financial assets (continued)

After 1 January 2020 (continued)

Classification (continued)

The Company reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

Recognition and measurement

Regular way purchases and sales of financial assets are recognised on trade date, being the date on which the group commits to purchase or sell the asset. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or have been transferred and the Company has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories in classifying debt instruments:

- Amortised cost

Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses) together with foreign exchange gains and losses. Impairment losses are presented as a separate line item in profit or loss.

Lampiran 5/16 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020 (Expressed in thousands of Rupiah, unless

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

e. Aset keuangan (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif

Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk atau kerugian pengakuan keuntungan penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang diakui dalam sebelumnya penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lain-lain, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.

- Nilai wajar melalui melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Instrumen ekuitas

Perusahaan selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Dimana manajemen Perusahaan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran ditetapkan. Investasi pada instrumen ekuitas tidak diuji penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets (continued)

After 1 January 2020 (continued)

Recognition and measurement (continued)

<u>Debt instruments</u> (continued)

- FVOCI

Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets. where payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment charge is presented as a separate line item in profit or loss.

- FVTPL

Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognised in profit or loss.

Equity instruments

The Company subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Company's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss when the Company's right to receive payments is established. Equity investments are not tested for impairment.

Lampiran 5/17 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

f. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan di dalam laporan posisi keuangan jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajiban secara bersamaan.

g. Penurunan nilai dari aset keuangan

Sebelum 1 Januari 2020

periode Pada setiap akhir pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa kerugian") dan peristiwa kerugian (atau peristiwa) tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Pinjaman dan piutang

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman diberikan memiliki tingkat bunga mengambang, tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan kontrak. Untuk alasan praktis, Perusahaan dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika pada periode selanjutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitur), pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amounts are reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

g. Impairment of financial assets

Before 1 January 2020

At the end of each reporting period, the Company assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Loans and receivables

For the loans and receivables category, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognised in the profit or loss. If a loan has a floating interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the Company may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price.

If in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the reversal of the previously recognised impairment loss is recognised in profit or loss.

Lampiran 5/18 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN **31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

IKHTISAR KEBIJAKAN

PENTING (lanjutan)

YANG 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Expressed in thousands of Rupiah, unless

31 DECEMBER 2020

otherwise stated)

g. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

AKUNTANSI

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Jika terdapat bukti objektif dari penurunan nilai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar saat ini, dikurangi rugi penurunan nilai aset keuangan tersebut yang sebelumnya diakui pada laporan laba rugi – dihapus dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi. Jika, di periode selanjutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah rugi penurunan nilai diakui di laporan laba rugi, rugi penurunan nilai tersebut dibalik melalui laporan laba rugi.

Penurunan nilai atas instrumen ekuitas yang diakui di laporan keuangan tidak dibalik melalui laporan laba rugi pada periode berikutnya.

Setelah 1 Januari 2020

Sejak 1 Januari 2020, Perusahaan mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan piutang lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan diukur dengan jumlah yang sama dengan KKE sepanjang umurnya. KKE sepanjang umurnya adalah KKE yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan. menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan KKE, Perusahaan mempertimbangkan informasi relevan yang waiar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perusahaan dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

POLICIES (continued)

g. Impairment of financial assets (continued)

Before 1 January 2020 (continued)

Available-for-sale financial assets

If there is objective evidence of impairment for available-for-sale financial assets, cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognised in profit or loss is removed from equity and recognised in profit or loss. If, in a subsequent period, the fair value of a debt instrument classified as available-for-sale increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognised, the reversal of any previously recognised impairment loss is recognised through the profit or loss.

Impairment losses on equity instruments recognised in the profit or loss are not reversed through the profit or loss in the subsequent period.

After 1 January 2020

Since 1 January 2020, the Company recognises impairment loss provision for expected credit losses (ECLs) on financial assets measured at amortised cost. Impairment loss provision for other receivables without a significant financing component are measured at an amount equal to lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Perusahaan considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company's historical experience and credit estimates and includes forward looking information.

Lampiran 5/19 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN **31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

KKE adalah perkiraan probabilitas-tertimbang

dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur

sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan

penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus

kas terutang dari suatu entitas berdasarkan

kontrak dan arus kas yang Perusahaan harapkan untuk diterima). KKE didiskontokan

pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan

menentukan apakah aset keuangan yang

dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

mengalami penurunan nilai kredit. Aset

keuangan mengalami penurunan nilai kredit

ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki

dampak merugikan pada perkiraan arus kas

masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa suatu aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit termasuk data yang dapat

- kesulitan keuangan yang signifikan dari

pelanggaran kontrak seperti gagal bayar; atau

ada kemungkinan bahwa pelanggan akan

mengalami kebangkrutan atau reorganisasi

diobservasi sebagai berikut:

keuangan lainnya.

pelanggan;

IKHTISAR KEBIJAKAN

PENTING (lanjutan)

tersebut.

otherwise stated) **AKUNTANSI YANG 2.** SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Expressed in thousands of Rupiah, unless

31 DECEMBER 2020

g. Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan) g. Impairment of financial assets (continued)

After 1 January 2020 (continued)

POLICIES (continued)

ECLs are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Perusahaan expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

At each reporting date, the Company assesses whether financial assets carried at amortised cost are credit-impaired. A financial asset is 'creditimpaired' when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- significant financial difficulty of the customer;
- breach of contract such as default; or
- it is probable that the customer will enter bankruptcy or other financial reorganisation.

h. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, bank dan semua deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Piutang lain-lain

Piutang lain-lain adalah jumlah tagihan dari pihak ketiga atau pihak yang berelasi di luar kegiatan usaha.

Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

h. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or are not restricted.

Other receivables

Other receivables are amounts due from third parties or related parties for transactions outside of the ordinary course of business.

If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.

Other receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less any provision for impairment.

Lampiran 5/20 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

i. Piutang lain-lain

Lihat Catatan 2g untuk kebijakan penentuan jumlah provisi penurunan nilai atas piutang usaha dan piutang lain-lain.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan disajikan sebagai "beban lain-lain, bersih" untuk piutang lain-lain. Ketika piutang lain-lain, yang rugi penurunan nilainya telah diakui, tidak dapat ditagih pada periode selanjutnya, maka piutang tersebut dihapusbukukan dengan mengurangi akun provisi. Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas piutang yang sebelumnya telah dihapusbukukan, dikreditkan terhadap "beban lain-lain, bersih" pada laporan laba rugi.

j. Aset tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Other receivables

See Note 2g for the policy on determining the amount of provision for impairment of trade and other receivables.

The amount of the impairment loss is recognised in profit or loss within "other expenses, net" for other receivables. When a other receivable for which an impairment provision had been recognised becomes uncollectible in a subsequent period, it is written off against the provision account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against "other expenses, net" in profit or loss.

j. Fixed assets

Fixed assets, except land, are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Tahun/Years 5

Perlengkapan dan peralatan kantor

Masa manfaat, nilai sisa dan metode penyusutan aset dikaji dan disesuaikan, jika diperlukan, setidaknya setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan dalam laba rugi dalam tahun buku terjadinya biaya-biaya tersebut.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya penggantian komponen suatu aset dan biaya inspeksi yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset.

Office equipments and supplies

Assets' useful lives, residual values and depreciation methods are reviewed and adjusted if appropriate, at least at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amounts of replaced parts are derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial year in which they are incurred.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred; significant costs of replacing part of assets and major inspection cost are recognised in the carrying amount of the assets if the recognition criteria are met.

Lampiran 5/21 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN **31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

31 DECEMBER 2020

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

2. IKHTISAR KEBIJAKAN **AKUNTANSI** YANG **PENTING** (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Nilai tercatat aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat pelepasan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

Nilai tercatat aset segera diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah terpulihnya.

k. Utang lain-lain

Utang lain-lain berkaitan dengan transaksi pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha normal. Utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar (dikurangi biaya transaksi) dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Sewa

Sebelum 1 Januari 2020

Perusahaan mengadakan perjanjian yang Perusahaan mengandung sewa di mana Perusahaan bertindak sebagai lessee. mengevaluasi apakah secara substansial risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset beralih berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2014), "Sewa", yang mensyaratkan Perusahaan membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan aset.

Perusahaan sebagai penyewa

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Perusahaan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewa pembiayaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan dibebankan langsung pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING **POLICIES** (continued)

j. Fixed assets (continued)

For assets which are no longer utilised or sold, the carrying amounts are eliminated from the financial statements and the resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

k. Other payables

Other payables are amounts due to third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. Other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Other payables are recognised initially at fair value (net of transaction cost) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Leases

Before 1 January 2020

The Company has entered into arrangements that contain lease in which the Company is a lessee. The Company evaluates whether all of the risks and rewards incidental to ownership are substantially transferred based on SFAS No. 30 (Revised 2014), "Leases" which requires the Company to make judgments and estimates of transfer of risks and rewards of the assets.

The Company as lessee

A finance lease that transfers to the Company substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item, is capitalised at the commencement of the leased item at the fair value of the finance lease assets or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly to profit or loss.

Lampiran 5/22 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN

PENTING (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

AKUNTANSI YANG 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Leases (continued)

Sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

_____,

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Aset sewa pembiayaan disusutkan selama masa manfaat dari aset tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat kepastian memadai bahwa Perusahaan akan memperoleh kepemilikan di akhir masa sewa, maka aset disusutkan selama mana yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat aset dan masa sewa.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.

Setelah 1 Januari 2020

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau, setelah 1 Januari 2020.

Perusahaan sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang diidentifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit, dan harus berbeda secara fisik atau secara substansial mewakili seluruh kapasitas aset. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tidak teridentifikasi;
- Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasian selama periode penggunaan; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan telah ditentukan sebelumnya:
 - Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
 - Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Before 1 January 2020 (continued)

The Company as lessee (continued)

Lease assets are depreciated over the useful life of the asset. However, if there is no reasonable certainty that the Company will obtain ownership by the end of the lease term, the asset is depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset and the lease term.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Expressed in thousands of Rupiah, unless

31 DECEMBER 2020

otherwise stated)

Operating lease payments are recognised as an operating expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

After 1 January 2020

From 1 January 2020, the Company has applied SFAS 73 which set the requirements for the recognition of lease liabilities in relation to leases previously classified as 'operating lease'. This policy is applied to contracts entered into or changed, on or, after 1 January 2020.

The Company as lessee

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assesses whether:

- The contract involves the use of an identified asset - this can be explicitly specified or implicitly, and must physically distinct or represents substantially all of the total capacity. If the supplier has substantive substitution rights, then there is no identified asset:
- The Company has the right to obtain substantially all economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Company has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to change how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 - 1. The Company has the right to operate the asset; and
 - The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purposes it will be used throughout the period of use.

Lampiran 5/23 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. **PENTING** (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana bertindak sebagai penyewa, Perusahaan memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeksi atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan
- oleh penyewa dengan jaminan nilai residual; harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut;
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

POLICIES (continued)

I. Leases (continued)

After 1 January 2020 (continued)

The Company as lessee (continued)

At the inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone prices of the non-lease component. However, for the leases of improvements in which the Company is a lessee, the Company has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

The Company recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost. which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Lease liabilities are measured at the present value of any unpaid lease payments at the inception date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that interest rate cannot be determined, then using the incremental borrowing rate. Generally, the Company uses borrowing rate as the interest rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Company is reasonably certain to exercise;
- penalties for early termination of a lease unless the Company is reasonably certain not to terminate early.

Lampiran 5/24 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING PENTING (lanjutan) POLICIES (continued)

I. Sewa (lanjutan)

Setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

Sewa jangka pendek dan yang aset pendasarnya bernilai rendah

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa

Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih;
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- méngukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

otherwise stated) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

(Expressed in thousands of Rupiah, unless

31 DECEMBER 2020

I. Leases (continued)

After 1 January 2020 (continued)

The Company as lessee (continued)

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company presents right-of-use assets and lease liabilities as separate line items in the statement of financial position.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Company has elected not to recognise rightof-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modifications

The Company account for a lease modifications as a separate lease if both:

- modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the standalone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as separate leases, at the effective date of the lease modification, the Company:

- remeasure and allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease;
- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Company's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- decrease the carrying amount of the right-ofuse asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Company recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- make a corresponding adjustment to the right of-use asset for all other lease modifications.

Lampiran 5/25 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

m. Imbalan kerja

Perusahaan harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau KKB adalah program imbalan pasti.

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pascakerja yang akan diterima seorang karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja dan kompensasi.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Besarnya kewajiban imbalan pasti ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara tahunan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan. Di negaranegara yang tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan tingkat suku bunga obligasi pemerintah.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Employee benefits

The Company is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Labour Law No. 13/2003 or the Company's Collective Labour Agreement ("CLA"), whichever is higher. Since the Labour Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The liability recognised in the statement of financial position in relation to the defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the year less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised actuarial gains or losses and past service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. In countries where there is no deep market for such bonds, the market rates on government bonds are used.

The Company recognised gains or losses on curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gains or loss on a curtailment or settlement comprises change in the present value of the defined benefit obligation.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss.

Lampiran 5/26 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

m. Imbalan kerja (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuaria dibebankan atau dikreditkan ke laba komprehensif lainnya yang merupakan bagian dari cadangan lainnya pada tahun dimana terjadinya perubahan tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Untuk program iuran pasti, Perusahaan membayar iuran kepada program asuransi pensiun yang dikelola secara publik atau swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. luran tersebut diakui sebagai biaya manfaat karyawan jika telah jatuh tempo. luran dibayar di muka diakui sebagai aset jika pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham baru atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

n Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham pada Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan Perusahaan dalam periode dimana pembagian dividen diumumkan.

o. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan utama Perusahaan berupa pendapatan bunga dari deposito dan dividen.

Pendapatan dividen dicatat berdasarkan keputusan Pemegang Saham pada saat RUPS.

Pendapatan bunga deposito diakui berdasarkan metode akrual yang didasarkan pada jangka waktu, nilai nominal dan suku bunga yang berlaku kecuali apabila kolektibilitasnya diragukan.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Employee benefits (continued)

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income and presented as part of other reserves in the year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

For defined contribution plans, the Company pays contributions to publicly or privately administered pension insurance plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. The Company has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is available.

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuing of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

n. Dividend

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as a liability in the Company's financial statements in the period in which the dividends are declared.

o. Revenue and expense recognition

The main revenue of the Company consists of interest income from time deposits and dividends.

Dividend income is recorded based as on the decision of the Shareholders at the GSM.

Interest income from deposits is recognised using the accrual method, based on the term period, at the nominal value and the applicable interest rate, unless the collectibility is in doubt.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Lampiran 5/27 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

otherwise stated) SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

31 DECEMBER 2020

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG 2. PENTING (lanjutan)

p. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu berkaitan dengan kejadian atau transaksi yang diakui pada pendapatan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas. Pada kasus tersebut, masingmasing beban pajak juga diakui pada pendapatan komprehensif lainnya atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

penghasilan kini Beban pajak dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan di negara dimana Perusahaan beroperasi dan menghasilkan penghasilan kena Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan terkait dengan situasi dimana diperlukan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Paiak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode balance sheet liability untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan. Rugi pajak yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan jika besar kemungkinan di masa depan akan memadai untuk dikompensasi fiskal yang masih dengan rugi dimanfaatkan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif (atau peraturan) pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan dan diharapkan untuk diterapkan jika aset pajak tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

POLICIES (continued)

p. Taxation (continued)

The tax expense for the year comprises current and deferred tax. Tax expense is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted as at the reporting date in the countries where the Company operates and generates taxable income. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns in situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. Where appropriate, it establishes a provision on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

For income which is subject to final tax, income tax expense is recognised proportionally with the accounting revenue recognised and presented as part of general and administrative expenses in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Deferred income tax is recognised using the balance sheet liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. Tax loss carried forward is recognised as a deferred tax asset when it is probable that there will be future taxable profit available against which the unused tax loss can be utilised. Deferred income tax is determined using tax rates (or laws) that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Lampiran 5/28 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN **31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

otherwise stated)

(Expressed in thousands of Rupiah, unless

31 DECEMBER 2020

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

IKHTISAR KEBIJAKAN **AKUNTANSI YANG 2. PENTING** (lanjutan)

p. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui sepanjang kemungkinan besar penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk menyelesaikan saldo-saldo tersebut secara neto.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING **POLICIES** (continued)

p. Taxation (continued)

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or on different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 3. **AKUNTANSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dimana prinsip tersebut mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjen pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan akan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa mendatang.

Perusahaan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut dimana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan dalam periode mendatang.

SIGNIFICANT **ACCOUNTING** JUDGEMENT, **ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the financial statements is in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, which requires management to provide estimates and assumptions that impact the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and also the amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimations, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations to the occurrence of future events.

The Company has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.

Lampiran 5/29 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 3. AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Ketidakpastian eksposur perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat pada akun taksiran tagihan pajak dapat dipulihkan dan direstitusi oleh Kantor Pajak. Lebih lanjut, manajemen mempertimbangkan liabilitas yang mungkin timbul dari hasil pemeriksaan pajak yang masih diajukan keberatannya.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Perusahaan membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk pajak yang belum diakui harus diakui.

b. Nilai wajar atas investasi ekuitas

Nilai wajar atas investasi ekuitas ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Perusahaan menggunakan pertimbangan dalam menentukan berbagai metode dan asumsi yang terutama berdasarkan pada kondisi pasar yang ada pada akhir tiap periode pelaporan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENT, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

a. Uncertain tax exposures

Based on the tax regulations currently enacted, management assessed whether the amounts recorded under estimated claims for tax refund are recoverable and refundable by the Tax Office. Further, the management also assessed the possible liabilities that may arise from the tax assessments under objection.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. The Company makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine if a tax liability for unrecognised tax should be recognised.

b. Fair value of equity investments

Fair value of equity investments is determined by using valuation techniques. The Company uses its judgement to select a variety of methods and make assumptions that are mainly based on market conditions existing at the end of each reporting period.

Lampiran 5/30 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

5.

Saldo akhir

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2020	2019	
Kas Rupiah	6,676	4,354	Cash on hand Rupiah
Kas pada bank Pihak berelasi (Catatan 18) Rupiah	2,648,857	1,174,967	Cash in banks Related parties (Note 18) Rupiah
Dolar AS	127,704	143,910	US Dollar
Jumlah kas pada bank	2,776,561	1,318,877	Total cash in banks
Deposito berjangka Pihak berelasi (Catatan 18) Rupiah	614,037,000	672,828,002	Time deposits Related parties (Note 18) Rupiah
Dolar AS	5,740,739	15,621,944	US Dollar
Jumlah deposito berjangka	619,777,739	688,449,946	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	622,560,976	689,773,177	Total cash and cash equivalents
Tingkat bunga per tahun deposito	berjangka:	Annual interest follows:	rates on time deposits were as
	2020	2019	
Rupiah Dolar AS	3.96% - 6.00% 0.30%	3.30% - 8.30% 2.80%	Rupiah US Dollar
PIUTANG LAIN-LAIN		5. OTHER RECEIV	/ABLES
PIUTANG LAIN-LAIN	2020	5. OTHER RECEIV	/ABLES
Pihak berelasi (Catatan 18) MTT	2020 8,701,355		/ABLES Related party (Note 18) MTT
Pihak berelasi (Catatan 18)	8,701,355	2019	Related party (Note 18)
Pihak berelasi (Catatan 18) MTT Dikurangi:	8,701,355	2019 8,701,355	Related party (Note 18) MTT Deducted by:
Pihak berelasi (Catatan 18) MTT Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan ni	8,701,355	8,701,355 (8,148,161)	Related party (Note 18) MTT Deducted by: Provision for impairment losses
Pihak berelasi (Catatan 18) MTT Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan ni Pihak berelasi, bersih Pihak ketiga Dikurangi:	8,701,355 lai(8,701,355)	8,701,355 (8,148,161) 553,194	Related party (Note 18) MTT Deducted by: Provision for impairment losses Related party, net
Pihak berelasi (Catatan 18) MTT Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan ni Pihak berelasi, bersih Pihak ketiga	8,701,355 lai(8,701,355)		Related party (Note 18) MTT Deducted by: Provision for impairment losses Related party, net Third parties
Pihak berelasi (Catatan 18) MTT Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan ni Pihak berelasi, bersih Pihak ketiga Dikurangi: Penyisihan kerugian	8,701,355 lai (8,701,355)		Related party (Note 18) MTT Deducted by: Provision for impairment losses Related party, net Third parties Deducted by:
Pihak berelasi (Catatan 18) MTT Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan ni Pihak berelasi, bersih Pihak ketiga Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	8,701,355 lai (8,701,355)		Related party (Note 18) MTT Deducted by: Provision for impairment losses Related party, net Third parties Deducted by: Provision for impairment losses
Pihak berelasi (Catatan 18) MTT Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan ni Pihak berelasi, bersih Pihak ketiga Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai Pihak ketiga, bersih	8,701,355 lai	2019 8,701,355 (8,148,161) 553,194 112,077 112,077 665,271	Related party (Note 18) MTT Deducted by: Provision for impairment losses Related party, net Third parties Deducted by: Provision for impairment losses Third parties, net Total other receivables in the provision for impairment of
Pihak berelasi (Catatan 18) MTT Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan ni Pihak berelasi, bersih Pihak ketiga Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai Pihak ketiga, bersih Jumlah piutang lain-lain Mutasi saldo penyisihan atas penu	8,701,355 lai	8,701,355 (8,148,161) 553,194 112,077	Related party (Note 18) MTT Deducted by: Provision for impairment losses Related party, net Third parties Deducted by: Provision for impairment losses Third parties, net Total other receivables in the provision for impairment of
Pihak berelasi (Catatan 18) MTT Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan ni Pihak berelasi, bersih Pihak ketiga Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai Pihak ketiga, bersih Jumlah piutang lain-lain Mutasi saldo penyisihan atas penu	8,701,355 lai (8,701,355)	8,701,355 (8,148,161) 553,194 112,077	Related party (Note 18) MTT Deducted by: Provision for impairment losses Related party, net Third parties Deducted by: Provision for impairment losses Third parties, net Total other receivables in the provision for impairment of

<u>8,813,662</u> <u>8,148,161</u>

Ending balance

Lampiran 5/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

6. PENYERTAAN SAHAM

Mulai 1 Januari 2020, penyertaan saham di Perusahaan dikategorikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain karena merupakan sekuritas ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan dan dimana Perusahaan telah melakukan pemilihan yang tidak dapat dibatalkan pada pengakuan awal untuk mengakui perubahan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain daripada laba atau rugi dikarenakan ini adalah investasi strategis dan Perusahaan menganggap ini lebih relevan.

Penyertaan saham merupakan porsi kepemilikan saham minoritas pada entitas berelasi di dalam Grup Pertamina. Mutasi saldo penyertaan saham adalah sebagai berikut:

6. INVESTMENT IN SHARES

Starting 1 January 2020, investment in shares in the Company are categorised as financial assets at fair value through other comprehensive income because it is equity securities which are not held for trading and for which the Company has made an irrevocable election at initial recognition to recognise changes in fair value through other comprehensive income rather than profit or loss as these are strategic investments and the Company considered this to be more relevant.

Investments in shares represent minority portions of the shares in related entities within the Pertamina Group. The movements in the investments in shares are as follows:

	2020	2019	
Saldo awal Penyesuaian saldo atas	124,815,694	121,845,070	Beginning balance Opening balance adjustment
penerapan awal PSAK 71 Penambahan Keuntungan neto yang	2,603,035,785 135,421,965	2,970,624	upon initial adoption of PSAK 71 Additions Net gains transfer
yang di transfer ke ekuitas	281,330,889	<u>-</u>	to equity
Saldo akhir	3,144,604,333	124,815,694	Ending balance

Lihat pada Catatan 14 atas pendapatan dividen yang diterima Perusahaan selama tahun 2020 dan 2019.

Jumlah penyertaan saham per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Refer to Note 14 for dividend income received by the Company during 2020 and 2019.

The amounts invested in shares as at 31 December 2020 and 2019 are as follows:

APR-2 -- -- -- 1 - 1 - --

A111 - 1 - - - - - - - -

	Tanggal Mulai Penyertaan/ Date of investment	2020	2019	Nilai wajar 31 Desember/ at fair value 31 December 2020	Nilai wajar 1 Januari/ at fair value 1 January 2020	Nilai perolehan 31 Desember/ at cost 31 December 2019	
DT D d d d d d d d d d d d d d d d d d d	06/08/2010	8.91%	0.04%	1.318.703.413	915.457.832	00.050.000	DT De dessire Oceathers of France
PT Pertamina Geothermal Energy PT Pertamina Hulu Energi	22/01/2008	1.28%	8.91% 1.28%	1,025,095,050	1,127,582,847	69,052,000 6,400,000	PT Pertamina Geothermal Energy PT Pertamina Hulu Energi
PT Pertamina Hulu Energi PT Pertamina EP Cepu	12/02/2013	1.00%	1.26%	431,860,981	469,659,994	9,696,482	PT Pertamina Huiu Eriergi PT Pertamina EP Cepu
PT Tuban Petro Industries	31/03/2020	2.01%	1.00%		409,009,994	9,090,462	PT Pertamina EP Cepu PT Tuban Petro Industries
PT Pertamina Training				133,185,947	-	-	PT Pertamina Training
and Consulting	02/08/2010	9.00%	9.00%	46,575,443	41,758,538	1,150,200	and Consulting
PT Trans Javagas Pipeline	16/08/1994	10.00%	10.00%	35,499,177	35,499,177	9,197,809	PT Trans Javagas Pipeline
PT Pertamina Hulu SangaSanga	27/07/2017	1.00%	1.00%	21,331,086	17,050,142	15,000	PT Pertamina Hulu Sanga Sanga
PT Pertamina Hulu Rokan	21/12/2018	0.13%	0.13%	17,967,900	20,536,797	14,776,840	PT Pertamina Hulu Rokan
PT Pertamina Lubricants PT Pertamina Hulu	03/02/2013	0.05%	0.05%	14,420,135	13,073,973	1,706,000	PT Pertamina Lubricants PT Pertamina Hulu
Kalimantan Timur	12/07/2018	1.00%	1.00%	14,094,387	13,572,774	15,000	Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Indonesia	13/12/2017	0.00%	0.00%	13,463,767	12,486,292	0	PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina EP	47/04/0044	4 000/	4.000/	40 400 004	44.074.004	0.500	PT Pertamina EP Cepu
Cepu Alas Dara Kemuning	17/01/2014	1.00%	1.00%	13,189,394	11,971,834	2,500	Alas Dara Kemuning
PT Kilang Pertamina International	13/11/2017	0.10%	0.10%	12,604,655	1,956,304	1,214,285	PT Kilang Pertamina International
PT Patra Badak Arun Solusi PT Pertamina Drilling Services	31/10/2010	3.99%	3.99%	11,182,997	10,406,269	1,406,311	PT Patra Badak Arun Solusi PT Pertamina Drilling Services
Indonesia	13/12/2017	0.11%	0.11%	6,573,603	7,214,839	900,820	Indonesia
PT Pertamina International	10/12/2017	0.1170	0.1170	0,070,000	1,214,000	300,020	PT Pertamina International
Shipping	13/12/2017	0.05%	0.05%	6.215.195	4.588.169	667.817	Shipping
PT Pertamina EP	12/02/2013	0.01%	0.01%	5,449,132	6.282.822	3.733.026	PT Pertamina EP
PT Mitra Tours & Travel	08/08/2011	10.00%	10.00%	4,627,949	5,052,938	1,718,257	PT Mitra Tours & Travel
PT Pertamina Gas	13/12/2017	0.01%	0.01%	3,354,500	3,204,698	1,045,597	PT Pertamina Gas
PT Badak Natural Gas	10/12/2017	0.0170	0.0170	0,004,000	0,204,000	1,040,007	PT Badak Natural Gas
Liquefaction	15/03/2019	15.00%	15.00%	2.445.411	2.856.656	583.848	Liquefaction
PT Pelita Air Service	13/12/2017	0.00%	0.00%	1,375,279	1,355,387	14,329	PT Pelita Air Service
PT Kilang Pertamina Balikpapan	26/12/2019	0.10%	0.10%	1.084.168	1,177,446	1.183.991	PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Pertamina Bina Medika	02/03/1998	0.02%	0.02%	1,021,448	1,697,064	148,400	PT Pertamina Bina Medika
PT Pertamina Algeria EP	03/09/2014	0.00%	0.00%	890.239	941.116	1.000	PT Pertamina Algeria EP
PT Pertamina Malaysia EP	25/09/2014	0.00%	0.00%	753,189	896,346	1,000	PT Pertamina Malaysia EP
PT Patra Jasa	13/12/2017	0.02%	0.02%	515,842	591,843	107,750	PT Patra Jasa
PT Pertamina Hulu Attaka	27/07/2017	1.00%	1.00%	404,103	397,947	15,000	PT Pertamina Hulu Attaka
PT Pertamina Retail	13/12/2017	0.00%	0.00%	259.058	207,910	13,274	PT Pertamina Retail
PT Pertamina Trans Kontinental	13/12/2017	0.00%	0.00%	257,960	234,214	22,430	PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertamina Hulu West Ganal	19/09/2019	1.00%	1.00%	91,408	15,021	15,000	PT Pertamina Hulu West Ganall
PT Pertamina Internasional							PT Pertamina Internasional
Eksplorasi dan Produksi	30/12/2013	0.07%	0.07%	89,541	104,606	1,000	Eksplorasi dan Produksi
PT Pertamina Power Indonesia	13/12/2017	0.00%	0.00%	19,637	17,369	8,476	PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina East Natuna	16/03/2012	0.10%	0.10%	1,250	1,250	1,250	PT Pertamina East Natuna
PT Pertamina Irak Eksplorasi							PT Pertamina Irak Eksplorasi
Produksi	30/12/2013	0.00%	0.00%	1,087	1,063	1,000	Produksi
PT Pertamina Hulu Energi Arun	19/12/2017	0.00%	0.00%	2	2	2	PT Pertamina Hulu Energi Arun
Jumlah				3,144,604,333	2,727,851,479	124,815,694	Total

Lampiran 5/32 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

7.	UTANG	LAIN-LAIN
	•	

7. OTHER PAYABLES

	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 18) Pihak ketiga	200,874 2,233,503	141,672 2,244,551	Related parties (Note 18) Third parties
Jumlah	2,434,377	2,386,223	Total

8. UANG MUKA YANG DITERIMA DARI TJP

8. ADVANCE RECEIVED FROM TJP

	2020	2019	
Uang muka dari dividen TJP	5,689,601	17,082,874	Advance dividend from TJP
Jumlah	5,689,601	17,082,874	Total

Uang muka yang diterima dari TJP merupakan penerimaan dimuka untuk pembagian dividen dari TJP di masa mendatang. Jumlah dividen akan diputuskan berdasarkan RUPS TJP di masa depan.

Advance received from TJP represents advance receipt for future dividend distributions from TJP. The dividends amount will be decided based on the future AGMS of TJP.

9. LIABILITAS YANG MASIH HARUS DIBAYAR

9. ACCRUED LIABILITIES

-	2020	2019	
Beban karyawan dan manajemen kunci	3.389.209	3,587,882	Employee and key management
Beban kantor	2,409,710	2,270,650	expenses Office expense
Jumlah _	5,798,919	5,858,532	Total

10. SEWA

10. LEASES

a. Aset hak guna

a. Right-of-use assets

		2020		
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance	
<u>Harga perolehan</u> Bangunan Kendaraan	581,868 -	367,799 658,547	949,667 658,547	<u>Acquisition cost</u> Building Vehicle
Jumlah nilai tercatat	581,868	1,026,346	1,608,214	Total carrying value
<u>Akumulasi penyusutan</u> Bangunan Kendaraan	<u> </u>	(345,795) (171,722)	(345,795) (171,722)	<u>Accumulated depreciation</u> Building Vehicle
Jumlah akumulasi penyusutan	<u> </u>	(517,517)	(517,517)	Total accumulated depreciation
Nilai buku bersih	581,868	=	1,090,697	Net book value
Alokasi beban penyusutan sebagai berikut:	aset hak-guna adala	,	eciation expense ated as follows:	of right-of-use assets was
	2020	2019		
Beban usaha (Catatan 16)	517,51	7	<u>-</u>	Operating expense (Note 16)
Jumlah	517,51	<u> </u>	<u>-</u>	Total

Lampiran 5/33 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN **31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS **31 DECEMBER 2020**

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

lease liabilities

Repayments of lease liabilities

10. SEWA (lanjutan)

10. LEASES (continued)

b. Liabilitas sewa

b. Lease liabilities

	2020	2019	
Saldo awal Penambahan Beban bunga Pembayaran	520,877 1,026,346 61,135 (556,495)	- - - -	Beginning balance Additions Interest expense Payments
Saldo akhir	1,051,863	<u> </u>	Ending balance
Bagian lancar	559,300	<u> </u>	Current portion
Bagian tidak lancar	492,563	<u>-</u>	Non-current portion
Laporan arus kas menyajikar berkaitan dengan sewa:	n saldo berikut		ments of cash flows show the following related to leases:
_	2020	2019	
Arus kas dari aktivitas pendanaan Pembayaran untuk beban	(0.4.407)		Cash flow from financing activities Payments for interest expense of

(61,135)

(495,360)

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

a. Taksiran tagihan pajak

bunga liabilitas sewa

Pembayaran kembali atas liabilitas sewa

a. Claims for tax refund

		2020	2019	
	Lebih bayar pajak penghasilan badan 2019 2018 2017 2016	16,236,445 17,547,820 9,734,491 30,331,137	16,236,445 17,547,820 9,734,491 30,331,137	Overpayment of corporate income tax 2019 2018 2017 2016
	Dikurangi: Provisi	(58,004,437)	(19,046,835)	Deducted by: Provisions
	Jumlah	<u>15,845,456</u>	54,803,058	Total
b.	Utang pajak		b. Taxes payable	
		2020	2019	
	Pajak penghasilan: Kurang bayar pajak penghasilan badan 2020	12,221,793	-	Corporate income taxes Underpayment of corporate income taxes 2020
	Pajak lain-lain: Pasal 21 Pasal 23 Pasal 4(2)	149,210 175 14,908	80,005 15,120 14,427	Other taxes: Article 21 Article 23 Article 4(2)
	Jumlah	12,386,086	109,552	Total

Lampiran 5/34 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expenses

	2020	2019	
Beban pajak kini Penyesuaian tahun lalu	35,662,138 38,957,602	- 11,503,932	Current income taxes Adjustment in respect of prior year
Jumlah beban pajak penghasilan	74,619,740	11,503,392	Total income tax expense
Perhitungan beban pajak adalah sebagai berikut:	kini Perusahaan		ation of the current corporate income e is as follows:
	2020	2019	
Laba sebelum pajak penghasilan	186,219,834	132,746,863	Profit before income tax
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final Pajak penghasilan final	(31,717,719)	(51,243,399)	Income subject to final tax Final income tax on interest
atas pendapatan bunga deposito dan giro	6,470,782	10,287,398	income from current account and time deposits
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk			Expenses not deductible
tujuan pajak Penyisihan untuk	256,234	1,249,613	for tax purposes
imbalan kerja Provisi penurunan nilai	172,164 665,501	474,283 5,434,773	Provision for employee benefits Provision for impairment losses
Pesangon, tantiem dan biaya lainnya	-	1,171,000	Severance program, tantiem and other costs
Sewa	38,833	-	Leases
Perbedaan penyusutan komersial dan fiskal	(5,000)	(6,788)	Difference between commercial and fiscal depreciation
Penghasilan kena pajak	162,100,629	100,113,743	Taxable income for the year
Beban pajak penghasilan kini Pemanfaatan rugi pajak	35,662,138 -	25,028,436 (25,028,436)	Current income tax expense Utilisation of tax loss carried forward
Pajak penghasilan badan dibayar di muka	(22,440,245)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Prepaid income taxes
Pasal 23	(23,440,345)	(16,236,445)	Article 23
Pajak penghasilan kurang/ (lebih) bayar - tahun berjalan	12,221,79 <u>3</u>	(16,236,44 <u>5</u>)	Under/(over) payment of corporate income tax - current year
verjalali	12,221,133	(10,230,443)	moonie lax - current year

Lampiran 5/35 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

11. TAXATION (continued)

c. Income tax expenses (continued)

The reconciliation between income tax expense calculated using the prevailing tax rate from the profit before income tax reported in profit or loss is as follows:

_	2020	2019	
Laba sebelum pajak			
penghasilan	186,219,834	132,746,863	Profit before income tax
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	40,968,363	33,186,716	Tax expense calculated using the prevailing tax rate
Pengaruh pajak atas beda tetap	(5,497,954)	(9,926,597)	Tax effect of permanent differences
Pemanfaatan rugi fiskal yang			Utilisation of tax losses which
sebelumnya tidak diakui sebagai aset pajak tangguhan		(25,028,436)	previously was not recognised as deferred tax asset
Aset pajak tangguhan	<u>-</u>	(23,020,430)	dererred tax asset
yang tidak diakui	191,729	1,768,317	Unrecognised deferred tax asset
	35,662,138		
	35,662,136	-	
Penyesuaian tahun lalu	38,957,602	11,503,932	Adjustment in respect of prior year
Beban pajak penghasilan	74,619,740	11,503,932	Income tax expense

Penyesuaian tahun lalu di tahun 2019 sebesar Rp11.503.932 dilakukan untuk mencadangkan perhitungan pajak penghasilan tahun 2016-2018 berdasarkan perkembangan dan hasil audit dan pengadilan pajak.

Penyesuaian tahun lalu di tahun 2020 sebesar Rp38.957.602 dilakukan untuk mencadangkan perhitungan pajak penghasilan tahun 2016-2019 berdasarkan perkembangan dari hasil audit pajak dan pengadilan pajak.

Adjustment in respect of prior years in 2019 of Rp11,503,932 is a provision for 2016-2018 income tax calculations based on the development in tax audits and tax courts of the Company.

Adjustment in respect of prior years in 2020 of Rp38,957,602 is a provision for 2016-2019 income tax calculations based on the development in tax audits and tax courts of the Company.

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan

Pengaruh pajak atas beda temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

d. Deferred tax assets/(liabilities)

The tax effects of significant temporary differences between commercial and tax reporting are as follows:

	1 Januari/ January 2020	Dampak penerapan standar baru/ Impact of adoption new standard	Dikreditkan/ (dibebankan) pada laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ada rugi komprehensif lainnya/ Credited/ to other comprehensive loss	Penyesuaian terkait perubahan tarif pajak/ Adjustment related to changes in tax rate	Bagian aset pajak tangguhan yang tidak diakui/ Unrecognised portion of deferred tax assets	31 Desember December 2020	
								Employee benefits
Liabilitas imbalan kerja	-	-	37,876	136,546	167,793	(342,215)	-	liabilities
Penyisihan kerugian			440.440			(440,440)		Provision for
nilai	-	-	146,410	-	-	(146,410)	-	impairment
Aset tetap	-	-	(1,100)	-	-	1,100	-	Fixed asset
Sewa Pengukuran kembali	-	-	8,543	-	-	(8,543)	-	Leases Remeasurement of
investasi saham	_	(650,758,946)	_	(61,892,795)	135.778.406	_	(576,873,335)	investment in shares
Rugi fiskal	-	(000,700,010)	45,464,995	(01,002,100)	-	(45,464,995)	(0.0,0.0,000)	Fiscal loss
•								
Liabilitas pajak								Deferred tax
tangguhan, bersih		(650,758,946)	45,656,724	(61,756,249)	135,946,199	(45,961,063)	(576,873,335)	liabilities, net

Lampiran 5/36 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

d. Deferred tax assets/(liabilities) (continued)

	1 Januari/ January 2019	(Dibebankan)/ dikreditkan pada laporan laba rugi/ (Charged)/ credited to profit or loss	Dibebankan pada pendapatan komprehensif/ Charged to comprehensive income	Bagian aset pajak tangguhan yang tidak diakui/ Unrecognised portion of deferred tax assets	31 Desember/ December 2019	
Liabilitas imbalan kerja	-	116,954	1,617	(118,571)	-	Employee benefits liabilities Provision
Penyisihan kerugian nilai Pesangon, tantiem	-	1,358,693	-	(1,358,693)	-	for impairment losses Severance program,
dan biaya lainnya	-	292,750	-	(292,750)	-	tantiem and other costs
Rugi fiskal	-	(25,028,436)	-	25,028,436	-	Fiscal loss
Aset tetap		(1,697)	<u> </u>	1,697		Fixed asset
Aset pajak tangguhan, bersih	<u>-</u>	(23,261,736)	1,617	23,260,119		Deferred tax assets, net

e. Administrasi

Perusahaan telah berpartisipasi dalam program amnesti pajak di tahun 2017. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia Perusahaan yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

f. Pemeriksaan Pajak

Pada tanggal 8 Agustus 2017, Perusahaan mendapatkan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak dari DJP terkait dengan penyampaian SPT PPh Badan tahun 2016 yang menyatakan bahwa Perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar Rp357.522.316 dan lebih bayar pajak sebesar Rp30.331.137.

Pada tanggal 27 April 2018, Perusahaan memperoleh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas pemeriksaan pajak tahun 2016 yang menyatakan Perusahaan kurang bayar sebesar Rp7.342.364. Atas kurang bayar pajak tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Perusahaan pada tanggal 13 Agustus 2018 dan dibebankan sebagai beban di tahun 2018. Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Pembatalan SKPKB kepada DJP pada tanggal 22 Oktober 2018 dan ditolak oleh DJP pada tanggal 10 Juli 2019. Perusahaan kemudian mengajukan surat gugatan atas hasil keputusan DJP pada tanggal 17 Januari 2020 ke Pengadilan Pajak. Hingga tanggal penyelesaian keuangan, Perusahaan laporan menunggu hasil keputusan dari Pengadilan Pajak.

e. Administration

The Company participated in a tax amnesty program in 2017. Under the taxation laws of Indonesia, the Company calculates and pays taxes on the basis of self assessment. The Directorate General of Taxes (the "DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

f. Tax assessment

On 8 August 2017, the Company received a notification letter for a tax audit from the DGT related to the submission of the corporate income tax return in 2016, which stated that the Company has incurred tax losses of Rp357,522,316 and tax overpayment of Rp30,331,137.

On 27 April 2018 the Company received a Tax Underpayment Assessment ("SKPKB") Letter which assessed underpayment of corporate income tax for 2016 amounting to Rp7,342,364 The Company paid the tax underpayment on 13 August 2018 and charged the amount as an expense in 2018. The Company submitted a cancellation request letter on the SKPKB to the DGT on 22 October 2018 but it was rejected by the DGT on 10 July 2019. Subsequently, on 17 January 2020, the Company filed a tax lawsuit to the Tax Court on the DGT's decision until the authorisation date of these financial statements, the Company is still waiting for the decision from Tax Court.

Lampiran 5/37 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pemeriksaan Pajak (lanjutan)

Pada tanggal 4 April 2019, Perusahaan memperoleh SKPKB atas pemeriksaan pajak tahun 2017 yang menyatakan Perusahaan kurang bayar sebesar Rp296.394. Atas kurang bayar pajak tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Perusahaan pada tanggal 21 November 2019 dan dibebankan sebagai beban di tahun 2019. Perusahaan telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan SKPKB kepada Kantor Pajak pada tanggal 25 Juni 2019.

Pada tanggal 8 Oktober 2019, Perusahaan memperoleh SKPKB atas pemeriksaan pajak tahun 2018 yang menyatakan Perusahaan kurang bayar sebesar Rp6.816.050. Atas kurang bayar pajak tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Perusahaan pada tanggal 6 November 2019 dan dibebankan sebagai beban di tahun 2019. Perusahaan telah mengajukan Surat Permohonan Pembatalan SKPKB kepada Kantor Pajak pada tanggal 17 Desember 2019.

Pada tanggal 17 Desember 2020, Perusahaan memperoleh SKPKB atas pemeriksaan pajak tahun 2019 yang menyatakan Perusahaan kurang bayar sebesar Rp11.536.073. Atas kurang bayar pajak tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Perusahaan dan telah dibebankan sebagai beban di tahun 2020. Perusahaan sedang dalam proses pengajuan surat keberatan.

Atas surat gugatan yang diajukan oleh Perusahaan atas SKPKB tahun pajak 2016, Perusahaan berpendapat bahwa pembayaran hasil pengembangan investasi ke Pertamina layak diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan Perusahaan. Perusahaan berpendapat kemungkinan lebih besar dari pada tidak terjadi bahwa posisi pajaknya dapat dipertahankan di Pengadilan Pajak.

Perusahaan berkeyakinan bahwa hasil akhir dari kasus pajak tidak akan memiliki dampak yang merugikan secara material terhadap posisi laporan keuangan dan arus kas Perusahaan.

g. Tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintahan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") untuk menjadi UU No. 2 tahun 2020, terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi penyakit *Coronavirus* 2019 ("COVID-19") yang di antara lain, merubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

11. TAXATION (continued)

f. Tax assessment (continued)

On 4 April 2019, the Company received a SKPKB which assessed underpayment of corporate income tax for 2017 amounting to Rp296,394. The Company paid the tax underpayment on 21 November 2019 and charged the amount as an expense in 2019. The Company submitted a cancellation request letter on the SKPKB to the DGT on 25 June 2019.

On 8 October 2019, the Company received a SKPKB which assessed underpayment of corporate income tax for 2018 amounting to Rp6,816,050. The Company paid the tax underpayment on 6 November 2019 and charged the amount as an expense in 2019. The Company submitted a cancellation request letter on the SKPKB to the DGT on 17 December 2019.

On 17 December 2020, the Company received a SKPKB which assessed underpayment of corporate income tax for 2019 amounting to Rp11,536,073. The Company has not paid the tax underpayment and charged the amount as an expense in 2020. The Company is still in progress to submit the objection letter.

On the Company's tax lawsuit for the SKPKB year 2016, the Company is of the opinion that the return on investment paid to Pertamina is an appropriate deduction for purposes of calculating the Company's taxable income. As such, the Company believes its position is more likely than not will be sustained in the Tax Court.

The Company believes the outcome of the tax dispute will not have a material adverse impact on the Company's financial position and cash flows.

g. Tax rates

On 31 March 2020, the Government issued Government Regulation No. 1/2020, which has been approved by the Indonesian Parliament ("DPR") as Law No. 2 year 2020, relating to state financial policies and financial system stability in response to the outbreak of Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") pandemic in which among others, changed the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal years 2020-2021 and 20% for fiscal year 2022 onwards.

Lampiran 5/38 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

12. MODAL SAHAM

Jumlah

12. SHARE CAPITAL

Modal

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut: As at 31 December 2020 and 2019, the Company's shareholders are as follows:

	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	saham yang ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and of paid up capital	
PT Pertamina (Persero) PT Patra Niaga	174,875 125	99,93% 	174,875,000 125,000	PT Pertamina (Persero) PT Patra Niaga
Jumlah	<u>175,000</u>	100.00%	<u>175,000,000</u>	Total

13. PENCADANGAN SALDO LABA DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Berdasarkan Risalah RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 22 Juli 2020, pemegang saham memutuskan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2019 sebesar 70% sebagai dividen sebesar Rp84.870.054 dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Dividen telah dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2020.

Berdasarkan Risalah RUPS Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Mei 2019, pemegang saham memutuskan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2018 sebesar 100% sebagai dividen sebesar Rp78.091.372 dan Rp39.045.685 dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Dividen telah dibayarkan pada tanggal 2 Juli 2019.

13. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS AND DISTRIBUTION OF NET INCOME

Based on the Minutes of the Annual GSM, which was held on 22 July 2020, the shareholders decided that the utilisation of the Company's net income for the fiscal year 2019 was 70% for dividend amounted Rp84,870,054 from unappropriated retained earnings. The dividend was paid on 16 July 2020.

Based on the Minutes of the Annual GSM, which was held on 24 May 2019, the shareholders decided that the utilisation of the Company's net income for the fiscal year 2018 was 100% for dividend amounted Rp78,091,372 and Rp39,045,685 from unappropriated retained earnings. The dividend was paid on 2 July 2019.

Total

14.	PENDAPATAN D SAHAM	IVIDEN	DARI	PENYERTAAN	14. DIVIDEND SHARES	INCOME	FROM	INVESTMENT	IN
			_	2020	2019	_			
	Pihak berelasi (Cata	atan 18)	_	165,951,340	109,498,19	<u>5</u>	Rela	ted parties (Note	18)
	Jumlah		=	165,951,340	109,498,19	<u>5</u>		7	otal
15.	PENDAPATAN BU	INGA			15. INTEREST	INCOME			
			_	2020	2019	_			
	Pihak berelasi (Cat	tatan 18)	_	31,717,719	51,243,39	9	Rela	ted parties (Note	e 18)

31,717,719 51,243,399

Lampiran 5/39 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

16. BEBAN USAHA

16. OPERATING EXPENSE

<u>.</u>	2020	2019	
Beban karyawan dan manajemen			Employee and key management
kunci	6,341,051	7,200,695	expenses
Beban kantor	2,057,730	2,768,252	Office expenses
			Depreciation expenses –
Beban penyusutan - Aset hak guna	517,517	-	Right-of-use asset
Beban penyusutan - Aset Tetap	20,000	27,150	Depreciation expenses – Fixed Asset
Beban sewa kantor	<u>-</u> _	634,773	Rent office expenses
Jumlah	8,936,298	10,630,870	Total

17. LAIN-LAIN, BERSIH

17. OTHERS, NET

<u> </u>	2020	2019	
Pendapatan lain-lain	330,836	41,338	Other income
Keuntungan/(kerugian)			Gain/(loss) on exchange rate
selisih kurs	4,397,905	(1,535,090)	translation
Biaya penyisihan			Impairment losses
penurunan nilai MTT (Catatan 5)	(665,501)	(5,434,773)	provision of MTT (Note 5)
Beban lain-lain	(44,250)	(147,938)	Other expenses
Jumlah	4,018,990	(7,076,463)	Total

18. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

18. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi berdasarkan ketentuan dan kondisi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Saldo-saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: In conducting its business, the Company has made several transactions with related parties, based on terms and conditions agreed by both parties.

The significant balances with the related parties as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalents (Note 4)

_	2020	2019	
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk ("BRI")	1,497,535	7,315	(Persero) Tbk ("BRI")
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	(PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(''Mandiri'')	696,393	1,143,445	(''Mandiri'')
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
("BNI Syariah")	250,369	4,768	("BNI Syariah")
PT Bank Syariah Mandiri ("BSI	И ") 74,599	9,870	PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")
PT Bank Rakyat Indonesia			PT Bank Rakyat Indonesia
Syariah ("BRI Syariah")	51,270	-	("BRI Syariah")
PT Bank Tabungan Negara			
("BTN")	56,498	3,096	PT Bank Tabungan Negara ("BTN")
BNI	22,193	5,234	BNI
BRI Agro _	<u>-</u>	1,239	BRI Agro
-	2,648,857	1,174,967	
Dolar AS			US Dollar
Mandiri	96,599	98,552	Mandiri
BNI _	31 <u>,105</u>	45,358	BNI
_	127,704	143,910	
Jumlah kas pada bank	2,776,561	1,318,877	Total cash in banks

Lampiran 5/40 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

- 18. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) 18. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)
 - a. Kas dan setara kas (Catatan 4) (lanjutan)

 a. Cash and cash equivalents (Note 4) (continued)

	-	2020	2019	
	Deposito berjangka			Time deposits
	Rupiah BSM BNI Syariah BRI Syariah BTN BRI BNI BRI Agro	158,550,000 139,085,000 144,890,000 122,200,000 27,170,000 22,142,000	11,775,000 111,465,000 381,016,002 28,284,000 17,736,000 65,205,000	Rupiah BSM BNI Syariah BRI Syariah BTN BRI BNI BRI Agro
	Mandiri _	614,037,000	57,347,000 672,828,002	Mandiri Mari e na
	Dolar AS BNI _	5,740,739 5,740,739	15,621,944 15,621,944	US Dollar BNI
	Jumlah deposito berjangka _	619,777,739	688,449,946	Total time deposits
	Jumlah kas di bank	622,554,310	689,768,823	Total cash in bank
	Persentase dari jumlah aset	<u> 16.45%</u>	<u>79.12%</u>	Percentage from total assets
b.	Piutang lain-lain (Catatan 5)		b. Other recei	ivables (Note 5)
	-	2020	2019	
	PT MTT	8,701,355	8,701,355	PT MTT
	Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(8,701,355)	(8,148,161)	Deducted by: Allowance for impairment losses
	Jumlah piutang- bersih		553,194	Total other receivable- net
	Persentase dari jumlah aset	0%	0.06%	Percentage from total assets
c.	Utang lain-lain (Catatan 7)		c. Other paya	bles (Note 7)
	-	2020	2019	
	PT Patra Jasa PT Tugu Pratama Indonesia PT Pertamina Bina Medika PT PTC	110,980 64,839 1,955 23,100	110,980 22,437 8,255	PT Patra Jasa PT Tugu Pratama Indonesia PT Pertamina Bina Medika PT PTC
	Jumlah ₌	200,874	141,672	Total
	Persentase dari jumlah liabilitas ₌	0.03%	0.54%	Percentage from total liabilities

Lampiran 5/41 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN **31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

18. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) 18. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

d. Pendapatan dividen dari penyertaan saham (Catatan 14)

d. Dividend income from investments in shares (Note 14)

_	2020	2019	
PT Pertamina EP Cepu	97,604,805	48,454,848	PT Pertamina EP Cepu
PT Pertamina Hulu Energi	53,842,635	39,271,047	PT Pertamina Hulu Energi
PT TJP	12,192,126	19,792,503	PT TJP
PT Pertamina EP	939,202	1,015,660	PT Pertamina EP
PT Pertamina Lubricants	853,297	444,402	PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Hulu Indonesia	481,583	-	PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Gas	35,922	52,631	PT Pertamina Gas
PT Pertamina Trans Kontinental	1,770	-	PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertamina Training &			
Consulting	-	369,043	PT Pertamina Training & Consulting
PT Pertamina Drilling Services			PT Pertamina Drilling Services
Indonesia	-	97,928	Indonesia
PT Patra Jasa		133	PT Patra Jasa
lumlah	165 051 340	400 409 405	Total
Jumlah <u> </u>	<u>165,951,340</u>	<u>109,498,195</u>	Total
Persentase dari jumlah pendapatan usaha	<u>83,95%</u>	<u>68.12%</u>	Percentage from total revenue

e. Pendapatan bunga (Catatan 15)

e. Interest income (Note 15)

2020	2019	
11,221,253	27,539,042	BTN
5,824,732	-	BRI Syariah
5,527,765	-	BNI Syariah
5,003,580	-	BSM
1,483,496	3,788,213	BRI
1,225,473	6,260,175	BNI
747,000	7,371,508	BRI Agro
684,420	6,284,461	Mandiri
31,717,719	51,243,399	Total
<u> 16.05%</u>	<u>31.88%</u>	Percentage from total revenue
	11,221,253 5,824,732 5,527,765 5,003,580 1,483,496 1,225,473 747,000 684,420	11,221,253 27,539,042 5,824,732 - 5,527,765 - 5,003,580 - 1,483,496 3,788,213 1,225,473 6,260,175 747,000 7,371,508 684,420 6,284,461 31,717,719 51,243,399

f. Remunerasi karyawan kunci

Berikut adalah honorarium dan imbalan kepada Dewan Komisaris dan Direksi:

Key personnel remuneration

Following are honorarium and benefit for Board of Commissioner and Director:

_	2020	2019	
Gaji, tunjangan dan tantiem			Directors salaries, allowance
Direksi	2,274,042	4,517,498	and tantiem
Honor komisaris _	280,649	168,000	Commissioner honorarium
Jumlah _	2,554,691	4,685,498	Total

Lampiran 5/42 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

18. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) 18. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

g Hubungan dengan pihak berelasi

Sifat dari hubungan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

g. Relationships with related parties

The nature of relationships with related parties are as follows:

Pihak-pihak yang berelasi/ Related parties

Sifat hubungan/ Nature of relationship

riciated parties	Nature of relationship
PT Pertamina (Persero)	Induk Perusahaan/Parent Company
PT Pertamina Patra Niaga	Induk Perusahaan/Parent Company
PT Patra Badak Arun Solusi	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pelita Air Service	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina Bina Medika	Pihak berelasi/Related parties
PT Pertamina East Natuna	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina East Naturia PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina EP dan PT Pertamina EP Cepu	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina Geothermal Energy	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina Hulu Energi	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina Internasional Eksplorasi	Fillak belelasi/Relateu parties
dan Produksi	Dibak haralasi/Balatad narting
	Pihak berelasi/Related parties
Pertamina Lubricants	Pihak berelasi/Related parties
PT Pertamina Shipping	Pihak berelasi/Related parties
PT Kilang Pertamina International	Pihak berelasi/Related parties
Patra Jasa	Pihak berelasi/Related parties
PT Pertamina Trans Kontinental	Pihak berelasi/Related parties
PT Pertamina Drilling Service Indonesia	Pihak berelasi/Related parties
PT Pertamina Hulu Rokan	Pihak berelasi/Related parties
PT Pertamina Gas	Pihak berelasi/Related parties
PT Pertamina Power Indonesia	Pihak berelasi/Related parties
PT Pertamina Retail	Pihak berelasi/Related parties
PT Pertamina Training & Consulting	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina Hulu Indonesia	Pihak berelasi/Related parties
PT Pertamina Malaysia EP	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina Hulu Energi Arun	Pihak berelasi/Related parties
PT Pertamina Irak EP	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina Algeria EP	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina Hulu Attaka	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Mitra Tours and Travel	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Trans Javagas Pipeline	Entitas asosiasi/Associates
PT Kilang Pertamina Balikpapan	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Pertamina International Shipping	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Badak NGL	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
PT Tuban Petro Industries	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>
Bank Mandiri	Entitas berelasi dengan Pemerintah/Government related entity
PT Bank BNI Syariah	Entitas berelasi dengan Pemerintah/Government related entity
Bank Negara Indonesia	Entitas berelasi dengan Pemerintah/Government related entity
Bank Rakyat Indonesia	Entitas berelasi dengan Pemerintah/Government related entity
Bank Tabungan Negara	Entitas berelasi dengan Pemerintah/Government related entity
Bank Syariah Mandiri	Entitas berelasi dengan Pemerintah/Government related entity
Bank BRI Syariah	Entitas berelasi dengan Pemerintah/Government related entity
Bank BRI Agro	Entitas berelasi dengan Pemerintah/Government related entity
•	-

Lampiran 5/43 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Undang-Undang Cipta Kerja

Pada tanggal 5 Oktober 2020, DPR telah menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law. Omnibus Law tersebut disahkan pada tanggal 2 November 2020 sebagai Undang-Undang No 11/2020. Omnibus Law merupakan instrumen legislatif komprehensif yang akan berlaku untuk mengubah secara langsung sejumlah besar produk hukum di berbagai macam sektor dari perizinan ketenagakerjaan dan pengadaan tanah sampai perpajakan yang semuanya bertujuan untuk mendorong reformasi sistem regulasi negara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia melalui peningkatan investasi dan lapangan kerja. Pada bulan Februari 2021, mengundangkan 49 Pemerintah resmi peraturan pelaksana Omnibus Law. Perusahaan menilai pada umumnya peraturan pelaksana tersebut tidak akan memberi dampak negatif terhadap bisnis dan operasional Perusahaan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari peraturan pelaksana Omnibus Law, serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perusahaan.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020

Berdasarkan UU No. 2/2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID -19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, Pemerintah Indonesia menyesuaikan tarif PPh Badan dalam negeri menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi sebesar 20% pada tahun pajak 2022 dan seterusnya (2019: tarif PPh Badan 25%).

c. Gugatan Mantan Pekerja Pertamina

Pada tanggal 23 Agustus 2018, Perusahaan digugat oleh 127 orang Peserta Tabungan Pegawai Pertamina yang terdaftar dalam *individual account* per tanggal 15 Juli 2002 dengan register Perkara Nomor 636/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL.

Pada tanggal 20 Februari 2020, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan para mantan pekerja tersebut tidak dapat diterima sehingga Perusahaan dimenangkan dalam perkara tersebut, namun demikian para mantan pekerja tersebut masih melakukan upaya hukum atas putusan pengadilan, melalui banding.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, status perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan banding, dan Perusahaan akan melakukan pengawasan atas pemeriksaan banding melalui kuasa hukum Perusahaan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

19. COMMITMENTS AND CONTINGENCY

a. Job Creation Bill

On 5 October 2020, the Indonesian Parliament agreed to pass the Job Creation Bill into law which is generally known as the Omnibus Law. The Omnibus Law was ratified on 2 November 2020 as Law No. 11/2020. The Omnibus Law is a comprehensive legislative instrument which will operate to directly amend an extensive number of underlying laws in a range of areas from permitting, labour and land procurement to taxation with all changes aiming to push the reform of the state's regulatory system and accelerate the national economic growth through enhancement of investment and employment. In February 2021, the Government officially enacted 49 implementing regulations of the Omnibus Law. The Company assessed that generally there is no potential adverse impact of the Law to the Company's business and operation.

As at authorisation date of these financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of the implementing regulations of the Omnibus Law, as well as the impact on the Company's financial statements

b. Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2020

Based on Law No. 2/2020 concerning state financial policies and financial system stability for handling the COVID-19 pandemic and/or in facing threats that endanger the national economy and/or financial system stability, the Government of Indonesia adjusted the corporate income tax rate to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and to 20% for 2022 fiscal year onward (2019: CIT rate of 25%).

c. Lawsuit of Former Pertamina Employees

On 23 August 2018, the Company was sued by 127 Pertamina Employee Savings Participants registered in an individual account as of 15 July 2002 with case register Number 636 /Pdt.G/2018/PN JKT.SEL.

On 20 February 2020, the Judges decided that the claims of the former employees could not be accepted so that the case resulted in favour of the Company, however, the former employees are still making legal actions against the court's decision, through appeal to the court.

As at the date of these financial statements, the status of the case is in the process of an appeal examination, and the Company will monitor the appeal examination through the Company's attorney.

Lampiran 5/44 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

20. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga). Tujuan dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan.

a. Risiko pasar

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan menanggung risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi dan saldo yang didenominasi dalam mata uang selain Rupiah. Mata uang yang menimbulkan risiko ini terutama adalah Dolar AS. Risiko nilai tukar mata uang asing dikelola sebaik mungkin dengan lindung nilai alami yaitu menyeimbangkan nilai kekayaan dan kewajiban masing-masing mata uang.

Sejauh ini, Perusahaan tidak memiliki liabilitas mata uang AS\$ dan belum menganggap perlu untuk melakukan upaya lindung nilai mata uang AS\$ terhadap Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, nilai aset dan liabilitas moneter Perusahaan dalam denominasi Dolar AS adalah sebagai berikut:

20. RISK MANAGEMENT POLICY

The Company's activities expose it to a variety of financial risks, which are credit risk, liquidity risk and market risk (including the effects of foreign currency exchange rates risk, and interest rates risk). The objectives of the Company's risk management are to identify, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Company's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Company.

a. Market risk

(i) Foreign exchange risk

The Company incurs foreign currency risk on transactions and balances that are denominated in currencies other than Indonesian Rupiah. The currency giving rise to this risk is primarily the US Dollar. Exposure to foreign currency risks is managed as far as possible by natural hedges of matching assets and liabilities denominated in foreign currencies.

So far, the Company does not have its liabilities denominated in US\$, and it still has not considered hedging US\$ to Rupiah. At 31 December 2020 and 2019, the value of the Company's monetary assets denominated in US Dollars are as follows:

	2020	2019	
Aset Kas dan setara kas	5,868,443	15,765,854	Asset Cash and cash equivalent
Jumlah aset moneter	5,868,443	15,765,854	Total monetary assets
Ekuivalen dalam mata uang asing	416	1,134	Equivalents in foreign currencies

Lampiran 5/45 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

20. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko pasar (lanjutan)

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba Perusahaan atas perubahan nilai mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

20. RISK MANAGEMENT POLICY (continued)

a. Market risk (continued)

(i) Foreign exchange risk

The table below summarises the sensitivity of the Company's profit to changes in foreign exchange rates as at 31 December 2020 and 2019:

	2020		
	Peningkatan/ Increased by 100bps	Penurunan/ Decreased by 100bps	
Pengaruh terhadap laba bersih setelah pajak	45,774	(45,774)	Impact net income after tax
	201	9	
	Peningkatan/ Increased by 100bps	Penurunan/ Decreased by 100bps	
Pengaruh terhadap laba			Impact net income after tax

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan memiliki aset dalam bentuk kas di bank dan deposito berjangka yang terekspos dengan fluktuasi suku bunga dan tidak mempunyai liabilitas kepada pihak ketiga yang terekspos dengan fluktuasi tingkat suku bunga pinjaman.

(ii) Risiko tingkat suku bunga (ii) Interest rate risk

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan tidak mempunyai liabilitas kepada pihak ketiga yang terekspos dengan fluktuasi tingkat suku bunga pinjaman.

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company does not have an obligation to third parties with interest rate fluctuation exposures.

As of 31 December 2020 and 2019, the

Company has mainly assets in the form of

cash in bank and time deposits exposed to

fluctuation of interest rate and does not have

obligation to third parties with interest rate

fluctuation exposures.

b. Risiko kredit

Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas dan piutang lain-lain. Untuk transaksi kas pada bank dan deposito berjangka, Perusahaan telah menempatkan dananya pada bank yang memiliki reputasi baik dan yang memiliki kualitas kredit yang baik terlihat dengan sebagian besar bank tersebut berperingkat "Baa3" dari lembaga pemeringkat Moody's per 31 Desember 2020.

Manajemen berkeyakinan akan kemampuannya untuk terus mengontrol dan mempertahankan eksposur risiko kredit pada tingkat yang dapat diterima.

b. Credit risk

Credit risk mainly arises from cash and cash equivalents and other receivables. For cash in bank and time deposits, the Company had placed its funds in reputable banks with good credit quality as evidenced by most of the banks being rated "Baa3" based on rating agency Moody's per 31 December 2020.

Management believes in its ability to keep control and maintain credit risk exposure at an acceptable level.

Lampiran 5/46 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

20. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Pada saat ini Perusahaan dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Perusahaan berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Perusahaan memiliki aset keuangan yang likuid dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Risiko likuiditas muncul pada saat terjadi gangguan terhadap arus kas Perusahaan yang disebabkan oleh risiko likuiditas aset maupun risiko likuiditas pendanaan. Perusahaan setiap saat selalu menjaga agar dana yang tersedia di deposito dalam jumlah yang masih aman untuk memenuhi liabilitas Perusahaan yang jatuh tempo. Sampai dengan saat ini Perusahaan selalu dapat melaksanakan pembayaran liabilitas secara tepat waktu.

Tabel dibawah ini menerangkan profil jatuh tempo kewajiban keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan:

20. RISK MANAGEMENT POLICY (continued)

c. Liquidity risk

At present the Company expects to pay all liabilities at their contractual maturity. In order to meet such cash commitments, the Company expects its operating activities to generate sufficient cash inflows. In addition, the Company holds liquid financial assets that are available to

meet liquidity needs.

Liquidity risk occurs when cash flow problems arise in the Company, which are caused by asset liquidity risks or funding liquidity risks. Therefore, the Company always maintains its funds in deposit for an amount that is sufficient to meet the maturing liabilities of the Company. Until now, the Company has always settled its obligations in a timely manner.

The table below summarise the maturity profile of the company's financial liabilities based on undiscounted contractual payments:

		202	0		
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun/ More than one year and not later than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years	Jumlah/ Total	
Liabilitas Utang lain-lain Liabilitas sewa Beban akrual	2,434,377 620,435 5.870,060	560,812 	- -	2,434,377 1,181,247 5,870,060	Liabilities Other payables Lease liabilities Accrued expenses
Jumlah	8,924,872	560,812		9,485,684	Total
		201 Lebih dari satu tahun	9		
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	dan kurang dari lima tahun/ More than one year and not later than five years	Lebih dari lima tahun/ More than five years	Jumlah/ Total	
Liabilitas Utang lain-lain Beban akrual	2,386,223 5,858,532			2,386,223 5,858,532	Liabilities Other payables Accrued expenses
Jumlah	8,244,755	=======================================	<u>-</u>	8,244,755	Total

Lampiran 5/47 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan diharapkan akan dapat direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dekat, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Perusahaan menganalisis aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Hirarki nilai wajar Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

20. RISK MANAGEMENT POLICY (continued)

d. Fair value estimation

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The Company's current financial assets and liabilities are expected to be realised or settled in the near term, except for financial assets which are measured at fair value. Therefore, their carrying amounts approximate their fair value.

The Company analyses its financial assets which are measured at fair value. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and
- Inputs for the assets or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable input) (Level 3).

The Company's fair value hierarchy as of 31 December 2020 is as follows:

	2020				
	Jumlah/ <i>Total</i>	Harga pasar yang dikuotasikan untuk aset dan liabilitas yang sama (Tingkat 1)/Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)	Input yang signifikan dan dapat diobservasi secara langsung (Tingkat 2)/ Significant and observable inputs, direct or indirectly (Level 2)	Input yang signifikan tetapi tidak dapat diobservasi (Tingkat 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)	
Penyertaan saham/Investments in shares	3,144,604,333			3,144,604,333	
Jumlah/ <i>Total</i>	3,144,604,333			3,144,604,333	

Lampiran 5/48 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

21. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang lainlain dan pendapatan bunga yang masih akan diterima sebesar Rp623.194.375 (2019: Rp691.862.924) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi untuk tahun 2020 dan pinjaman yang diberikan dan piutang untuk tahun 2019, dan mengklasifikasikan penyertaan saham sebesar Rp3.144.604.333 (2019: Rp124.815.694) sebagai aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain untuk tahun 2020 dan aset keuangan yang tersedia untuk dijual untuk tahun 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mengklasifikasikan utang lain-lain, liabilitas yang masih harus dibayar, dan liabilitas sewa sebesar Rp9.240.918 (2019: Rp8.244.755) sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi untuk tahun 2020 dan liabilitas pada biaya perolehan untuk tahun 2019.

21. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2020, the Company classified its cash and cash equivalents, other receivables and accrued interest income amounting to Rp623,194,375 (2019: Rp691,862,924) as financial assets at amortised cost in 2020 and loans and receivables in 2019, and classified its investment in shares amounting to Rp3,144,604,333 (2019: Rp124,815,694) as financial assets at fair value through comprehensive income in 2020 and available-for-sale financial assets in 2019.

As at 31 December 2020, the Company classified its other payables, accrued liabilities and lease liabilities amounting to Rp9,240,918 (2019: Rp8,244,755) as financial liabilities held at amortised cost in 2020 and as liabilities at amortised cost in 2019.

22. REKLASIFIKASI AKUN

Angka komparatif pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Cabalum

22. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Cooudab

Certain comparative figures in the financial statements or the year ended 31 December 2019 have been reclassified to conform to the basis on which the financial statements for the year ended 31 December 2020 have been presented, with details as follows:

	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Reklasifikasi/ Reclassifications	Sesudah reklasifikasi/ After reclassification	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				Statement of profit or loss and other comprehensive income
Lain-lain, bersih	(11,467,951)	4,391,488	(7,076,463)	Others, net
Beban pajak penghasilan	(7,112,444)	(4,391,488)	(11,503,932)	Income tax expense
Laba tahun berjalan	(18,580,395)	-	(18,580,395)	Income for the year
Laporan posisi keuangan				Statement of financial position
Liabilitas jangka pendek Utang lain- lain				Current liabilities Other payables
Pihak berelasi	2,287,906	(2,146,234)	141,672	Related parties
Pihak ketiga	98,317	2,146,234	2,244,551	Third parties
Total liabilitas jangka pendek	2,386,223	-	2,386,223	Total current liabilities

Lampiran 5/49 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2020

(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

22. REKLASIFIKASI AKUN (lanjutan)

22. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS (continued)

	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Reklasifikasi/ Reclassifications	Sesudah reklasifikasi/ After reclassification	
Laporan arus kas				Statement of cash flows
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan pendapatan dividen		(16,236,445)	75,429,817	
Penerimaan pendapatan bunga	51,243,399	(10,093,627)	41,149,772	
Pembayaran kepada karyawan, pemasok dan beban				Payment to employee, supplier and operating
operasional	(25,732,475)	(193,771)	(25,926,246)	expense
Pembayaran pajak				
penghasilan	(33,636,287)	26,523,843	(7,112,444)	Payment for income taxes
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	83,540,899	-	83,540,899	Net cash flows provided by operating activities

23. WABAH COVID-19

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, tidak terdapat dampak ekonomi yang signifikan sebagai akibat wabah COVID-19. Dampak jangka panjang sulit untuk diprediksi pada saat ini. Manajemen akan terus memonitor hal ini dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko terkait dan ketidakpastian terkait hal tersebut di masa depan.

23. COVID-19 OUTBREAK

As at the date of financial statements, there is no significant economic impact as a result of the COVID-19 outbreak. The long-term impacts, however, are difficult to predict at this moment. Management will continue to monitor this and take the necessary actions to address related risks and uncertainties going forward.





Kantor Pusat

Gedung Wisma Tugu Raden Saleh Lantai 4. Jl. Raden Saleh No.44 Cikini Menteng - Jakarta Pusat 10330

Telepon & Fax (021) 391 1857 (021) 391 1859

Email pdv@pdv.co.id

Website https://pdv.co.id

